

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi*

OLEH :

GERMAN P.B. SIANIPAR
NPM : 2220050028



**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN TESIS

Nama : GERMAN P.B. SIANIPAR

Nomor Pokok Mahasiswa : 2220050028

Prodi/Konsentrasi : Magister Akuntansi/ Akuntansi Manajemen

Judul Tesis : **PENGARUH KEJELASAN SASARAN
ANGGARAN DAN PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PEMODERASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH
KOTA BINJAI**

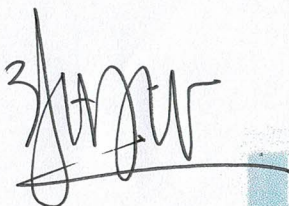
Pengesahan Tesis

Medan, 17 Oktober 2025

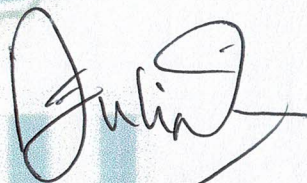
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA



Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.

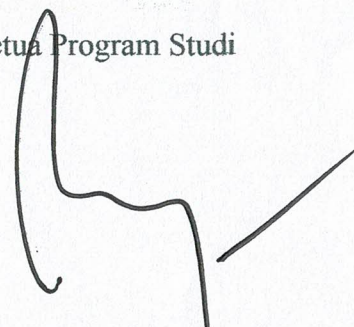
Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



PROF. Dr. TRIONO EDDY S.H. M.Hum



Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

PENGESAHAN

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI

GERMAN P.B. SIANIPAR
2220050028

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak)
Pada Hari Selasa, Tanggal 15 Juli 2025

Komisi Penguji

1. Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si., CA

Ketua

1.....

2. Dr. Hj. Dahrani, S.E.

Sekretaris

2.....

3. Assoc. Prof. Dr. Irfan, S.E., M.M.

Anggota

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di Perguruan Tinggi lain.
3. Tesis ini Adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 17 Oktober 2025

Penulis



GERMAN P.B. SIANIPAR
2220050028

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)
DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI**

GERMAN P.B. SIANIPAR

NPM.2220050028

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Pemerintah Kota Binjai dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai variabel moderator. Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi terdiri dari 28 Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Pemerintah Kota Binjai. Seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu sebanyak 28 OPD Pemerintah Daerah Kota Binjai, sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel. Responden setiap Organisasi Perangkat Daerah ada 3 (tiga) orang, yaitu Kepala, Sekretaris dan Kepala Bidang, serta Kasubag Keuangan atau Bendahara dengan jumlah responden sebanyak 84 orang. Penelitian ini terdiri dari variabel independen kejelasan sasaran anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel dependen akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderator. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Persamaan Struktural (SEM) yang berbasis pada Partial Least Square (PLS), dengan tujuan untuk menjalankan analisis jalur antara variabel laten. Aplikasi yang digunakan untuk analisis adalah perangkat lunak SmartPls versi 3.0 untuk windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Binjai; (2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Binjai; (3) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota Binjai; (4) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Binjai.

Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran; Pemanfaatan Teknologi Informasi; Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

**THE EFFECT OF BUDGET TARGET CLARITY AND INFORMATION
TECHNOLOGY UTILIZATION ON THE PERFORMANCE
ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT AGENCIES (AKIP) MODERATED
BY THE GOVERNMENT INTERNAL CONTROL SYSTEM (SPIP) A STUDY
IN THE CITY GOVERNMENT OF BINJAI**

GERMAN P.B. SIANIPAR

NPM.2220050028

ABSTRACT

This study aims to determine the extent of the influence of budget target clarity and information technology utilization on Government Agency Performance Accountability (AKIP) in the Binjai City Government with the Government Internal Control System (SPIP) as a moderating variable. The type of research conducted is an associative approach. The population consists of 28 Regional Apparatus Organizations in the Binjai City Government. All members of the population were used as research samples, namely 28 Regional Apparatus Organizations of the Binjai City Government, so that all members of the population were used as samples. There were three respondents from each Regional Apparatus Organization, namely the Head, Secretary and Head of Division, as well as the Head of the Finance Subdivision or Treasurer, with a total of 84 respondents. This study consists of independent variables of budget target clarity and information technology utilization with dependent variables of government agency performance accountability and government internal control systems as moderator variables. The data analysis method in this study uses a Structural Equation Model (SEM) based on Partial Least Square (PLS), with the aim of conducting path analysis between latent variables. The application used for the analysis is SmartPls software version 3.0 for Windows. The results of the study show that; (1) Budget target clarity affects the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP) in Binjai City; (2) The use of information technology affects the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP) in Binjai City; (3) The Government Internal Control System (SPIP) is unable to moderate the effect of budget target clarity on the performance accountability of government agencies (AKIP) in Binjai City; (4) The Government Internal Control System (SPIP) is unable to moderate the effect of information technology utilization on the Performance Accountability of Government Agencies (AKIP) in Binjai City.

Keywords: Clarity of Budget Targets; Utilization of Information Technology; Accountability of Government Agency Performance; Government Internal Control System

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan kesejahteraan, rahmat dan berkat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis yang berjudul Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Sebagai Variabel Moderating Studi Di Pemerintah Kota Binjai

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan tesis ini, oleh sebab itu perbaikan – perbaikan diharapkan dapat dilakukan dalam penulisan tesis selanjutnya dan penulis menyadari tidak dapat menyelesaikan penulisan tesis ini sendiri, banyak pihak yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini.

Penulis berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian tesis ini dan secara khusus peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Meyga Ruth Yanti, S.E., (istri penulis) serta Diana Gwen Putri Sianipar dan Gerhard Natanto Putra Sianipar (anak - anak penulis), yang selalu memberikan doa dan dukungan secara penuh dalam mengikuti dan menyelesaikan perkuliahan ini;
2. Ny. Endengker SM Sianipar, B.Sc St. Toberlina br. Siregar (Ibu penulis) serta Elisa Yuniarlin Sianipar, S.T., dan Eka Sutanti br. Sianipar, S.E. (Saudari penulis); yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis;

3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Ibu Prof. Dr. Maya Sari, S.E., Ak., M.Si. CA., Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sekaligus dosen penguji / pembahas yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini;
6. Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak, CA., Sekretaris Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan sekaligus pembimbing I yang telah banyak membimbing sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
7. Ibu Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si., pembimbing II yang telah banyak membimbing sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
8. Bapak Assoc. Prof. Dr. Irfan, S.E., M.M., dan Ibu Dr. Hj. Dahrani, S.E., M.Si., dosen penguji / pembahas yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penulisan tesis ini
9. Bapak Amir Hamzah, S.Sos., M.AP., Wali Kota Binjai dan Bapak Majid Ginting, S.Sos, M.Si., Kepala Bappeda Kota Binjai tahun 2022 yang telah memberikan izin belajar kepada penulis;
10. Abang Lindung Limbong, S.Sos, Kepala Bidang Ekososbud Bapperida Kota Binjai dan Abang Arief Purnomo, S.Pt., M.AP, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Bapperida Kota Binjai yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis dalam menyelesaikan tugas-tugas penulis;

11. Bapak dan Ibu seluruh Dosen Program Studi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
12. Seluruh rekan-rekan di Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kota Binjai, terutama yang berada di Bidang Perekonomian Sosial dan Budaya dan di Bidang Sarana dan Prasarana;
13. Staff Biro Akademik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
14. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai;
15. Para sahabat serta rekan-rekan Mahasiswa Angkatan 2022 Genap Prodi Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Akhir kata penulis mengucapkan semoga Tuhan menambahkan berkat, kesejahteraan dan kedamaian dalam kehidupan ini dan semoga karya ini dapat bermanfaat bagi almamater dan bagi kita semua. Amin.

Medan,

Penulis

German P.B. Sianipar

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	19
1.3 Rumusan Masalah	20
1.4 Tujuan Penelitian	21
1.5 Manfaat Penelitian	22
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	 23
2.1 Landasan Teori	23
2.1.1 Teori Keagenan	23
2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	24
2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	25
2.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ...	28
2.1.2.3 Faktor - Faktor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	31
2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	32
2.1.2.5 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	33
2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran	36
2.1.3.1 Fungsi Anggaran	38
2.1.3.2 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran	41
2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	43
2.1.4.1 Pengertian Teknologi Informasi	43
2.1.4.2 Jenis-jenis Teknologi Informasi	45
2.1.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi	46
2.1.4.4 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi	47
2.1.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	48
2.1.5.1 Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	51
2.2 Kajian Penelitian yang Relevan	54
2.3 Kerangka Konseptual	64
2.4 Hipotesis	71
 BAB III METODE PENELITIAN	 72
3.1 Pendekatan Penelitian	72
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	73
3.2.1 Tempat Penelitian	73
3.2.2 Waktu Penelitian	73
3.3 Populasi dan Sampel	74

3.3.1	Populasi	74
3.3.2	Sampel	74
3.4	Definisi Operasional Variable	76
3.5	Jenis dan Sumber Data	79
3.6	Teknik Pengumpulan Data	79
3.6.1	Uji Validitas dan Reliabilitas	80
3.6.1.1	Uji Validitas	80
3.6.1.2	Uji Reliabilitas	83
3.7	Teknik Analisis Data	84
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif	84
3.7.2	Analisis SEM (Struktural Equation Modelling)	84
3.7.3	Evaluasi Model	85
1	Evaluasi Outer Model	86
2	Evaluasi Inner Model	88
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	91
4.1	Hasil	91
4.1.1	Deskripsi Data	91
4.1.2	Hasil Pengujian SEM PLS	107
4.1.2.1	Analisis Outer Model	107
4.1.2.2	Analisis Inner Model	116
4.1.3	Hasil Uji Hipotesis ...	121
4.2	Pembahasan	124
4.2.1	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja	124
4.2.2	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	132
4.2.3	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di Moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	139
4.2.4	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di Moderasi Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)	146
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	151
5.1	Kesimpulan	151
5.2	Saran	152
DAFTAR PUSTAKA		ix
LAMPIRAN		xii

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Tingkat Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 3
Tabel 1.2	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Binjai 4
Tabel 1.3	Perbandingan Tingkat Penilaian AKIP Kota di Provinsi Sumatera Utara 5
Tabel 1.4	Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2023 7
Tabel 1.4	Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2022 16
Tabel 1.5	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara 17
Tabel 2	Kajian Penelitian yang Relevan 54
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian 73
Tabel 3.2	OPD Pada Pemerintah Kota Binjai 75
Tabel 3.3	Definisi Operasional Variabel 77
Tabel 3.4	Skala Likert 80
Tabel 3.5	Hasil Uji Validitas 81
Tabel 3.6	Hasil Uji Reliabilitas 83
Tabel 4.1	Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 91
Tabel 4.2	Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 91
Tabel 4.3	Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 92
Tabel 4.4	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja 93
Tabel 4.5	Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan 93
Tabel 4.6	Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan 94
Tabel 4.7	Skala 96
Tabel 4.8	Deskripsi Jawaban Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran 96
Tabel 4.9	Deskripsi Jawaban Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi 99
Tabel 4.10	Deskripsi Jawaban Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 102
Tabel 4.11	Deskripsi Jawaban Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 105
Tabel 4.12	Outer Loading 108
Tabel 4.13	Cross Loading 110
Tabel 4.14	Average Varianed Extracted (AVE) 112
Tabel 4.15	Heroit-Monotrait Ratio (HTMT) 113
Tabel 4.16	Composite Reliability 114
Tabel 4.17	Cronbach's Alpha 115
Tabel 4.18	Estimation Weight 116
Tabel 4.19	Path Coefficient 117
Tabel 4.20	Koefisien Determinasi (R-Square) 118
Tabel 4.21	F-Square 120
Tabel 4.22	T-Statistics dan P-Values 122

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual	70
Gambar 3.1	Model Struktural PLS	85
Gambar 4.1	Persentase Jawaban Responden Kejelasan Sasaran Anggaran	98
Gambar 4.2	Persentase Jawaban Responden Pemanfaatan Teknologi Informasi	101
Gambar 4.3	Persentase Jawaban Responden Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	104
Gambar 4.4	Persentase Jawaban Responden Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	106
Gambar 4.5	Skema Penelitian Struktural SEM-PLS	108
Gambar 4.6	R Square	119
Gambar 4.7	F – Square	121
Gambar 4.8	Path Coefitients	124

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran I	Tabulasi Data Penelitian	xii
Lampiran II	Pengolahan Data	xiv
Lampiran III	Kuisoner Penelitian	xxiii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan prinsip Good Government Governance saat ini membangun sebuah paradigma baru khususnya pada pengelolaan keuangan daerah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam pelaksanaan Good Government Governance meliputi transparency, responsiveness, consensus orientation, effectiveness, efficiency equity, dan accountability. Dalam rangka mewujudkan prinsip tersebut, pemerintah dapat menjalankan tiga mekanisme, yaitu: (1) Menerima aspirasi masyarakat dan membangun kerjasama dalam hal pemberdayaan masyarakat, (2) Memperbaiki mekanisme pengendalian serta panduan dari peraturan-peraturan internal, dan (3) membentuk budaya kompetisi dalam pelayanan kepada masyarakat (Mardiasmo, 2006).

Pemerintah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan dengan transparan dan akuntabel. Tuntutan dari masyarakat yang mengharapkan adanya pengelolaan yang baik dari pemerintahan melalui penerapan sistem akuntabilitas yang terukur dan sah sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Dengan cara ini, penyelenggaraan pemerintahan akan dilakukan secara transparan dan dapat mencegah kegiatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tuntutan tersebut dikenal sebagai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. (Nurina & Yahya, 2016).

Akuntabilitas kinerja adalah tanggung jawab lembaga pemerintah untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan program dan

kegiatan yang ditugaskan, guna mencapai misi organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditentukan melalui laporan kinerja yang dibuat secara berkala. Penetapan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah wujud pelaksanaan dari PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang menyatakan bahwa setiap entitas diharuskan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta laporan kinerja terkait pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Bentuk pelaksanaan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah salah satunya dengan membuat laporan kinerja yang dihasilkan dari sebuah sistem manajemen kinerja berupa sistem akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. Tahun 2014, dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan serangkaian kegiatan, instrumen, dan langkah-langkah yang disusun dengan tujuan untuk menetapkan dan mengukur, mengumpulkan informasi, mengklasifikasikan, merangkum, dan menyampaikan kinerja di lembaga pemerintah, sebagai bentuk akuntabilitas dan perbaikan kinerja lembaga pemerintah. (Khairunsyah; Yulia Efni. 2018).

Output yang dihasilkan dari SAKIP ini berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP). Kewajiban pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ini diberikan kepada seluruh instansi pemerintah. Hasil akhir evaluasi AKIP akan diberikan oleh Kemenpan RB dalam bentuk pemeringkatan

(rating) hasil evaluasi. Pemeringkatan hasil evaluasi tersebut berkisar dari AA (sangat memuaskan) hingga D (sangat kurang).

Tabel 1.1 Tingkat Penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No	Kategori	Nilai Angka	Interprestasi
1.	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2.	A	> 80 - 90	Memuaskan
3.	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
4.	B	> 60 - 70	Baik
5.	CC	> 50 - 60	Capaian Cukup (Memadai)
6.	C	> 30 - 50	Kurang
7.	D	> 0 - 30	Sangat Kurang

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Deputi bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto pada Diskusi dan Komunikasi Online (Disko) episode I yang tayang di kanal YouTube Kementerian PANRB dan saluran resmi menpan.go.id tanggal 11 Maret 2022, menyatakan bahwa pelaksanaan penilaian AKIP berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selama enam tahun, penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) telah mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) No. 12/2015 tentang Pedoman Penilaian Terhadap Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sejalan dengan perubahan yang terjadi di sektor pemerintahan, Kementerian PANRB memodernkan pedoman evaluasi AKIP melalui Peraturan

Menteri PANRB No. 88/2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang akan efektif digunakan pada 2022.

Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) hasil evaluasi oleh Kementerian PANRB merupakan salah satu syarat utama, minimal B untuk usulan menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan BB untuk usulan menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi hampir seluruh aspek pengelolaan perubahan, pengaturan tata laksana, pengaturan sistem manajemen sumber daya manusia, peningkatan pengawasan, dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Sementara itu, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan sebutan yang diberikan kepada unit kerja yang sudah memenuhi hampir seluruh aspek pengelolaan perubahan, pengaturan tata laksana, pengaturan sistem manajemen sumber daya manusia, peningkatan pengawasan, peningkatan akuntabilitas kinerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Binjai oleh Kementerian PANRB dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1.2 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
Kota Binjai

No	Komponen	Bobot	Nilai			Bobot	Nilai	
			2019	2020	2021		2022	2023
1	Perencanaan Kinerja	30	15,45	16,25	16,61	30	17,63	18,17
2	Pengukuran Kinerja	25	12,88	10,15	9,90	30	11,03	11,74

3	Pelaporan Kinerja	15	7,72	9,15	9,55	15	10,05	10,06
4	Evaluasi Internal	10	5,15	5,31	5,31	25	15,40	15,70
5	Capaian Kinerja	20	10,30	10,67	10,80	-	-	-
Nilai Hasil Evaluasi		100	51,50	51,53	52,17	100	54,11	55,67
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		-	CC	CC	CC	-	CC	CC

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai Tahun 2023 ada pada tingkat CC, yang menunjukkan interpretasi cukup. Jika dilihat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, terjadi stagnansi, sejak tahun 2019 hingga tahun 2023, walaupun terdapat gradasi kenaikan poin secara perlahan, dimana pada tahun 2019 bernilai 51,50 menjadi 56,67 pada tahun 2023, akan tetapi selalu berada pada kisaran tingkat CC (50-60). Tingkat CC tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Cukup”, artinya implementasi AKIP sudah cukup baik, namun masih terdapat banyak hal yang harus diperbaiki meskipun tidak pada aspek yang fundamental.

Akibatnya dapat disimpulkan bahwa belum sepertiga ($\frac{1}{3}$ unit kerja) Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Binjai, khususnya pada unit kerja utama, yang telah berkinerja baik. Pengukuran kinerja belum dilakukan hingga tingkat eselon 2 atau unit kerja. Diperlukan beberapa perbaikan pada unit kerja, bersama dengan komitmen dalam pengelolaan kinerja.

**Tabel 1.3 Perbandingan Tingkat Penilaian AKIP Kota
di Provinsi Sumatera Utara**

No	Kota di Provinsi Sumatera Utara	Nilai	Tingkat Akuntabilitas
1.	Kota Binjai	CC	Capaian Cukup

2.	Kota Medan	B	Baik
3.	Kota Tebing Tinggi	B	Baik
4.	Kota Tanjung Balai	B	Baik
5.	Kota Padang Sidempuan	B	Baik
6.	Kota Sibolga	CC	Capaian Cukup
7.	Kota Pematang Siantar	CC	Capaian Cukup
8.	Kota Gunung Sitoli	CC	Capaian Cukup

Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Tingkat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Binjai, masih berada pada tingkat yang rendah, jika dibandingkan dengan pemerintah kota - pemerintah kota yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Hasil tinggi didapat oleh Kota Medan, Kota Tebing Tinggi, Kota Tanjung Balai, Kota Padang Sidempuan dengan Tingkat Akuntabilitas Kinerja B dengan kategori baik.

Menurut Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto dalam halaman resmi menpan.go.id, mengatakan bahwa implementasi SAKIP pada level kementerian / lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif sejak tahun 2016 hingga tahun 2023. Hal tersebut ditandai dengan persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Akuntabilitas Kinerja Baik pada 2023 dengan realisasi sebesar 97,6 Persen Kementerian / Lembaga, 100 Persen Pemerintah Provinsi, dan 77.2 Persen Pemerintah Kabupaten / Kota.

Namun demikian dalam perkembangannya, implementasi SAKIP saat ini masih menyisakan berbagai catatan, diantaranya implementasi yang masih

bersifat parsial atau instansional sehingga kerap ditemukan ketidakselarasan dalam mendukung tercapainya target pembangunan nasional, penetapan kinerja yang masih silo antar K/L dan Pemda sehingga outcome bersama belum berjalan dengan baik, serta terdapat kondisi dimana akuntabilitas kinerja instansi tercapai, namun akuntabilitas kinerja secara nasional tidak tercapai.

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa kuat lemahnya komitmen dari pimpinan instansi pemerintah untuk menciptakan good governance dan clean government di lingkungan kerjanya merupakan faktor terpenting dalam mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal lain ialah kekurangan sumber daya manusia dan keuangan adalah masalah yang sering dihadapi oleh birokrasi di berbagai tingkat pemerintahan. Keterbatasan ini dapat menghambat kemampuan birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka secara efektif. Ketika sumber daya tidak memadai, birokrasi mungkin kesulitan dalam melaksanakan kebijakan, memenuhi kebutuhan publik, dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

**Tabel 1.4 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kota Binjai Tahun Anggaran 2023**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi (%)
1	Pendapatan Daerah	1.035.369.934.160	919.227.611.740	88,78
1.a	Pendapatan Asli Daerah	230.858.054.625	113.119.618.444	49
1.b	Pendapatan Transfer	790.511.879.535	794.276.469.514	100,48
1.c	Pendapatan Lain-lain	14.000.000.000	11.831.523.782	84,51
2	Belanja Daerah	1.038.614.999.856	919.841.330.722	88,78
2.a	Belanja Operasional	858.411.341.877	790.899.677.846	92,14
2.b	Belanja Modal	179.411.542.071	128.941.652.876	71,87

2.c	Belanja Tidak Terduga	792.115.908	0	0
	Defisit	3.245.065.696	613.718.981	18,91
	Pembiayaan Daerah	3.245.065.969	5.004.830.206	154,23
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0	4.391.111.225	0

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Binjai

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah Kota seperti dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 62 Tahun 2017 dikategorikan atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

1. KKD di atas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah kategori tinggi;
2. KKD Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah kategori sedang; dan
3. KKD di bawah Rp300.000.000 000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah kategori rendah.

Keputusan Wali Kota Binjai Nomor 188.45-19/K/Tahun 2022 Tentang Kemampuan Keuangan Daerah Kota Binjai Tahun Anggaran 2022 menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kota Binjai ditetapkan di bawah Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar) dikelompokkan pada kemampuan keuangan daerah rendah. Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah adalah data realisasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Anggaran adalah komponen krusial dalam manajemen kontrol karena ia berfungsi tidak hanya sebagai instrumen perencanaan finansial, tetapi juga sebagai sarana untuk mengendalikan, mengkoordinasikan, berkomunikasi, menilai kinerja, dan memotivasi (Kenis, 1979; Chow et al., 1988; Antony dan Govindarajan, 1998, Halim et al., 2000). Data anggaran mendukung manajemen tingkat atas dalam menilai efektivitas manajer di berbagai bidang serta dalam memberikan imbalan (rewards) dan sanksi (punishments). Dalam hal ini, keberadaan anggaran sangat penting sebagai komponen dalam merancang sistem organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan sikap dan hasil kerja manajerial. Anggaran juga dapat berfungsi sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja, karena sistem penganggaran dapat mendukung atau menghalangi pencapaian tujuan perusahaan.

Salah satu ciri anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Dalam konteks pemerintah daerah, tujuan anggaran terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD). Berdasarkan (Kenis (1979) dalam Mulya, H. G. dan Fauzihardani, E. (2022)), adanya tujuan anggaran yang jelas memungkinkan individu untuk menetapkan target-target anggaran. Selanjutnya, target-target yang telah ditetapkan akan sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi. Dalam konteks pemerintah daerah, kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi aparat untuk merancang anggaran sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah, sehingga mereka akan memiliki informasi yang cukup untuk membuat prediksi masa depan dengan tepat. Selanjutnya, hal ini akan

menurunkan perbedaan antara anggaran yang disusun dengan estimasi terbaik bagi organisasi.

Studi mengenai keterkaitan antara kejelasan sasaran anggaran dan efeknya yang lebih berfokus pada sektor publik, seperti yang ditunjukkan oleh (Fidela Nuzul Azmi, dkk, 2023) dan (Sri Wahyu Ningsih, dkk, 2022), menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki dampak signifikan pada akuntabilitas kinerja lembaga pemerintahan. Selain itu, penelitian dari (Nyoman Agus Mahapradnya, dkk, 2023) yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berdampak positif terhadap performa lembaga pemerintah. Temuan ini juga diperkuat oleh karya penelitian (Helin Gustri Mulya, dkk, 2022) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Namun demikian, terdapat ketidakcocokan dalam hasil yang ditemukan di dalam penelitian (Indah Nur Anisa, dkk, 2022), yang menyebutkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak memberikan pengaruh yang signifikan pada akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Penelitian lainnya oleh (Putri Ayu Lestari, dkk, 2023) menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran tidak berkontribusi terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah.

Pemanfaatan teknologi informasi merujuk pada sikap dan tindakan akuntan dalam menggunakan teknologi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan hasil kerja mereka. Menurut Wijana (2007), pemanfaatan teknologi informasi adalah manfaat yang diharapkan pengguna sistem informasi saat menjalankan pekerjaan atau perilaku mereka saat menggunakan teknologi.

Pengukurannya dilakukan melalui seberapa sering teknologi digunakan, berapa banyak penggunaan yang terjadi, serta jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang dipakai. Penggunaan teknologi informasi yang efektif, dikombinasikan dengan keterampilan individu yang menggunakannya, dapat meningkatkan kinerja baik di tingkat perusahaan maupun individu.

Kehadiran Perpres (Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) merupakan babak baru bagi tata kelola atau manajemen pemerintahan di Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, seluruh instansi pemerintah wajib menerapkan SPBE atau yang lebih dikenal dengan *e-government*.

SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE, yang ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Sebenarnya, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang merupakan embrio dari *e-government* itu sendiri, bukan barang baru di tanah air, termasuk di kalangan birokrasi pemerintah. Namun, dalam implementasinya masih bersifat silo-silo, sehingga terjadi inefisiensi.

Dalam halaman resmi menpan.go.id, artikel berjudul Babak Baru Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik tanggal 02 April 2019, untuk memetakan *e-government* secara nasional, tahun 2018, Kementerian PANRB melakukan evaluasi penerapan *e-government* pada 616 instansi pemerintah.

Hasilnya menunjukkan, bahwa sebanyak 82 instansi pemerintah (13,31%) berpredikat baik, sangat baik, dan memuaskan. Sedangkan, 534 instansi pemerintah (86,69%) berpredikat cukup dan kurang. Potret SPBE Nasional itu belum sesuai target yang diharapkan mencapai kategori predikat baik, dengan indeks 2,6 atau lebih yang diharapkan bisa tercapai pada tahun 2020.

Dalam media web sumutpos.jawapos.com, artikel berjudul Pemko Binjai Raih Predikat Baik Penerapan SPBE, Wali Kota Binjai mengatakan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintah berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023, Pemerintah Kota Binjai berhasil meraih predikat baik secara Nasional, dengan indeks SPBE sebesar 2.98. Predikat ini menjadikan Kota Binjai sebagai peringkat ke-2 untuk kota Se-Sumatera Utara dan peringkat ke-4 untuk kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Keterbukaan informasi publik sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi pada era digital saat ini. Informasi yang didapat sudah selayaknya bisa diandalkan, terpercaya serta mudah dijangkau secara interaktif dan selalu mengedepankan sisi edukatif dengan menerapkan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mewujudkan proses kerja yang efisien dan efektif serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Digitalisasi tata kelola pemerintahan ini juga merupakan langkah nyata reformasi birokrasi yang bermuara pada peningkatan kualitas layanan publik.

Seiring perkembangan zaman, birokrasi pemerintahan pun harus beradaptasi. Implementasi *e-government* akan menekan praktik curang dalam birokrasi, seperti pungutan liar, suap menyuap, bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Di tengah tantangan dunia menghadapi revolusi industri 4.0 ini, penerapan *e-government* bagi penyelenggara negara adalah sebuah keharusan, bukan pilihan. Berdasarkan Perpres tersebut, seluruh penyelenggara negara mulai dari pusat hingga daerah ‘dipaksa’ untuk menerapkan *e-government* secara terintegrasi sebagai babak baru pengelolaan semua urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat menerapkan SPBE.

Digitalisasi sistem pemerintahan ini, adalah salah satu cara untuk mereformasi birokrasi yang bermuara pada pelayanan publik yang prima. Penerapan SPBE secara optimal akan berdampak pada integrasi sistem sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Semua pimpinan instansi pemerintah, dari pusat hingga daerah, harus mendukung akselerasi SPBE pada tiga domain utama, yaitu kebijakan, tata kelola, dan layanan.

Ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Gebyvia Septiyani dan rekan-rekannya (2020) serta Deni Harianto dan timnya (2021) yang mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi informasi memiliki dampak terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah dalam sistem pelaporan, dan juga memberikan pengaruh positif pada variabel akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Hal yang serupa juga ditemukan oleh Pandu Haryanto dan Ratih (2023) yang mencatat bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan pengaruh positif yang signifikan pada akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Evada Dewata dan tim (2020) menunjukkan bahwa sistem pelaporan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah.

Hal yang berbeda diungkapkan oleh Mujannah dan rekan-rekannya (2022) yang menyatakan bahwa teknologi informasi tidak berkontribusi pada AKIP. Berita berbeda juga disampaikan oleh Theodora Oktavia dan Endah (2023) yang menemukan bahwa penggunaan Teknologi Informasi secara terpisah tidak memberikan dampak pada variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Pengendalian Intern menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 dijelaskan sebagai suatu proses yang menyeluruh dari tindakan serta aktivitas yang dilakukan secara berkelanjutan oleh manajemen dan seluruh staf untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dalam menyediakan aset negara serta mematuhi berbagai hukum dan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian internal yang diimplementasikan secara menyeluruh di seluruh lingkungan pemerintah, baik pusat maupun daerah. (Nilam Sari, 2016)

Pengendalian internal yang berjalan dengan baik di dalam pemerintahan dapat menciptakan semua proses kegiatan yang efisien, yang pada gilirannya akan memberikan kepastian yang cukup untuk menjaga aset negara dan memastikan keandalan laporan keuangan daerah. Hal ini berkontribusi positif terhadap akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah. Mengenai sistem pengendalian internal, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, ditegaskan bahwa pengendalian internal mencakup berbagai kebijakan, yaitu (1) mengenai pencatatan keuangan, (2) menjamin kepastian yang cukup bahwa laporan keuangan telah disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah, serta bahwa penerimaan dan pengeluaran sudah sesuai dengan otorisasi yang tepat, (3) memberikan jaminan yang cukup atas keamanan aset yang berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah.

Perincian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2022 BPK RI Perwakilan Sumatera Utara dapat terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.4 Jumlah Permasalahan dalam Pemeriksaan Tahun 2022

No	Uraian	Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kab / Kota	BUMD	Total
		Jlh Permasalahan	Jlh Permasalahan	Jlh Permasalahan	
A	Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan				
1	Ketidakpatuhan (1) Kerugian, (2) Potensi kerugian, (3) Kekurangan penerimaan	35	371	0	406
2	Penyimpangan Administrasi	7	96	0	103
3	Kelemahan SPI	7	154	0	161
B	Permasalahan Kinerja (Ketidakhematan, Ketidakefisienan, Ketidakefektifan)				
1	Ketidakhematan	0	0	0	0
2	Ketidakefisienan	0	0	0	0
3	Ketidakefektifan	16	44	0	60
	Total	65	665	0	730

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah BPK RI Prov Sumut Tahun 2022

Berdasarkan tabel permasalahan dalam pemeriksaan tahun 2022 di atas, terdapat 2 (dua) permasalahan utama, yaitu Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan Permasalahan Kinerja (Ketidakhematan, Ketidakefisienan, Ketidakefektifan). Salah satu unsur dalam ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan, adalah kelemahan SPI, dimana kelemahan SPI (Sistem Pengendalian Intern) terdeteksi sebanyak 161 (24,02%) dari total 670 permasalahan. Selanjutnya, Kelemahan

SPI tersebut mayoritas terdapat di Pemerintah Kabupaten / Kota yaitu sebanyak 154 (95,65%) dari total 161 permasalahan Kelemahan SPI secara keseluruhan.

Tingkat maturitas SPIP juga salah satu indikator yang dapat dimaknai sebagai sejauh mana kedewasaan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah dapat berjalan. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi aktivitas yang bermanfaat dan hemat sumber daya, ketepatan laporan keuangan, perlindungan terhadap harta negara, serta kepatuhan pada undang-undang yang berlaku. Parameter tersebut diperoleh dari hasil evaluasi maturitas SPIP pada setiap tahunnya.

Tabel 1.5 Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kota di Provinsi Sumatera Utara

No	Kota di Provinsi Sumatera Utara	Skor Maturitas SPIP	Level
1.	Kota Binjai	3,100	Level 3
2.	Kota Medan	3,190	Level 3

Sumber: Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Perwakilan BPKP Prov Sumut

Hingga tahun 2023 realisasi kumulatif Pemerintah Kabupaten atau Kota di Provinsi Sumut yang memenuhi karakteristik maturitas SPIP pada Level 3 sebanyak 13 Kabupaten/Kota atau 39,39 % dari total 33 kabupaten atau kota di Provinsi Sumut. Dimana Kota Binjai memperoleh hasil Level 3 dari 5 tingkatan, artinya gambaran atas penyelenggaraan pengendalian intern berdasarkan hasil penilaian tersebut adalah pengendalian telah dibangun dan diimplementasikan, tetapi belum optimal dan belum diukur efektifitasnya.

Sistem pengendalian internal adalah inti dari akuntabilitas sumber daya suatu negara dan seberapa efektif pemerintah menggunakannya. Sistem pengendalian internal diperlukan dengan mempertimbangkan pembenahan perbaikan lingkungan organisasi dan mengantisipasi kemungkinan risiko dalam aktivitas dan transaksi keuangan. Pengendalian terhadap seluruh aktivitas tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan, prosedur, dan aturan yang berlaku sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga segala kesalahan dan kecurangan dapat dihindari, dan hal ini dapat berdampak pada akuntabilitas kinerja yang tinggi. Hasil penelitian Nur Cholis, dkk (2019) menyatakan bahwa Pengendalian Internal Pemerintah memberikan dampak yang menguntungkan bagi kinerja di OPD. Namun, hasil yang berbeda terlihat dalam studi Ajhar dan teman-teman (2019) yang menunjukkan bahwa Pengendalian Internal tidak memberikan dampak terhadap tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah.

Dalam variable moderating (moderasi) terlihat pada temuan empiris oleh Frensy Loppies, dkk (2023), bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan variabel Predictor Moderator (Prediktor Moderasi) yang artinya variabel sistem pengendalian intern hanya berperan sebagai variabel Prediktor Moderasi karena tidak memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Penelitian Ria Herlina, dkk (2021) menunjukkan, bahwa pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak

dapat dibuktikan jika dimoderasi oleh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah, pengaruh sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih kuat jika dimoderasi oleh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah.

Uraian mengenai latar belakang masalah ini menjadi suatu fenomena yang menarik perhatian peneliti untuk melakukan studi terkait stagnasi hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, khususnya di Pemerintah Kota Binjai. Ketidakkonsistenan dalam penelitian sebelumnya juga mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian yang berjudul **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Studi Di Pemerintah Kota Binjai.**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi permasalahan merupakan pemahaman mendalam tentang berbagai elemen yang berhubungan dengan isu atau topik yang akan dianalisis. (Sugiyono, 2010b). Mengacu pada Latar Belakang Masalah tersebut, Peneliti menguraikan masalah yang ingin dieksplorasi dalam penelitian ini adalah:

1. Tingkat capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Binjai belum mencapai baik, yaitu nilai CC (Capaian Cukup), dimana belum seluruh indikator kinerja Pemerintah Kota Binjai memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) serta belum cukup untuk mengakomodir tujuan dan sasaran strategis yang berorientasi hasil (outcome)

2. Sasaran strategis perencanaan kinerja serta sasaran anggaran pada seluruh unit kerja belum berorientasi hasil sesuai level, dan belum dapat memastikan indikator tersebut relevan guna mengukur anggaran terhadap kinerja yang ditetapkan
3. Target anggaran dan pendapatan Pemerintah Kota Binjai belum diperhitungkan secara realistis dan belum mempertimbangkan pencapaian tahun sebelumnya
4. Realisasi belanja daerah Pemerintah Kota Binjai masih rendah, demikian juga realisasi pendapatan asli daerah Pemerintah Kota Binjai jauh dari target anggaran yang ditetapkan dan program-program banyak yang belum dapat terlaksana
5. Pemanfaatan teknologi informasi serta penggunaan aplikasi dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data belum optimal dan belum terintegrasi karena masing-masing organisasi perangkat daerah masih mempertahankan masing-masing aplikasi yang berbeda
6. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidak patuhan terhadap ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara.

1.3 Rumusan Masalah

Mengacu pada penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota Binjai?

2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota Binjai?
3. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota Binjai?
4. Apakah sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota Binjai?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Binjai
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Binjai
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dalam memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Binjai
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dalam memoderasi pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Binjai

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi peneliti serta memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu, terutama dalam bidang Akuntansi Sektor Publik yang berhubungan dengan tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, penggunaan teknologi informasi, serta sistem pengendalian intern pemerintah. Di samping itu, studi ini juga berguna sebagai sumber rujukan bagi peneliti lainnya yang memiliki niatan untuk melakukan penelitian serupa.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan ide kepada Pemerintah Daerah di Kota Binjai mengenai aspek-aspek yang berhubungan dengan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, penetapan tujuan anggaran yang jelas, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan isu-isu tersebut, sehingga diharapkan dapat menghasilkan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah yang berkualitas demi tercapainya tata kelola yang baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori mencakup penjelasan mengenai variabel-variabel yang diteliti melalui definisi dan penjelasan yang menyeluruh dari berbagai sumber, sehingga memahami kedudukan dan ramalan mengenai interaksi antar variabel yang akan dianalisis menjadi lebih jelas dan terfokus. Penjabaran teori dalam penelitian ini terdiri dari teori besar tentang keagenan, serta empat kategori teori yaitu akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah, kejelasan sasaran anggaran, penggunaan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah.

2.1.1 Teori Keagenan (Agency theory)

Teori keagenan timbul ketika satu atau lebih individu (principal) merekrut orang lain (agent) untuk melaksanakan tugas dan menyerahkan kekuasaan untuk menentukan keputusan kepada agent tersebut. Teori keagenan (agency theory) menjelaskan cara untuk mengatur hubungan yang baik antara pemilik usaha (principal) dan pelaksana (agent) (Eisenhardt, 1985). Dalam karyanya Jensen dan Meckling yang disebut dengan principal adalah pemegang saham dan yang dimaksud agent adalah manager yang mengelola perusahaan. Dengan adanya agen yang ditunjuk oleh principal guna mengelola perusahaan itu maka terjadilah pemisahan fungsi antara pengambilan keputusan (fungsi pengelolaan) dengan penanggung risiko (fungsi kepemilikan), hal ini akan memicu munculnya konflik kepentingan, konflik kepentingan inilah yang menjadi pokok masalah dalam teori keagenan sehingga memicu munculnya masalah keagenan (agency problem).

Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar Agency theory. Bergman dan Lane (1990) berpendapat bahwa teori keagenan dapat digunakan dalam lembaga publik. Mereka mengemukakan bahwa negara-negara demokrasi masa kini dibangun di atas sekumpulan interaksi antara prinsipal dan agen. Hal yang sama dikemukakan oleh Moe (1984) yang menjelaskan konsep ekonomika organisasi sektor publik dengan menggunakan teori keagenan. Bergman dan Lane (1990) menyatakan bahwa kerangka hubungan prinsipal agen merupakan suatu pendekatan yang sangat penting untuk menganalisis komitmen kebijakan publik.

Dalam kerangka organisasi yang beroperasi di sektor publik, Mardiasmo (2002) mengungkapkan bahwa akuntabilitas diartikan sebagai tanggung jawab dari pemegang mandat (pemerintah) untuk menyampaikan laporan, memberikan pertanggungjawaban, serta mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang berada dalam tanggung jawab mereka kepada pihak yang memberikan mandat (masyarakat) yang memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban tersebut. Pandangan Mardiasmo mengenai akuntabilitas dalam konteks publik mengandung pemahaman bahwa dalam pengelolaan pemerintah daerah terdapat suatu hubungan keagenan antara masyarakat sebagai pihak utama dan pemerintah daerah sebagai pihak yang bertindak.

2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Kata Akuntabilitas berasal dari bahasa asing yakni “accountability” yang berarti pertanggungjawaban. Itulah sebabnya, Akuntabilitas disini memiliki makna keadaan untuk dipertanggungjawabkan ataupun keadaan untuk diminta pertanggungjawaban.

Dalam bahasa Inggris, responsibility berarti tanggung jawab. Akan tetapi konsep pertanggungjawaban ini disebut sebagai akuntabilitas bukan responsibility. Hal tersebut karena akuntabilitas artinya adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Sementara responsibility atau responsibilitas adalah kewajiban untuk bertanggung jawab.

2.1.2.1 Pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam pengertian yang lebih terbatas, akuntabilitas dapat dijelaskan sebagai suatu bentuk tanggung jawab yang merujuk pada pihak mana organisasi (atau individu pekerja) bertanggung jawab dan untuk hal apa organisasi (atau individu pekerja) bertanggung jawab. Dalam arti yang lebih luas, akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai kewajiban bagi pihak yang memegang amanah (agen) untuk memberikan laporan, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan semua aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak yang memberikan amanah (pihak utama) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut Mardiasmo (2014), akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, melalui laporan yang disampaikan secara berkala. Menurut Sjahruddin Rasul (2000), akuntabilitas diartikan secara terbatas sebagai kemampuan untuk memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan “seseorang” atau “sekelompok orang” terhadap masyarakat secara luas atau dalam suatu organisasi. Dalam konteks institusi pemerintah, “seseorang” tersebut adalah

pimpinan instansi pemerintah sebagai penerima amanat yang harus memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan amanat tersebut kepada masyarakat atau publik sebagai pemberi amanat.

Menurut Turner dan Hulme (2002), berpendapat Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban bagi lembaga-lembaga di sektor publik untuk memberikan penekanan lebih pada pertanggungjawaban yang bersifat horizontal, yaitu kepada masyarakat, dan bukan hanya kepada otoritas yang lebih tinggi, yang merupakan pertanggungjawaban vertikal. Sementara itu, menurut United Nations Development Programme (UNDP) akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan atau kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi seorang pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi untuk masa yang akan datang.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, akuntabilitas kinerja merupakan bentuk tanggung jawab dari suatu lembaga pemerintahan untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan tugas organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan melalui laporan yang dilakukan secara berkala.

Secara ringkas disimpulkan bahwa pengertian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah keharusan lembaga pemerintah secara periodik dan aktif mempertanggungjawabkan capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, terhadap pemberi amanat yaitu masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi,

Dalam peran kepemimpinan, akuntabilitas dari kinerja bisa diartikan sebagai pemahaman dan tanggung jawab atas setiap tindakan, produk, keputusan, serta kebijakan. Ini juga meliputi administrasi publik dalam pemerintahan dan pelaksanaan tugas dalam posisi atau peran kerja. Hal ini melibatkan kewajiban untuk memberikan laporan, memberikan penjelasan, dan dapat dipertanyakan tentang setiap akibat yang telah dihasilkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah seharusnya mengacu pada berbagai aspek dengan standar kinerja yang berlandaskan pada harapan masyarakat, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengevaluasi kinerja, responsifitas, dan etika dari para pihak yang menjalankan amanah publik. Konsep akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam pengertian yang lebih luas ini mengingatkan kita bahwa para pejabat pemerintah memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada otoritas yang lebih tinggi dalam struktur komando institusional, tetapi juga kepada masyarakat umum, organisasi non-pemerintah, media, serta berbagai pihak berkepentingan lainnya. Jadi, penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, di samping berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah merupakan salah satu elemen utama yang harus dipenuhi untuk mencapai good governance yang saat ini tengah diupayakan di Indonesia. Melalui laporan Akuntabilitas kinerja dari instansi pemerintah, masyarakat dapat mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah mencapai sasaran yang diinginkan, serta apakah kepercayaan yang diberikan

untuk mengelola sumber daya yang ada telah digunakan dengan tepat. Dengan kata lain, masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah beroperasi dengan cara yang ekonomis, efisien, dan efektif. Pengelolaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab memiliki hubungan yang erat dengan anggaran pemerintah daerah (Wardhana dkk. , 2015). Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah adalah salah satu isu kebijakan yang penting di Indonesia saat ini, karena peningkatan akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah berpengaruh terhadap usaha menciptakan tata kelola yang baik (Khairunsyah dan Efni, 2018).

Untuk mencapai tanggung jawab terhadap kinerja lembaga pemerintah, pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disebut SAKIP. SAKIP adalah serangkaian proses yang teratur, terdiri dari: Rencana Strategis, Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tinjauan dan Penilaian Kinerja. Hasil dari SAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dikenal dengan LAKIP, yang menggambarkan performa lembaga pemerintah dalam melaksanakan program dan aktivitas yang didanai oleh APBN atau APBD..

2.1.2.2 Tujuan dan Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tahun 1999 dalam Instruksi Presiden No. 7 dinyatakan terkait tujuan Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan utama instansi pemerintah yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan

misi instansi pemerintah. Dikatakan juga dalam Inpres tersebut bahwa tujuan dari Sistem AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah:

- 1) Mewujudkan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab agar dapat berfungsi dengan efisien, efektif, dan responsif terhadap harapan masyarakat serta lingkungannya.
- 2) Tercapainya keterbukaan informasi pada lembaga pemerintah
- 3) Terealisasinya keterlibatan masyarakat dalam menjalankan pembangunan nasional.
- 4) Pemeliharaan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Akuntabilitas kinerja adalah suatu konsep dalam sektor pemerintahan yang berfungsi untuk mempertanggungjawabkan perilaku seorang individu atau organisasi yang telah diberikan tugas.

Makna dari akuntabilitas adalah inti dari pemikiran dalam pengelolaan sektor publik. Di dalam konteks lembaga pemerintahan, sering kali muncul istilah akuntabilitas publik yang merujuk pada penyampaian informasi mengenai kegiatan dan kinerja keuangan pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut. Baik pemerintah pusat maupun daerah harus mampu menjadi pihak yang memberikan informasi untuk memenuhi hak-hak publik.

Akuntabilitas publik menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN) ada tiga, yaitu:

1. Akuntabilitas keuangan

Merupakan pertanggungjawaban tentang hal yang berhubungan dengan integritas keuangan, taat pada aturan, dan sebagainya.

2. Akuntabilitas manfaat

Memberikan manfaat hasil dari kegiatan – kegiatan pemerintah.

3. Akuntabilitas prosedural

Pertanggungjawaban mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan apakah telah mempertimbangkan moralitas, hukum, etika, dan sebagainya.

Zawawi (2016) juga menguraikan bahwa kemajuan dalam akuntabilitas publik di Indonesia dapat dilihat pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah. Akuntabilitas kinerja lembaga pemerintah adalah pelaksanaan tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah, bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuannya.

Agar pertanggungjawaban kinerja lembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, antara lain: (LAN, 2003:5)

- 1) Beralih dari sistem yang dapat memastikan penggunaan sumber daya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Adanya komitmen dari para pemimpin dan seluruh anggota staf lembaga terkait.
- 3) Menunjukkan seberapa besar pencapaian dari target dan tujuan yang telah ditetapkan.
- 4) Fokus pada pencapaian visi dan misi, serta hasil dan manfaat yang dirasakan.

- 5) Harus jujur, objektif, transparan, dan tepat. Memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan..

2.1.2.3 Faktor - Faktor Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Herawaty (2014), terdapat lima elemen yang memengaruhi tanggung jawab kinerja lembaga pemerintah, yaitu:

- 1) Kejelasan sasaran anggaran, keselarasan antara pandangan manajemen atas dengan pandangan manajemen bawah.
- 2) Pengendalian akuntansi, semua prosedur dan sistem resmi yang menggunakan informasi untuk menjaga dan merubah pola kegiatan organisasi.
- 3) Sistem pelaporan, adanya sistem pelaporan yang baik sangat penting untuk memantau dan mengatur kinerja dalam melaksanakan anggaran yang telah ditentukan.
- 4) Pengendalian internal, penyusunan dan pelaksanaan struktur pengendalian internal adalah tanggung jawab dari manajemen.
- 5) Motivasi, dorongan yang membuat seseorang bertindak untuk mencapai tujuan.

Dalam penelitian Lestari dan Aliamin (2023), menyebutkan bahwa ada tiga faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja pemerintah, yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran tersebut ditetapkan secara jelas serta spesifik dan dapat dimengerti sehingga hal ini sangat

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung (Snanto et al., 2019).

Dalam penelitian Haryanto dan Tri Andayan (2023), menyebutkan bahwa ada tiga elemen yang memengaruhi tanggung jawab kinerja pemerintah, yaitu

1. Sistem Pengendalian Intern adalah sekumpulan tindakan dan aktivitas yang terintegrasi secara terus-menerus, dilaksanakan oleh manajemen dan seluruh pegawai, untuk menjamin pencapaian misi organisasi melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, perlindungan aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
2. Sistem Pelaporan, merupakan rangkaian bentuk pertanggungjawaban guna menyajikan informasi atas pelaksanaan program/kegiatan beserta anggarannya kepada pihak internal maupun eksternal yang disajikan secara jujur
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi, berhubungan dengan sifat dan tindakan seseorang pada saat menggunakan teknologi informasi untuk penyelesaian pekerjaan dan meningkatkan kinerja.

2.1.2.4 Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Untuk memastikan bahwa akuntabilitas kinerja berjalan dengan baik, diperlukan tiga indikator:

1. Ekonomis dan Efisiensi
 - a. Sumber daya organisasi telah diperoleh, dijaga, dan digunakan dengan cara yang hemat dan efektif

- b. Mematuhi peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penghematan dan efisiensi

2. Efektivitas

- a. Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan
- b. Kesesuaian antara program atau kegiatan dengan tujuan dan niat dari instansi Pemerintah

3. Outcome

Dampak dari semua program atau kegiatan yang telah dirasakan oleh masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kinerja adalah hasil atau output dari aktivitas atau program yang ingin atau sudah dicapai terkait penggunaan anggaran dengan ukuran yang jelas dalam hal jumlah dan mutu. Salah satu jenis laporan kinerja yang digunakan di sektor publik di Indonesia adalah LAKIP. LAKIP berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban bagi lembaga pemerintah.

2.1.2.5 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

SAKIP akan menghasilkan sebuah laporan yang dinamakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah jika sudah aktif selama satu siklus anggaran. LAKIP akan dinilai oleh Kementerian PANRB, untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan efektif, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021, Evaluasi AKIP dilaksanakan oleh Tim Penilai Nasional yang dibentuk oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) kepada seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten yang telah menyampaikan laporan kinerjanya kepada Menteri PANRB melalui aplikasi elektronik SAKIP Reviu (esr.menpan.go.id).

Evaluasi AKIP Internal dilaksanakan oleh Tim Evaluator Internal yang dibentuk di masing-masing Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah kepada unit kerja atau satuan kerja yang ada dibawah Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah tersebut.

Kemudian, evaluasi AKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap implementasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja baik perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan anggaran yang berfokus pada hasil, penilaian kinerja, serta pengawasan pengelolaan data tentang kinerja, hingga pelaporan mengenai hasil kinerja, serta penilaian terhadap pencapaian kinerja. Adapun metodologi yang dapat digunakan untuk melakukan evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) karena akan disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.

Pengaturan terhadap pelaksanaan evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12

Tahun 2015 diganti, agar dapat mengakomodir kompleksitas pengukuran kinerja instansi pemerintah dan pesatnya kemajuan teknologi, oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian dalam penilaian terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja di lembaga pemerintah. Penyesuaian ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 mengenai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah.

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Lembaga Pemerintah adalah proses yang terstruktur untuk menganalisa, memberikan penilaian, menentukan atribut, menghargai, serta mengidentifikasi masalah, selain itu juga memberikan solusi untuk masalah yang ditemui agar akuntabilitas dan kinerja lembaga pemerintah dapat ditingkatkan.

Tujuan pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagaimana Pasal 2 adalah bertujuan untuk:

1. mendapatkan informasi seputar penerapan SAKIP;
2. mengukur seberapa baik SAKIP diterapkan;
3. mengukur tingkat akuntabilitas dalam kinerja;
4. memberikan rekomendasi perbaikan untuk pengembangan AKIP; dan
5. memonitor tindakan lanjutan terhadap saran hasil evaluasi sebelumnya.

Dalam melaksanakan evaluasi AKIP sebagaimana Pasal 4 ayat (2), Kementerian dapat dibantu oleh instansi lain yang penunjukannya ditetapkan oleh Menteri, dan dalam melaksanakan evaluasi AKIP tersebut, Kementerian dapat menggunakan instrumen evaluasi berbasis sistem elektronik sebagaimana Pasal 4 ayat (3).

2.1.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Di tingkat pemerintah daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja yang disusun oleh pemerintah daerah. Rencana ini berfungsi sebagai desain teknis untuk melaksanakan strategi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila mutu anggaran pemerintah daerah rendah, maka mutu fungsi-fungsi pemerintah daerah biasanya akan lemah. Anggaran pemerintah daerah mesti tidak hanya memuat informasi tentang pendapatan dan penggunaan dana (belanja), tetapi juga harus menyajikan informasi mengenai kondisi kinerja yang ingin dicapai.

Anggaran merupakan suatu proses yang dilaksanakan oleh sektor publik untuk mendistribusikan sumber daya yang tersedia sesuai dengan kebutuhan yang tidak terbatas. (Setyawan, 2017). Anggaran merupakan rencana kegiatan yang diimplementasikan oleh manajemen dalam suatu periode yang diukur secara kuantitatif (Catur dan Rumondang, 2010). Kenis (1979) berpendapat bahwa terdapat tiga dimensi penting dalam karakteristik sistem anggaran, yaitu keterlibatan dalam penyusunan anggaran, kejelasan sasaran anggaran, serta umpan balik mengenai anggaran.

Sesuai dengan Yulianto (2019) yang dikutip oleh Estrilia dkk (2023), kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa jelas dan spesifik tujuan anggaran itu ditentukan agar orang yang bertugas mencapai tujuan tersebut dapat memahaminya. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap cara perangkat merencanakan anggaran sesuai dengan hasil yang ingin dicapai oleh lembaga pemerintah. Sasaran anggaran yang tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan

dan ketidakpuasan para pelaksana anggaran dalam melaksanakan pekerjaannya. Sehingga hal ini tidak memotivasi pelaksana anggaran untuk mencapai hasil yang “diharapkan”.

Kejelasan Sasaran Anggaran adalah keterbukaan target dari rencana yang menunjukkan bagaimana organisasi memperoleh dan menggunakan dana selama periode tertentu.

Menurut Kenis (1979), memiliki tujuan anggaran yang jelas akan membantu seseorang dalam menetapkan target-target anggaran. Selanjutnya, target-target yang dibuat akan sejalan dengan tujuan organisasi. Di tingkat pemerintah daerah, kejelasan mengenai tujuan anggaran akan berdampak pada pegawai untuk menyusun anggaran yang sesuai dengan apa yang ingin dicapai oleh instansi pemerintah. Pegawai akan mendapatkan informasi yang cukup untuk membuat prediksi yang akurat di masa depan.

Anggaran bisa diartikan sebagai sebuah pernyataan tentang perkiraan kinerja yang ingin dicapai selama jangka waktu tertentu dalam aspek keuangan. Penyusunan anggaran di organisasi sektor publik, terutama di pemerintahan, adalah sebuah proses yang cukup rumit dan dipengaruhi oleh kepentingan politik. Anggaran pemerintah daerah yang ada dalam APBD adalah rencana kerja keuangan tahunan pemerintah daerah yang dirancang dengan jelas dan rinci, serta merupakan rencana teknis pelaksanaan untuk mencapai tujuan daerah (Setyawan, 2017).

Kejelasan sasaran anggaran yang spesifik akan membantu dalam mempertanggungjawabkan apakah tugas organisasi berhasil atau gagal, sehingga

dapat mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik demi mencapai tujuan dan target yang telah ditentukan sebelumnya (Paramitha & Gayatri, 2016). Dengan adanya tujuan anggaran yang jelas, akan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan apakah tugas organisasi berhasil atau tidak dalam upaya mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya (Hafiz, 2017).

2.1.3.1 Fungsi Anggaran

Mardiasmo (2005:63) menjelaskan bahwa peran dasar dari anggaran sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Anggaran sebagai sarana perencanaan. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk merencanakan dalam manajemen guna mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik disusun untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah, seberapa banyak dana yang diperlukan, dan apa hasil yang didapat dari pengeluaran pemerintah tersebut.
2. Anggaran sebagai sarana pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana rinci mengenai pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar semua pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Tanpa adanya anggaran, pemerintah tidak bisa mengatur pengeluaran yang berlebihan. Anggaran sektor publik juga berperan untuk mengatur (membatasi kekuasaan) eksekutif.
3. Anggaran berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan menstabilkan serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui

anggaran dari sektor publik, kita dapat memahami arah kebijakan fiskal dari pemerintah, sehingga memungkinkan untuk membuat prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat dimanfaatkan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan aktivitas ekonomi masyarakat guna mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran berfungsi sebagai sarana politik yang dipakai untuk menetapkan prioritas dan kebutuhan keuangan terkait dengan prioritas tersebut. Dalam konteks sektor publik, anggaran berfungsi sebagai dokumen politik yang mencerminkan komitmen eksekutif serta kesepakatan legislatif terkait pemanfaatan publik untuk kepentingan tertentu.
5. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi dan koordinasi. Setiap unit pemerintahan berpartisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik digunakan sebagai sarana koordinasi antarsubjek dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mengidentifikasi adanya inkonsistensi dari suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai sarana komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dipahami dan disebarluaskan ke seluruh unit organisasi agar dapat diimplementasikan.
6. Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja mencerminkan komitmen dari pemegang anggaran (eksekutif) kepada pihak yang memberikan otoritas (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target

anggaran serta efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Anggaran merupakan instrumen yang efektif untuk kontrol dan evaluasi kinerja.

7. Anggaran sebagai sarana motivasi. Anggaran dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendorong manajer dan timnya agar beroperasi secara ekonomis, efisien, dan efektif dalam meraih sasaran serta tujuan organisasi yang telah ditentukan. Sasaran anggaran sebaiknya tidak ditetapkan terlalu tinggi hingga sulit dicapai, tetapi juga tidak boleh terlalu rendah sehingga menjadi terlalu mudah untuk diraih.
8. Anggaran sebagai instrumen untuk membangun ruang publik Anggaran publik seharusnya tidak diabaikan oleh kabinet, aparatur birokrasi, dan DPR/DPRD. Kelompok masyarakat yang terorganisir akan berusaha memengaruhi anggaran pemerintah demi kepentingan mereka.

Kelompok lain dalam masyarakat yang kurang terorganisir akan menyalurkan harapan mereka lewat sistem politik yang ada. Kelompok lain yang merasa tidak berdaya akan dengan mudah mengikuti apa yang pemerintah lakukan tanpa melawan. Jika mereka tidak memiliki cara untuk menyuarakan pendapat mereka, maka mereka mungkin akan mengambil langkah lain seperti melakukan aksi massa atau melakukan boikot. Kenis (dalam Suhartono dan Solichin, 2006) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran adalah sejauh mana tujuan anggaran ditentukan dengan jelas dan spesifik sehingga bisa dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas pencapaian tujuan anggaran itu. Oleh karena itu, tujuan anggaran di daerah perlu dijelaskan dengan jelas, spesifik, dan

dimengerti oleh orang-orang yang bertanggung jawab untuk merencanakan dan melaksanakannya.

2.1.3.2 Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut Kenis (1979), pentingnya kejelasan sasaran anggaran adalah seberapa jelas dan spesifik tujuan anggaran ditentukan, sehingga orang yang bertanggung jawab dapat memahami dan menjalankannya. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah harus dijelaskan dengan jelas, detail, dan mudah dimengerti oleh pihak yang bertugas melaksanakannya.

Locke (1968) yang dikutip oleh Kenis (1979) menyatakan bahwa menetapkan tujuan yang spesifik akan lebih efektif. Ini akan mendorong para pegawai untuk memberikan yang terbaik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yang pada gilirannya berdampak positif pada peningkatan kinerja. Ketika tujuan anggaran tidak jelas, pelaksanaan anggaran bisa menjadi kacau, dan pekerja bisa merasa tidak puas. Hal ini dapat mengurangi motivasi pelaksana anggaran untuk mencapai kinerja yang diinginkan. Kenis (1979) menemukan bahwa pelaksana anggaran memberikan hasil yang baik dan dianggap sangat berpengaruh dalam meningkatkan kejelasan sasaran anggaran. Selain itu, Kenis juga menegaskan bahwa anggaran bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian biaya serta pendapatan dalam sebuah organisasi, tetapi juga sebagai sarana bagi SKPD untuk mengkoordinasi, berkomunikasi, mengevaluasi hasil kerja dan memotivasi para anggotanya.

Menurut Stteers dan Porter (1976) dalam Samuel (2008) bahwa dalam menentukan sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu:

- a. Sasaran harus spesifik bukannya samar-samar.
- b. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai.

Kejelasan sasaran anggaran menurut Indudewi (2009) dalam Atikah Hasanah (2021) harus disesuaikan dengan empat indikator sebagai berikut :

1. Spesifik

Tujuan yang ingin dicapai harus dituliskan dengan jelas dan terperinci, sehingga tidak ada berbagai penafsiran yang muncul. Tujuan ini perlu membantu unit kerja dalam merancang strategi atau tindakan terbaiknya.

2. Terukur

Tujuan harus dinyatakan dengan satuan ukuran tertentu yang memudahkan untuk mengevaluasi tingkat pencapaiannya. Ini termasuk: perencanaan jangka menengah, rencana tahunan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian.

3. Menantang tapi Realistis

Tujuan harus cukup menantang untuk dicapai, tetapi tetap harus realistis dan mungkin untuk dicapai. Ini mencakup: luas area pemasaran yang ingin dijangkau, pangsa pasar yang ingin dimiliki.

4. Berorientasi pada hasil akhir

Tujuan harus diarahkan pada hasil atau dampak akhir yang diinginkan, bukan pada proses atau cara untuk mencapainya. Ini termasuk: target program yang telah ditentukan dan evaluasi terhadap kesulitan dalam mencapai tujuan tersebut.

Memiliki tenggat waktu, tujuan seharusnya dengan tegas menetapkan kapan hasil atau dampak yang diinginkan akan tercapai. Ini mencakup: program kegiatan yang sesuai dengan tujuan dan target anggaran yang direncanakan serta program tersebut harus dilengkapi dengan target sasaran output dan outcome.

Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh mana orang yang bertanggung jawab dapat memahami tujuan anggaran tersebut untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan (Suhartono dan Solihin, 2011). Anggaran yang tidak efektif dan tidak berfokus pada hasil akan merusak perencanaan yang telah dibuat (Bastian, 2001), sehingga pentingnya kejelasan sasaran anggaran menjadi sangat relevan dan signifikan di dalam pemerintah.

Kejelasan sasaran anggaran diharapkan dapat mempermudah manajer dalam mencapai program yang sudah ditentukan dan tujuan dari perusahaan atau instansi pemerintah seperti yang disebutkan dalam rencana anggaran yang juga berpengaruh pada peningkatan kinerja.

Kejelasan tujuan akan mendukung karyawan untuk meraih kinerja yang diinginkan, karena dengan mengetahui tujuan anggaran, tingkat kinerja dapat tercapai. Keterlibatan individu akan memahami tujuan yang ingin dicapai oleh anggaran tersebut, serta cara untuk mencapainya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan yang ingin dicapai.

2.1.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.1.4.1 Pengertian Teknologi Informasi

Berdasarkan O'Brien (2006:28), teknologi adalah suatu sistem komputer yang terdiri dari berbagai bagian yang berfungsi untuk memproses informasi, yang memanfaatkan berbagai tipe perangkat keras, perangkat lunak, manajemen data, dan teknologi jaringan informasi. Kemajuan Teknologi Informasi tidak hanya berdampak pada dunia usaha, tetapi juga pada sektor-sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, pemerintahan, dan sebagainya. Perkembangan teknologi informasi juga memiliki dampak yang besar pada kemajuan akuntansi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, pengaruhnya terhadap bidang akuntansi semakin meningkat.

Menurut (Kadir, 2014) Teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, termasuk dalam menyimpan, menganalisis dan menyebarkan informasi, teknologi informasi adalah studi atau penggunaan peralatan elektronik, termasuk kata-kata, angka dan gambar. Teknologi mencakup perangkat keras dan perangkat lunak untuk melakukan lebih banyak tugas dalam pembuatan data, seperti menangkap, menetralkan, menyimpan, mengambil, memanipulasi serta menampilkan data. Selain itu, teknologi informasi tidak hanya mencakup teknologi komputer (perangkat keras dan lunak) yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi yang digunakan untuk mengirimkan informasi.

Berdasarkan dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi merupakan suatu organisasi yang bermanfaat dalam meringankan

kewajiban sumber daya manusia. Teknologi informasi digunakan untuk meringankan sistem dalam penyimpanan dan pengelolaan data. Selain itu teknologi informasi juga menyajikan data informasi dalam pengambilan suatu keputusan serta memudahkan dan mempercepat dalam menyajikan laporan keuangan yang berkaitan dalam pemerintahan desa.

2.1.4.2 Jenis-jenis Teknologi Informasi

Teknologi informasi terdiri dari dua macam yaitu: perangkat keras dan lunak. Perangkat keras menyangkut pada peralatan-peralatan yang bersifat fisik, seperti memori, printer, keyboard. Menurut (Kadir, 2014) teknologi informasi terbagi menjadi empat kelompok, yaitu:

1. Teknologi masukan

Teknologi masukan adalah perangkat yang digunakan untuk menangkap data/informasi dari sumber aslinya

2. Teknologi keluaran

Teknologi keluaran memainkan peran besar dalam informasi yang disajikan di monitor

3. Teknologi perangkat lunak

Teknologi perangkat lunak software dan program yang dibutuhkan untuk membuat informasi. Program adalah seperangkat instruksi untuk mengendalikan perangkat keras komputer

4. Teknologi penyimpanan

Penyimpanan peralatan yang digunakan untuk menyimpan data

5. Teknologi telekomunikasi

Teknologi telekomunikasi merupakan teknologi yang memungkinkan terjadinya komunikasi jarak jauh

6. Mesin pemroses

Teknologi yang berfungsi mengenali informasi data/program merupakan bagian penting dalam mengeksekusi program (seperti komponen CPU)

2.1.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi adalah gabungan dari berbagai unsur teknologi seperti komputer, perangkat keras dan perangkat lunak, basis data, jaringan, serta tipe teknologi lainnya. (Sugiarti & Yudianto, 2017). Pemanfaatan teknologi informasi penting untuk memudahkan pekerjaan dalam mengolah data menjadi informasi sebagai kebutuhan antara pemangku kepentingan dalam mengatasi tindakan atau memutuskan untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat (Aulia, 2018). Pemanfaatan teknologi informasi untuk mengelola data sebagai informasi mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengolahan data karena data diolah melalui teknologi informasi akan lebih tepat (Arum Cahyati, 2021).

Pemakaian teknologi informasi adalah sikap atau tindakan akuntan yang menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan pekerjaannya dan memperbaiki kinerjanya. Menurut Wijana (2007), pemakaian teknologi informasi adalah keuntungan yang diinginkan oleh para pengguna sistem informasi saat melaksanakan tugasnya atau cara mereka menggunakan teknologi saat bekerja. Pengukurannya didasarkan pada seberapa sering dan intensif teknologi tersebut digunakan, serta jumlah aplikasi atau perangkat lunak yang diandalkan.

Pemanfaatan teknologi informasi yang tepat dan didukung oleh keahlian personil yang mengoperasikannya dapat meningkatkan kinerja perusahaan maupun kinerja individu yang bersangkutan.

Menurut (Komarasari, 2016) guna meningkatkan kinerja organisasi/instansi pemerintah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan percepatan implementasi e-government sangat penting dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan hubungan pemerintah dan pihak lainnya. Pemanfaatan informasi memberikan bentuk hubungan baru. E-government dan komputer memiliki kedudukan dalam kegiatan yang sangat penting dan bermanfaat untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan pemerintah. E-government mempunyai manfaat bagi masyarakat yang dapat dinikmati sebagai berikut:

1. Pelayanan masyarakat yang baik dari segi fasilitas
2. Pemerintah dan masyarakat menciptakan interaksi antara pelaku bisnis
3. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah didapat
4. Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien

Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi adalah suatu kegiatan yang menggunakan teknologi sebagai alat untuk membantu dan memudahkan setiap proses kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan informasi yang terbaik kepada masyarakat.

2.1.4.4 Indikator Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (Sapartiningsih, dkk, 2018:106) indikator pemanfaatan teknologi informasi adalah sebagai berikut:

1. Penggunaan software aplikasi
2. Proses akuntansi secara komputerisasi
3. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi
4. Pegawai mampu mengoperasikan komputer dengan baik, dimana pegawai dapat memanfaatkan keunggulan komputer dalam menginput data cepat

Teknologi informasi yang menggunakan komputer sangat berhubungan dengan tanggung jawab kinerja dari lembaga pemerintahan. Hal ini disebabkan karena untuk menyampaikan informasi yang diperlukan, dibutuhkan perangkat yang dapat mengolah data dengan akurat dan tepat. Pada zaman sekarang yang sudah memasuki era global, teknologi telah berkembang pesat setiap tahunnya. Oleh karena itu, sangat penting untuk memanfaatkan teknologi informasi yang membantu kinerja pegawai pemerintah dalam mencapai akuntabilitas keuangan. Penggunaan teknologi informasi yang sesuai dan didukung oleh keterampilan dari para penggunanya dapat meningkatkan kinerja lembaga pemerintah.

2.1.5 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara, muncul kebutuhan untuk memiliki sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini dapat dicapai apabila semua pihak penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pelaksana, dapat melaksanakan tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan

pertanggungjawaban dengan teratur, terkontrol, efisien, dan efektif. Dalam peraturan pemerintah ini, sistem pengendalian internal didasarkan pada pemikiran bahwa pengendalian internal melekat selama kegiatan berlangsung, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, dan memberikan keyakinan yang cukup, meski tidak bersifat absolut (Sari, 2015). Oleh karena itu, diperlukan sistem yang mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan kegiatan pada Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuan dengan efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara dapat diandalkan, mengamankan aset negara, dan mendorong kepatuhan terhadap norma perundang-undangan. Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 mengenai Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut tentang sistem pengendalian internal pemerintah secara menyeluruh dalam Peraturan Pemerintah. Sistem pengendalian internal menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 60 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008) didefinisikan sebagai proses yang terintegrasi dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi melalui aktivitas yang efisien dan efektif, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Mulyadi (2017:129), pengendalian intern mencakup struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang disusun untuk melindungi aset organisasi, memeriksa kebenaran dan keandalan data akuntansi, meningkatkan efisiensi, serta mendukung kepatuhan terhadap kebijakan manajemen. Definisi

sistem pengendalian internal menurut Jason Scott (2014:226) adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan pengendalian tercapai dengan baik. Sistem pengendalian internal menurut IAPI (2011:319.2) adalah suatu proses yang dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan pihak lain yang dirancang untuk memberikan kepastian yang cukup tentang pencapaian dalam keandalan laporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasional, serta kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengutip Politeknik Keuangan Negeri STAN bahwa sistem pengendalian internal adalah suatu proses yang dibuat untuk memberikan jaminan keamanan bagi unsur-unsur yang ada di dalam perusahaan dengan memperhatikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Darmawan, (2016) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal terdiri dari aturan dan langkah-langkah yang dibuat untuk memastikan manajemen bahwa organisasi telah mencapai sasaran dan tujuannya. Aturan dan langkah-langkah ini sering disebut sebagai pengendalian dan secara keseluruhan membentuk pengendalian dari entitas tersebut. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah kumpulan bagian-bagian yang tidak terpisahkan yang dilaksanakan oleh semua pihak di dalam organisasi tersebut, sehingga tujuan bersama yang ditetapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Sistem pengendalian internal yang baik tidak perlu mengatur semua aktivitas dengan memperhatikan efisiensi, oleh karena itu organisasi harus menetapkan tujuan dengan jelas serta mengenali risiko, menganalisis risiko, dan mengelola risiko yang ada.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah adalah serangkaian prosedur yang terintegrasi yang dipengaruhi oleh pemimpin dan semua pegawai untuk menciptakan keyakinan yang cukup dalam mencapai tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien.

2.1.5.1 Komponen Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri atas unsur lingkungan pengendalian, penilai risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan dan pengendalian intern (Peraturan Pemerintah Nomor 60, 2008). Penjelasan dari komponen-komponen sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 60, 2008), adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan pengendalian.

Lingkungan pengendalian mendefinisikan pola organisasi, berdampak pada kesadaran kontrol individu. Lingkungan pengendalian berfungsi sebagai landasan untuk seluruh komponen pengawasan internal, memberikan disiplin dan kerangka kerja. Lingkungan pengendalian mencakup sebagai berikut :

- a. Integritas dan nilai etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Filosofi dan gaya operasi manajemen
- d. Struktur organisasi
- e. Pemberian wewenang dan tanggung jawab
- f. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

- g. Peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait

2. Penilaian risiko

Penilaian risiko merujuk pada identifikasi entitas serta analisis terhadap risiko yang relevan dalam mencapai tujuan, yang membentuk dasar dalam mengelola risiko (Jufrizen et al., 2019). Risiko yang berkaitan dengan laporan keuangan mencakup kejadian dan kondisi baik internal maupun eksternal yang mungkin terjadi dan secara negatif dapat mempengaruhi kemampuan entitas dalam mencatat, memproses, meringkas, dan melaporkan data keuangan sesuai dengan pernyataan manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian risiko mencakup sebagai berikut :

- a. Pengidentifikasian risiko
- b. Analisis risiko
- c. Pengelolaan risiko

3. Kegiatan pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah kebijakan serta prosedur yang menjamin bahwa arahan manajemen terlaksana. Tindakan ini memastikan pelaksanaan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi risiko dalam mencapai tujuan entitas. Secara umum, tindakan pengendalian yang relevan dengan audit dapat dibagi menjadi kebijakan dan prosedur yang terkait dengan hal-hal berikut:

- a. Review terhadap kinerja
- b. Pengolahan informasi

- c. Pengendalian fisik
 - d. Pemisahan tugas
 - e. Pencatatan dan dokumentasi
4. Informasi dan komunikasi

Informasi dan komunikasi adalah identifikasi, pengumpulan, dan pertukaran informasi dalam sebuah format serta waktu yang memungkinkan individu melaksanakan tanggung jawab mereka. Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan mencakup sistem akuntansi untuk menjaga akuntabilitas terkait aset, utang, dan ekuitas yang ada. Komunikasi juga mencakup penyampaian pemahaman mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing individu dalam konteks pengawasan internal terkait pelaporan keuangan. Pemahaman yang baik tentang sistem informasi yang relevan dengan pelaporan keuangan harus diperoleh untuk memahami:

- a. Kategori transaksi dalam operasi entitas yang signifikan bagi laporan keuangan
- b. Proses bagaimana transaksi tersebut dimulai
- c. Catatan akuntansi, informasi pendukung, dan akun tertentu dalam laporan keuangan yang terlibat dalam pengolahan serta pelaporan transaksi
- d. Proses akuntansi yang dimulai dari transaksi hingga dimasukkan dalam laporan keuangan, termasuk alat elektronik yang digunakan untuk mengirim, memproses, menyimpan, dan mengakses informasi.

5. Pemantauan pengendalian intern.

Pemantauan adalah proses untuk mengevaluasi kualitas kinerja pengawasan internal secara berkelanjutan. Pemantauan ini mencakup penentuan desain dan pelaksanaan kontrol dengan tepat waktu serta pengambilan langkah-langkah perbaikan. Aktivitas pemantauan melibatkan auditor internal atau personel yang dapat memberikan indikasi mengenai masalah atau area yang memerlukan perhatian.

Berdasarkan penjelasan di atas, komponen sistem pengawasan internal pemerintah dalam kerangka penelitian ini merujuk pada komponen-komponen yang telah dipaparkan di atas yakni: lingkungan pengendalian, penilaian risiko, tindakan pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta pemantauan.

2.2 Kajian Penelitian yang Relevan

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini.

No	Nama peneliti (Tahun)	Judul	Hasil penelitian
1	Indah Nur Anisa, dan Haryanto 2022	Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19	Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sedangkan pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Anisa & Haryanto, 2022)
2	Helin Gustri Mulya, dan Eka	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian	(1) Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

	Fauzihardani 2022	Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi	Pemerintah Kota Sungai Penuh. (2) Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. (3) Sistem Pelaporan tidak berpengaruh signifikan positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. (4) Kepatuhan Terhadap Regulasi tidak memperkuat pengaruh positif Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. (5) Kepatuhan Terhadap Regulasi tidak memperkuat pengaruh positif Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. (6) Kepatuhan Terhadap Regulasi mampu menjadi variabel moderasi dan memperkuat pengaruh positif Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Sungai Penuh. (Mulya & Fauzihardani, 2022)
3	Sri Wahyu Ningsih, Muhammad Yusuf , Tutut Dewi Andayiani 2022	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap	1. Kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga H1 diterima. 2. Ketaatan pada peraturan perundangan memiliki pengaruh yang

		Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga H2 diterima. 3. Pengendalian akuntansi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga H3 diterima. 4. Sistem pelaporan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga H4 diterima. 5. Kejelasan sasaran anggaran, ketaatan pada peraturan perundangan, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kota Pekalongan. Sehingga H5 diterima. (Ningsih et al., 2022)
4	Nyoman Agus Mahapradnya, dan I Putu Hendra Martadinata 2023	Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban, Partisipasi Anggaran, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Hotel Berbintang Di Kabupaten Buleleng	(1) Penerapan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh positif terhadap kinerja hotel. (2) Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja hotel. (3) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja hotel. (4) Penerapan akuntansi pertanggungjawaban, partisipasi anggaran, dan kejelasan sasaran anggaran secara simultan berpengaruh

			positif terhadap kinerja hotel. (Nyoman Agus Mahapradnya & I Putu Hendra Martadinata, 2023)
5	Fidela Nuzul Azmi, Rizal Yaya, Tumirin 2023	Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Daerah Istimewa Yogyakarta)	Kejelasan sasaran anggaran dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada masa pandemi COVID-19. Sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu H3 ditolak. (Azmi et al., 2023)
6	Putri Ayu Lestari, dan Aliamin 2023	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aceh Dan Faktor Yang Mempengaruhinya	Kejelasan sasaran anggaran secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi Pemerintah Aceh. Pengendalian akuntansi secara parsial tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi Pemerintah Aceh. Sistem pelaporan secara parsial berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi Pemerintah Aceh. Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi Pemerintah Aceh. (Lestari & Aliamin, 2023)

7	Gebyvia Septiyani, Taufeni Taufik, Julita 2020	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah : Apakah Dipengaruhi Kompetensi Aparatur, Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan?	Kompetensi aparatur pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (studi pada OPD Pemerintah Kota Pekanbaru). Sedangkan sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (Kajian et al., 2020)
8	Deni Harianto, Kennedy, Arumega Zarefar 2021	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (AKIP)	Bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengontrolan Akuntansi, Mekanisme Pertanggungjawaban serta Pendayagunaan Teknologi Informasi berpengaruh kepada Responsibilitas Kinerja Lembaga Pemerintah. (Harianto et al., 2021)
9	Mujennah, Safriansyah, Iqbal Firdaus dan Siti Fatimah 2022	Dampak Accrual Basic dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah	Penerapan SAP berbasis akrual berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kesbangpol Banjarmasin Kalimantan Selatan. Komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kesbangpol Banjarmasin Kalimantan Selatan. Sumber daya manusia mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi di Badan

			Kesbangpol Banjarmasin Kalimantan Selatan. Teknologi Informasi kinerja berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Lingkungan pengendalian tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Manajemen risiko mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Kegiatan pengendalian tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Kesbangpol Banjarmasin. Informasi dan komunikasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Badan Kesbangpol Banjarmasin. (Mujannah et al., 2022)
10	Theodora Oktavia Nauli dan Endah Susilowasi 2023	Pengaruh Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya	1. Pengaruh sistem pelaporan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2) dan kompetensi aparatur pemerintah (X3) secara simultan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Pengaruh parsial mempunyai pengaruh positif dan negatif. Variabel yang mempunyai pengaruh negatif yaitu variabel X1 (Sistem Pelaporan) dan X2 (Pemanfaatan Teknologi

			Informasi). 3. Variabel yang mempunyai pengaruh positif yaitu variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah (X3) (Theodora & Susilowati, 2023)
11	Pandu Haryanto dan Ratih Tri Andayan 2023	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pelaporan, Dan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1. Sistem pengendalian intern (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 2. Sistem pelaporan (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 3. Pemanfaatan teknologi informasi (X3) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja instansi pemerintah (Haryanto & Andayan, 2023)
12	Frenslly Loppies, Tri Gasperz, Franco Benoni Limba 2023	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dengan Sistem Pengendalian Intern sebagai Variabel Moderasi	Berdasarkan hasil analisis regresi sederhana dapat disimpulkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil uji MRA dapat disimpulkan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern merupakan variebel Predictor Moderator (Prediktor Moderasi) yang artinya variabel sistem pengendalian intern tidak memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi

			pemerintah. (Loppies et al., 2023)
13	Ria Herlina, Taufeni Taufik, Azwir Nasir 2021	Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi	Bahwa transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi pengaruh transparansi dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal pemerintah tidak dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. (Herlina et al., 2021)
14	Siti Cholifah, dan Jaeni 2023	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Managerial Dengan Satuan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang 2022)	1. Partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja managerial OPD di Pemerintah Kota Semarang. 2. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja managerial OPD di Pemerintah Kota Semarang. 3. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja managerial OPD di Pemerintah Kota Semarang. 4. Satuan pengawasan Internal tidak memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja managerial OPD di Pemerintah Kota Semarang. 5. Satuan pengawasan internal memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja managerial OPD di Pemerintah Kota

			Semarang. 6. Satuan pengawasan internal memperkuat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja managerial OPD di Pemerintah Kota Semarang. 7. Satuan pengawasan internal memperkuat kinerja managerial OPD di Pemerintah Kota Semarang. (Cholifah & Jaeni, 2023)
15	Sanusi, dan Padlah Riyadi 2023	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening Pada SKPD pemerintah Kabupaten Kotabaru	Kejelasan sasaran anggaran mepengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga H1 diterima. Sistem pelaporan mempengaruhi tidak bermakna bagi akuntabilitas kinerja, sehingga H2 ditolak. Kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi positif dan bermakna bagi pengendalian internal, sehingga H3 diterima. Pengendalian internal mempengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga H4 diterima. Sistem pelaporan mempengaruhi bermakna bagi pengendalian intenal, sehingga H5 diterima. Pengendalian internal sebagai perantara kejelasan sasaran anggaran yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal sebagai variabel perantaramempengaruhi positif dan bermakna dalam memediasi hubungan variabel kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas kinerja instansi

			pemerintah, sehingga H6 diterima. Pengendalian internal menjadi perantara sistem pelaporan yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menyimpulkan bila pengendalian internal yang menjadi variabel perantara memengaruhi positif dan bermakna dalam memediasi keterkaitan sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga H7 diterima. Pengendalian internal bisa sebagai perantara sistem pelaporan bagi akuntabilitas kinerja yang baik. (Sanusi & Riyadi, 2023)
16	Sanusi, Arma Hayat, Novika Rosari 2022	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening	Kejelasan sasaran anggaran memengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga H1 diterima. Sistem pelaporan mempengaruhi tidak bermakna bagi akuntabilitas kinerja, sehingga H2 ditolak. Kejelasan sasaran anggaran mempengaruhi positif dan bermakna bagi pengendalian internal, sehingga H3 diterima. Pengendalian internal mempengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga H4 diterima. Sistem pelaporan mempengaruhi bermakna bagi pengendalian internal, sehingga H5 diterima. Pengendalian internal sebagai perantara kejelasan sasaran anggaran yang mempengaruhi

			akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal sebagai variabel perantara mempengaruhi positif dan bermakna dalam memediasi hubungan variabel kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga H6 diterima. Pengendalian internal menjadi perantara sistem pelaporan yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, menyimpulkan bila pengendalian internal yang menjadi variabel perantara memengaruhi positif dan bermakna dalam memediasi keterkaitan sistem pelaporan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga H7 diterima. Pengendalian internal bisa sebagai perantara sistem pelaporan bagi akuntabilitas kinerja yang baik. (Sanusi et al., 2022)
--	--	--	---

Diolah dari berbagai sumber, 2025

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah uraian mengenai bagaimana teori terkait dengan berbagai elemen yang telah dikenali sebagai isu penting. Pada bagian ini, penjelasan dalam kerangka konseptual dapat dirinci sebagai berikut:

1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sasongko (2010) dalam Mulya, H. G. dan Fauzihardani, E. (2022) menyatakan bahwa anggaran adalah rencana kegiatan yang diperlukan oleh manajemen yang tertuang dalam data kuantitatif, yaitu informasi yang berasal dari jumlah produk dan harga jual untuk tahun depan. Penganggaran merupakan langkah atau cara dalam menyusun anggaran. Proses ini berkaitan dengan penentuan besar dana yang diperlukan untuk setiap program dan aktivitas satuan moneter. Perencanaan anggaran di sektor publik harus dimulai dengan langkah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Anggaran yang diterapkan di pemerintah daerah berfungsi sebagai indikator keberhasilan kinerja, sehingga memerlukan perencanaan yang terperinci. Kenis (1979) dalam Munawar (2006) menjelaskan bahwa kejelasan dalam tujuan anggaran adalah sejauh mana target anggaran ditentukan dengan tegas dan spesifik, sehingga mudah dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran tersebut. Oleh karena itu, tujuan anggaran harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan dapat dipahami oleh orang yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan anggaran.

Menurut Efrizar (2017) dalam Mulya, H. G. & Fauzihardani, E. (2022), ciri-ciri anggaran dapat dilihat dari seberapa jelas atau tidaknya tujuan anggaran tersebut. Seseorang bisa dengan mudah merancang target anggaran apabila ada sasaran yang sudah ditentukan dengan jelas. Selain itu, tujuan anggaran yang ditentukan harus sesuai dengan harapan organisasi, yang berfungsi untuk

mengurangi kekurangan anggaran atau defisit. Kenis (1979) dalam Kaltsum, U & Rohman (2013) menyatakan bahwa anggaran yang jelas adalah anggaran yang dapat mencapai target yang ditentukan oleh pemerintah dengan spesifik sesuai dengan tujuan, sehingga orang yang bertanggung jawab untuk anggaran dapat memahami dokumen tersebut.

Kejelasan sasaran anggaran merupakan seberapa jauh sasaran anggaran ditetapkan dengan jelas dan rinci agar mudah dipahami oleh orang yang bertanggung jawab untuk mencapai target tersebut. (Arifin, 2012).

Dengan adanya anggaran yang jelas, akan lebih mudah untuk menjelaskan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil penelitian Mulya, H.G. & Fauzihardani, E. (2022) menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Ningsih, S.W., dkk (2022) serta Azmi, F.N., dkk (2023) menyatakan Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Mahapradnya, N.A., & Martadinata, I.P.H, (2023) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Oleh karena itu semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik juga.

Hal berbeda pada penelitian Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022) menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap AKIP, Lestari P.A. & Aliamin, dkk (2023) menyatakan Kejelasan sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Ketidakjelasan target anggaran mengakibatkan kebingungan, ketidaknyamanan, dan rasa tidak puas dalam bekerja, yang berdampak pada penurunan kinerja serta menurunkan tanggung jawab atas kinerja organisasi (Suhartono dan Mochammad, 2006). Dengan adanya target anggaran yang jelas, akan lebih mudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas organisasi demi mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, target anggaran di daerah harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, dan mudah dipahami oleh pihak yang bertugas menyusun dan melaksanakan kegiatan anggaran.

2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan sifat atau tindakan dalam menggunakan teknologi informasi untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan performanya (Wiguna, 2016). Dengan penerapan teknologi, lembaga akan mengalami transformasi dalam sistem layanan, manajemen, dan pelaporan, dari cara tradisional menuju cara yang lebih modern. Teknologi informasi berhubungan erat dengan layanan, karena hal ini menjadi aspek penting yang harus diperhatikan untuk mencapai kualitas layanan yang lebih efektif, cepat, dan tepat.

Penelitian Gebyvia Septiyani, dkk (2020) dan Deni Harianto, dkk (2021) menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pandu Haryanto dan Ratih (2023)

menyatakan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Inkonsistensi pada penelitian Mujannah, dkk (2022) menyatakan bahwa teknologi informasi tidak pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Theodora Oktavia dan Endah (2023) menyatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Memoderasi Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sistem pengendalian internal merupakan suatu rangkaian prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan yang cukup tentang tujuan dari suatu pemerintah daerah yang terlihat melalui laporan keuangan yang jelas, serta efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan program dan aktivitas, juga mematuhi peraturan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik, maka penyimpangan dalam proses penyusunan anggaran dapat dihindari. Ketika pengendalian internal pemerintah semakin berfungsi, disertai dengan kejelasan sasaran anggaran, hal ini akan semakin memudahkan pegawai pemerintah dalam menetapkan target-target anggaran yang telah direncanakan. Semakin jelas tujuan anggaran yang ditetapkan pemerintah daerah dan diperkuat dengan pengendalian

internal, maka akan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai dengan tujuan organisasi (Pane, 2018).

Penelitian Siti Cholifah, dkk 2023 menyatakan bahwa Satuan pengawasan internal memperkuat hubungan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja managerial. Sebaliknya Frensy Loppies, dkk 2023 menyatakan bahwa bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan variabel Predictor Moderator (Prediktor Moderasi) yang artinya variabel sistem pengendalian intern hanya berperan sebagai variabel Prediktor Moderasi karena tidak memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Memoderasi Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Berdasarkan (Mahmudi, 2016), sistem pengendalian internal merupakan proses yang menyatu dalam tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemimpin serta semua pegawai. Proses ini bertujuan untuk memastikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien, akurasi dalam pelaporan keuangan, perlindungan terhadap aset negara, serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

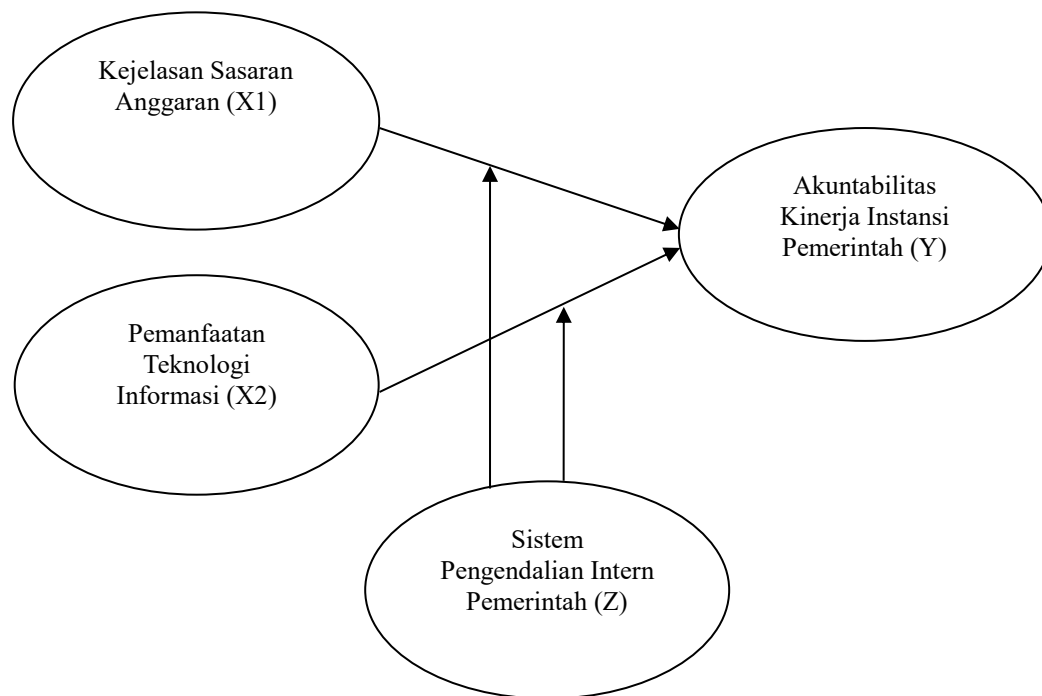
Pemanfaatan teknologi menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, yaitu implementasi sistem informasi keuangan daerah dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan daerah. Penggunaan teknologi informasi sudah umum di semua bidang akuntansi, perkembangan

penggunaan teknologi informasi telah memberikan kontribusi yang besar terhadap peningkatan akuntansi perusahaan, dengan maraknya teknologi informasi, fungsi pengolahan data akuntansi yang semula dilakukan secara manual kini menjadi otomatis, penggunaan teknologi informasi bertujuan untuk mempercepat pengiriman laporan keuangan tepat waktu. Karyawan yang berkomitmen pada organisasi memiliki tanggung jawab dan pemahaman untuk menunjukkan dedikasi dan dukungan yang kuat dalam mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat dan berkualitas tinggi (Fathia, dkk, 2020).

Sistem pengendalian internal adalah faktor luar yang dirancang untuk diterapkan oleh setiap karyawan agar tujuan serta sasaran organisasi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Studi yang dilakukan oleh Asri, S. R. Jaeni (2023) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak dapat meningkatkan Teknologi Informasi berkenaan dengan Kualitas Laporan Keuangan, meskipun Sistem Pengendalian Intern dapat memperkuat Standar Akuntansi Pemerintah terkait Kualitas Laporan Keuangan.

Dari berbagai uraian di atas, keterkaitan antar variabel dalam penelitian ini secara ringkas dapat dilihat melalui kerangka konseptual seperti yang ditampilkan berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.4 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual teoritis di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Binjai.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Binjai.
3. Sistem pengendalian intern Pemerintah mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) Kota Binjai.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kota Binjai.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filosofi positivisme. Metode ini digunakan untuk menganalisis populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan instrumen penelitian, sedangkan analisis data bersifat kuantitatif atau statistik. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis yang telah ditentukan sebelumnya (Sugiyono, 2012).

Data kuantitatif merujuk pada informasi yang dinyatakan dalam bentuk angka, atau data kuantitatif yang menggunakan sistem penilaian (skoring). Oleh karena itu, data kuantitatif adalah data yang cenderung dapat dianalisis melalui metode atau teknik statistik, atau melibatkan pertanyaan yang diberikan bobot, di mana setiap pertanyaan yang disusun oleh peneliti berkaitan dengan isu penelitian. (Sugiyono, 2010)

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif. Berdasarkan pendapat Azuar (2013), penelitian asosiatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana satu variabel terkait atau berhubungan dengan variabel lainnya, atau untuk mengetahui apakah suatu variabel dipengaruhi oleh variabel yang lain menyebabkan perubahan pada variabel yang lain.

[illegible]

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Sugiyono (2010) menjelaskan bahwa populasi adalah area generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang memiliki jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dianalisis dan selanjutnya diambil kesimpulannya. Populasi adalah kumpulan orang, kejadian, atau peristiwa yang menjadi fokus perhatian para peneliti untuk diteliti. Menurut Sugiyono (2010), populasi dapat diartikan sebagai area generalisasi yang mencakup objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk diteliti dan kemudian diambil kesimpulannya. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari 28 Organisasi Perangkat Daerah yang berada di Pemerintah Kota Binjai.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari suatu populasi (baik itu sebagian atau perwakilan dari populasi yang sedang dianalisis). Sampel dalam penelitian merupakan sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber informasi dan dapat menggambarkan keseluruhan populasi. Dalam hal menentukan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis, pendekatan yang diterapkan adalah metode sensus sesuai dengan ketentuan yang diungkapkan oleh Sugiyono pada tahun 2010, yang menyatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik pemilihan sampel di mana seluruh anggota populasi dipakai sebagai sampel. Istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan sampel jenuh adalah sensus.

Pada penelitian ini seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian, yaitu sebanyak 28 OPD Pemerintah Daerah Kota Binjai, dimana hal ini dilakukan karena jumlah populasinya relatif kecil, yaitu sebanyak 28, sehingga semua anggota populasi dijadikan sampel. Berikut ini adalah nama-nama organisasi perangkat daerah yang menjadi sampel pada penelitian ini.

Tabel 3.2

OPD Pada Pemerintah Kota Binjai

No.	OPD Pada Pemerintah Kota Binjai
1	Sekretariat Daerah;
2	Sekretariat DPRD;
3	Inspektorat Daerah;
4	Dinas Pendidikan;
5	Dinas Kesehatan;
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
7	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
8	Satuan Polisi Pamong Praja;
9	Dinas Sosial;
10	Dinas Ketenagakerjaan, Perindustrian dan Perdagangan;
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat;
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
13	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
14	Dinas Lingkungan Hidup;
15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
16	Dinas Perhubungan;
17	Dinas Komunikasi dan Informatika;
18	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
20	Dinas Perpustakaan;
21	Dinas Pemuda dan Olahraga;

22	Dinas Pariwisata;
23	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
25	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
28	RSUD Dr Djoelham Binjai
TOTAL	28 OPD Pemerintah Kota Binjai

Sumber : Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023

Responden adalah individu atau kelompok yang memberikan jawaban atau tanggapan terhadap pertanyaan atau pernyataan tertentu dalam sebuah penelitian. Mereka adalah sumber data utama yang memberikan informasi penting yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menguji hipotesis atau mencapai tujuan penelitian. Responden setiap Organisasi Perangkat Daerah ada 3 (tiga) orang, yaitu Kepala, Sekretaris dan Kepala Bidang, serta Kasubag Keuangan atau Bendahara dengan jumlah responden sebanyak 84 orang. Khusus pada Perangkat Daerah Sekretariat Daerah, diambil perwakilan, yaitu Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, serta Bendahara.

3.4 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, menspesifikasi kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel. Definisi operasional bertujuan untuk mengubah suatu konsep menjadi suatu kalimat yang dapat menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati yang diukur.

Pada penelitian ini terdapat 4 (empat) variabel yang diteliti, yaitu Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) sebagai variabel terikat, dan Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) sebagai variabel bebas, serta Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z) sebagai variabel pemoderasi. Variabel tersebut akan diperjelas dalam indikator dan diukur oleh instrumen penelitian dengan menggunakan kuesioner yang bersifat tertutup dan dirahasiakan sesuai dengan persyaratan skala likert. Defenisi operasional merupakan informasi yang sangat membantu penelitian yang akan menggunakan variabel yang sama. Di bawah ini defenisi operasional dari penelitian yang akan dilakukan :

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Defenisi Operasional	Indikator	Skala Penelitian
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y) (LAN & BPKP, 2000)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah keharusan lembaga pemerintah secara periodik dan aktif mempertanggungjawabkan capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, terhadap pemberi amanat yaitu masyarakat dan otoritas yang lebih tinggi	1. Ekonomis dan Efisiensi 2. Efektivitas 3. Outcome	Ordinal

Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) (Indudewi, 2009)	Kejelasan Sasaran Anggaran adalah keterbukaan target dari rencana, yang menunjukkan bagaimana organisasi memperoleh dan menggunakan dana selama periode tertentu	1. Spesifik 2. Terukur 3. Menantang tapi realistis 4. Berorientasi pada hasil akhir	Ordinal
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) (Sapartiningsih, 2018)	Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah penerapan secara maksimal dalam menggunakan teknologi pada saat melakukan pekerjaan	1. Penggunaan software aplikasi 2. Proses akuntansi secara komputerisasi 3. Laporan dan manejerial yang terintegrasi 4. Kemampuan pegawai mengoperasikan komputer	Ordinal
Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (Z) (Peraturan Pemerintah Nomor 60, 2008)	Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah adalah suatu prosedur terpadu yang dipengaruhi oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk menciptakan keyakinan yang cukup dalam mencapai tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian resiko 3. Pengendalian Aktivitas 4. Sistem informasi dan komunikasi 5. Pemantauan	Ordinal

Sumber: Diolah Penulis, 2025

3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian, wawancara dan daftar pertanyaan yang disebarkan kepada responden, diolah dalam bentuk data melalui alat statistik.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang meliputi sumber-sumber bacaan serta data mengenai sejarah dan perkembangan instansi, struktur organisasi, dan uraian tugas instansi yang diperoleh sehubungan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik antara lain :

1. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan mempelajari dokumen-dokumen serta catatan-catatan untuk mendukung penelitian ini dengan cara mempelajari, meneliti, mengkaji, serta menelaah literatur-literatur berupa buku, makalah, dan jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian.

2. Wawancara

Yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak terkait yang berhubungan dengan penelitian.

3. Kuesioner

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan cara kuisoner (angket) sebagai teknik untuk mengumpulkan data dari responden. Kuesioner (angket) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, digunakan angket yang memiliki indeks skala likert.

Jawaban pertanyaan yang mempunyai 5 (lima) opsi seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3
Skala Likert

Pertanyaan	Bobot
a. Sangat Memadai	5
b. Memadai	4
c. Cukup Memadai	3
d. Kurang Memadai	2
e. Tidak Memadai	1

Sumber: (Sugiyono, 2017)

3.6.1 Uji Validitas dan Reliabilitas

3.6.1.1 Uji Validitas

Menurut (Sugiyono, 2010) Valid berarti instrumen yang digunakan untuk mendapatkan data dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Jadi validitas

ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah kita buat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak kita ukur (Ghozali, 2012).

Guna mempermudah menguji validitas angket dan reliabilitas angket akan dibantu dengan menggunakan SPSS. Hasil dari frekuensi jawaban responden dalam penelitian ini dapat di sajikan dibawah ini, dimana peneliti menggunakan *Statistic Descriptive Frekuensi* pada SPSS.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Uraian	Butir Pernyataan	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Pernyataan 1	0,799	0,2120	Valid
	Pernyataan 2	0,844	0,2120	Valid
	Pernyataan 3	0,809	0,2120	Valid
	Pernyataan 4	0,852	0,2120	Valid
	Pernyataan 5	0,847	0,2120	Valid
	Pernyataan 6	0,847	0,2120	Valid
	Pernyataan 7	0,794	0,2120	Valid
	Pernyataan 8	0,843	0,2120	Valid
	Pernyataan 9	0,873	0,2120	Valid
	Pertanyaan 10	0,843	0,2120	Valid
Pemanfaatan Teknologi Infformasi (X2)	Pernyataan 1	0,777	0,2120	Valid
	Pernyataan 2	0,782	0,2120	Valid
	Pernyataan 3	0,841	0,2120	Valid
	Pernyataan 4	0,793	0,2120	Valid

	Pernyataan 5	0,818	0,2120	Valid
	Pernyataan 6	0,792	0,2120	Valid
	Pernyataan 7	0,787	0,2120	Valid
	Pernyataan 8	0,721	0,2120	Valid
	Pernyataan 9	0,764	0,2120	Valid
	Pertanyaan 10	0,802	0,2120	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)	Pernyataan 1	0,809	0,2120	Valid
	Pernyataan 2	0,880	0,2120	Valid
	Pernyataan 3	0,882	0,2120	Valid
	Pernyataan 4	0,890	0,2120	Valid
	Pernyataan 5	0,811	0,2120	Valid
	Pernyataan 6	0,749	0,2120	Valid
	Pernyataan 7	0,892	0,2120	Valid
	Pernyataan 8	0,807	0,2120	Valid
	Pernyataan 9	0,809	0,2120	Valid
	Pertanyaan 10	0,864	0,2120	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Pernyataan 1	0,911	0,2120	Valid
	Pernyataan 2	0,923	0,2120	Valid
	Pernyataan 3	0,924	0,2120	Valid
	Pernyataan 4	0,870	0,2120	Valid
	Pernyataan 5	0,830	0,2120	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Berdasarkan data pengolahan data di atas, diperoleh nilai r tabel dengan nilai signifikansi 5% sehingga $df=n-2$, $df=84-2= 82$, maka r tabel sebesar 0,2120. Selanjutnya berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai r hitung $> r$ tabel sehingga dapat disimpulkan bahwa semua butir item X1, X2, Z dan Y dinyatakan *valid*.

3.6.1.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas merupakan cara untuk menilai sebuah kuesioner yang menunjukkan ciri dari variabel atau konstruk. Sebuah kuesioner dianggap reliabel atau dapat dipercaya jika reaksi seseorang terhadap pertanyaan tetap sama atau tidak berubah seiring waktu (Ghozali, 2012). Sejalan dengan pandangan Nugroho (2005), reliabilitas (keandalan) mengukur seberapa stabil dan konsisten responden dalam memberikan jawaban terkait dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang menjadi bagian dari dimensi variabel, yang disusun dalam format kuesioner.

Tabel 4.6

Hasil Uji Reliabilitas

No. Item	Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
1	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,952	Reliabel
2	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,932	Reliabel
3	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)	0,953	Reliabel
4	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,935	Reliabel

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa X1, X2, Z memiliki nilai koefisien reliabilitas (*Cronbach's Alpha*) > 0,6 maka kesimpulannya instrument yang diuji adalah reliabilitas yang baik.

3.7 Teknik Analisis Data

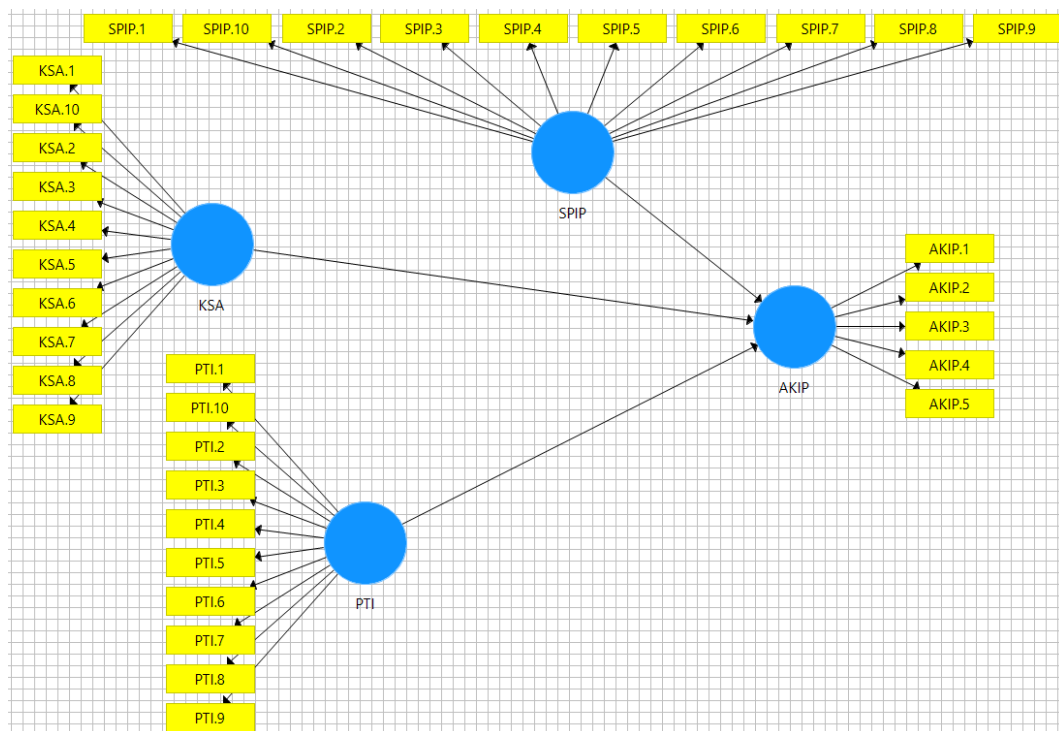
3.7.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sanusi (2011), analisis data mencakup cara yang akan dipakai oleh peneliti untuk mengevaluasi informasi yang telah dikumpulkan, termasuk ujiannya. Penelitian yang mengadopsi metode deskriptif kuantitatif ini dilakukan lewat mengumpulkan, mengolah, menampilkan, dan menganalisis data yang mencerminkan ukuran penyebaran data seperti rata-rata, nilai maksimum, minimum, deviasi standar, dan distribusi frekuensi, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang akurat mengenai isu yang diteliti.

3.7.2 Analisis SEM (*Struktural Equation Modelling*)

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan Model Persamaan Struktural (SEM) yang berbasis pada Partial Least Square (PLS), dengan tujuan untuk menjalankan analisis jalur antara variabel laten. Aplikasi yang digunakan untuk analisis adalah perangkat lunak SmartPls versi 3.0 untuk windows.

Di bawah ini adalah model struktural terkait perumusan masalah tersebut.:



Gambar 3.1 Model Struktural PLS

3.7.3 Evaluasi Model

Menurut Widarjono (2015), analisis jalur dalam PLS SEM menerangkan hubungan antara variabel laten dan indikator di dalam model luar. Tujuan PLS SEM adalah untuk mengurangi selisih antara nilai yang diprediksi dan yang sebenarnya dari variabel tergantung. Estimasi parameter yang diperoleh melalui Partial Least Square (PLS) dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori: kategori pertama adalah estimasi bobot yang digunakan untuk menghasilkan skor variabel laten. Kategori kedua mencerminkan estimasi jalur yang menghubungkan variabel laten serta antar variabel laten dan blok indikatornya. Kategori ketiga berkaitan dengan rata-rata dan posisi parameter untuk indikator dan variabel laten. Untuk mendapatkan ketiga estimasi tersebut, Partial Least Square (PLS)

melakukan proses iterasi yang terdiri dari tiga tahap, dan pada setiap tahapnya dihasilkan estimasi sebagai berikut:

1. Menghasilkan *weight estimate*.
2. Menghasilkan estimasi untuk *inner model* dan *outer model*.
3. Menghasilkan estimasi *means* dan lokasi (konstanta).

Ada dua evaluasi model PLS SEM yaitu evaluasi model pengukuran (*outermodel*) dan model struktural (*inner model*).

1. Evaluasi *Outer Model* atau *Measurement Model*

Analisa *outer model* digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran yang *valid*. Analisa *outer model* ini menjelaskan hubungan antar variabel dengan indikator-indikatornya atau dapat dikatakan bahwa *outer model* mendefinisikan bagaimana setiap indikator berhubungan dengan variabelnya. Analisis *outer model* dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:

a. *Convergent Validity*

Convergent validity dari model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* atau *component score* dengan *construct score* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Ghozali, 2017).

b. *Discriminant Validity*

Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk variabel memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya (Ghozali, 2017).

c. *Discriminant Validity*

Discriminant validity dari model pengukuran dengan reflektif indikator dinilai berdasarkan *cross loading* pengukuran dengan konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk variabel memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik daripada ukuran blok lainnya (Ghozali, 2017).

d. *Composite Reliability*

Composite reliability yang mengukur suatu konstruk dapat dievaluasi dengan dua macam ukuran yaitu *internal consistency* dan *Cronbach's Alpha* (Ghozali, 2017). Pada uji *Cronbach's Alpha* nilai yang diharapkan adalah $> 0,7$ untuk semua konstruk.

e. *Average Variance Extracted (AVE)*

Metode lain untuk menilai *discriminant validity* adalah membandingkan nilai *squareroot of Average Variance Extracted (AVE)* setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar AVE setiap konstruk lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk dengan konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

Pengukuran ini dapat digunakan untuk mengukur reliabilitas *componen score variable* dan hasilnya lebih konservatif dibandingkan dengan *composite reliability*. Direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 0,5 (Ghozali, 2017).

Menurut Hussein (2015), uji yang dilakukan di atas merupakan uji pada outer model untuk indikator reflektif. Indikator formatif dilakukan pengujian yang berbeda. Uji indikator formatif yaitu *Significance of weights*, nilai weight indikator formatif dengan konstruksinya harus signifikan.

2. Evaluasi Inner Model

Analisis Inner Model biasanya juga disebut dengan “inner relation, structural model dan substantive theory” yang mana menggambarkan hubungan antara variabel laten berdasarkan pada substantive theory. Analisis model struktural (inner model) dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat (a) uji Goodness Of Fit (GoF), (b) uji effect size / f-square (F2); (c) uji koefisien determinasi (r-square); dan (d) pengujian hipotesis (Hair, et al., 2014).

a. Uji *Goodness Of Fit* (GoF)

Untuk memvalidasi model struktural secara keseluruhan digunakan *Goodness of Fit* (GoF). GoF indeks merupakan ukuran tunggal untuk memvalidasi performa gabungan antara model pengukuran dan model struktural. Nilai GoF ini diperoleh dari akar kuadrat dari nilai rata-rata *average communalities index* (AVE) dikalikan dengan nilai R² model. Nilai GoF terbentang antara 0 sd 1 dengan interpretasi nilai-nilai : 0.1 (Gof kecil), 0,25 (GoF moderate), dan 0.36 (GoF besar) (Hair, Hult, Ringle, & Sarstedt, 2014). Semakin

tinggi nilai GoF, maka model dapat dikatakan semakin baik atau semakin fit dengan data. Rumus untuk menghitung nilai GoF adalah sebagai berikut:

$$\text{GoF} = \sqrt{Com + R^2}$$

f. *Effect Size / F-Square (F2)*

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria penarikan kesimpulan adalah jika nilai F2 sebesar 0,02 maka terdapat efek yang kecil (lemah) dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai F2 sebesar 0,15 maka terdapat efek yang moderat (sedang) dari variabel eksogen terhadap endogen, nilai F2 sebesar 0,35 maka terdapat efek yang besar (baik) dari variabel eksogen terhadap endogen (Juliandi, 2018).

g. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam mengevaluasi *inner* model dengan PLS (*Partial Least Square*) dimulai dengan cara melihat R-square untuk setiap variabel laten dependen. Kemudian dalam penginterpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai R-square dapat digunakan untuk menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah memiliki pengaruh yang substantive.

Koefisien determinasi (*R-Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu model. dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. Jika nilai $R^2 = 0,75$ maka model adalah substantansial (kuat),

jika $R^2 = 0.50$ maka model adalah moderate (sedang), jika $R^2 = 0,25$ maka model adalah lemah (Juliandi, 2018).

h. Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistik maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 2,02. Sehingga kriteria penerimaan/penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_o ditolak ketika t-statistik $> 2,02$. Untuk: menolak/menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a diterima jika nilai probabilitas $< 0,05$ (Hair, et al., 2014).

Pengujian model *structural (inner model)* dalam PLS dilakukan dengan bantuan software Smart PLS ver. 3 for Windows.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

4.1.1 Deskripsi Data

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai terhadap 84 orang responden, peneliti dapat memperoleh data sebanyak 84 orang responden. Berdasarkan data tersebut diperoleh deskripsi data yang tertera pada table berikut:

1. Karakteristik Responden

Tabel 4.1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent
Laki-Laki	54	64.29	64.29
Perempuan	30	35.71	35.71
Total	84	100.0	100.0

Berdasarkan hasil dari table 4.1 diketahui bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak yaitu 54 orang dibandingkan dengan responden perempuan dengan jumlah 30 orang dengan tingkat persentase 64,29% dan 35,71% pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai.

Tabel 4.2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent
Kurang dari 30 Tahun	1	1.19	1.19
31 Tahun s/d 40 Tahun	24	28.57	28.57
41 Tahun s/d 50 Tahun	53	63.10	63.10

Di atas 50 Tahun	6	7.14	7.14
Total	84	100.0	100.0

Dari tabel 4.2 di atas dapat diketahui usia rata-rata responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai. Responden dengan rentang usia di bawah 30 tahun berjumlah 1 orang atau 1,19% dan rentang usia 31 tahun sampai dengan 40 tahun berjumlah 24 orang, dengan tingkat presentase sebesar 28,57%. Selanjutnya responden dengan rentang usia 41 sampai dengan 50 tahun sebanyak 53 orang dengan tingkat persentase 63,10% dan responden dengan usia lebih dari 50 tahun berjumlah 6 orang dengan tingkat persentase 7.14%. Hal ini menunjukkan mayoritas responden pada penelitian ini berusia 41 sampai dengan 50 tahun.

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent
SMA atau setara	2	2.38	2.38
D-3 (Diploma) atau setara	2	2.38	2.38
S-1 (Sarjana) atau setara	45	53.57	53.57
S-2 (Magister) atau setara	34	40.48	40.48
S-3 (Doktoral) atau setara	1	1.19	1.19
Total	84	100.0	100.0

Berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui rentang tingkat pendidikan rata-rata responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai yaitu pada tingkat SMA atau setara, berjumlah 2 orang dan Diploma atau setara, berjumlah 2 orang dengan persentase masing-masing 2,38%. Berikutnya tingkat S-1 Sarjana

atau setara, dengan jumlah 45 orang, dan S-2 Magister atau setara, dengan jumlah 34 orang dengan persentase 53,57% dan 40,48%. Terdapat 1 orang pegawai yang dijadikan responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai dengan tingkat pendidikan S-3 Doktoral atau setara, dengan persentase 1,19%.

Tabel 4.4

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja

	Frequency	Percent	Valid Percent
Kurang Dari 5 Tahun	1	1.19	1.19
5 s/d 10 tahun	4	4.76	4.76
10 s/d 15 tahun	38	45.24	45.24
Di atas 15 tahun	41	48.81	48.81
Total	84	100.0	100.0

Berdasarkan tabel 4.4 di atas diketahui rentang masa kerja responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai. Responden dengan rentang masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun berjumlah 1 orang dengan tingkat persentase 1,19%, kemudian responden dengan rentang masa kerja 5 (lima) sampai dengan 10 tahun berjumlah 4 orang dengan tingkat persentase 4,76%, dan responden dengan rentang masa kerja 10 sampai dengan 15 tahun berjumlah 38 orang dengan tingkat persentase 45,24 %. Selain itu terdapat juga responden dengan rentang masa kerja di atas 15 tahun berjumlah 41 orang dengan tingkat persentase 48,81%.

Tabel 4.5

Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent
Kepala Dinas / Plt.	9	10.71	10.71

Sekretaris / Kepala Bidang	15	17.86	17.86
Kasubag Keuangan	40	47.62	47.62
Bendahara Pengeluaran	20	23.81	23.81
Total	84	100.0	100.0

Berdasarkan tabel 4.5 diatas diketahui jabatan dari responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai. Responden dengan jabatan Kepala dinas berjumlah 9 (sembilan) orang dengan persentase sebesar 10,71%, kemudian responden dengan jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang berjumlah 15 orang dengan tingkat persentase 17,86%. Selanjutnya responden dengan jabatan kasubag keuangan dan eselon iv lain berjumlah 40 orang dengan tingkat persentase 47,62%, dan responden dengan jabatan bendahara pengeluaran berjumlah 20 orang dengan persentase 23,81%.

Tabel 4.6

Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Jabatan

	Frequency	Percent	Valid Percent
Kurang dari lima tahun	51	60.71	60.71
5 s/d 10 tahun	24	28.58	28.58
10 s/d 15 tahun	6	7.14	7.14
Lebih dari 15 tahun	3	3.57	3.57
Total	70	100.0	100.0

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui rentang masa jabatan dari responden pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Binjai. Responden dengan masa jabatan kurang dari lima tahun berjumlah 51 orang dengan tingkat persentase 60,71%, kemudian responden dengan masa jabatan lima sampai dengan sepuluh

tahun berjumlah 24 orang dengan tingkat persentase 28,58%, dan responden dengan masa jabatan 10 sampai dengan 15 tahun berjumlah 6 orang dengan persentase sebesar 7,14%. Responden dengan tingkat masa jabatan melebihi lima belas tahun berjumlah 3 orang dengan tingkat persentase 3,57%.

2. Karakteristik Kriteria Jawaban Responden

Deskripsi hasil penelitian merupakan tanggapan responden yang mengisi kuesioner mengenai pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) studi di Pemerintah Kota Binjai. Akan dilihat mengenai kecenderungan jawaban responden atas masing-masing variabel penelitian. Kecenderungan jawaban responden ini dapat dilihat dari bentuk statistik deskriptif dari masing-masing variabel. Analisis deskriptif tersebut dijabarkan kedalam Rentang Skala sebagai berikut:

$$RS = \frac{m-n}{b}$$

keterangan :

rs = rentang skala

m = jumlah skor tertinggi pada skala n= jumlah skor terendah pada skala

b= jumlah kelas atau kategori yang dibuat

$$\text{Perhitungan tersebut adalah : } RS = \frac{5-1}{5} = 0,80$$

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Skala

No	Interval Rata-rata Skor	Kategori
1	1,00 – 1,80	Tidak Memadai
2	1,81 – 2,60	Memadai
3	2,61 – 3,40	Cukup Memadai
4	3,41 – 4,20	Memadai
5	4,21 – 5,00	Sangat Memadai

Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan terhadap variabel Kejelasan

Sasaran Anggaran diperoleh hasil data yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.8**Deskripsi Jawaban Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran**

Indikator	No	Pertanyaan	Tanggapan						Rata-rata Skor	Kategori
				SM	M	CM	KM	TM		
Spesifik	1	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membuat dan merincikan tugas-tugas yang harus dikerjakan?	F	9	49	18	8	0	3.70	Memadai
			%	10.7	58.3	21.4	9.5	0		
			Skor	45	196	54	16	0		
	2	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan tujuan anggaran secara jelas dan spesifik?	F	13	46	17	8	0	3.76	Memadai
			%	15.5	54.8	20.2	9.5	0		
			Skor	65	184	51	16	0		
	3	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membuat pedoman penyusunan rancangan anggaran?	F	17	41	18	8	0	3.80	Memadai
			%	20.2	48.8	21.4	9.5	0		
			Skor	85	164	54	16	0		
Terukur	4	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan standar dan target yang ingin dicapai organisasi?	F	6	41	28	9	0	3.52	Memadai
			%	7.1	48.8	33.3	10.7	0		
			Skor	30	164	84	18	0		
	5	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan?	F	10	41	25	8	0	3.63	Memadai
			%	11.9	48.8	29.8	9.5	0		
			Skor	50	164	75	16	0		
	6	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyatakan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur?	F	9	37	26	12	0	3.48	Memadai
			%	10.7	44.0	31.0	14.3	0		
			Skor	45	148	75	24	0		
Menantang tapi Realistis	7	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan kepentingannya?	F	3	33	35	12	1	3.29	Cukup Memadai
			%	3.6	39.3	41.6	14.3	1.2		
			Skor	14	132	105	24	1		

	8	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan sasaran dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian?	F	6	38	30	10	0	3.50	Memadai
			%	7.1	45.2	35.7	11.9	0		
			Skor	30	152	90	20	0		
Berorientasi pada Hasil Akhir	9	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan sasaran dan prioritas organisasi?	F	12	42	22	8	0	3.69	Memadai
			%	14.3	50.0	26.2	9.5	0		
			Skor	60	168	66	16	0		
	10	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menentukan prioritas program?	F	12	38	28	6	0	3.66	Memadai
			%	14.3	45.2	33.3	7.1	0		
			Skor	60	152	84	12	0		
Total Rata-Rata									3.60	Memadai

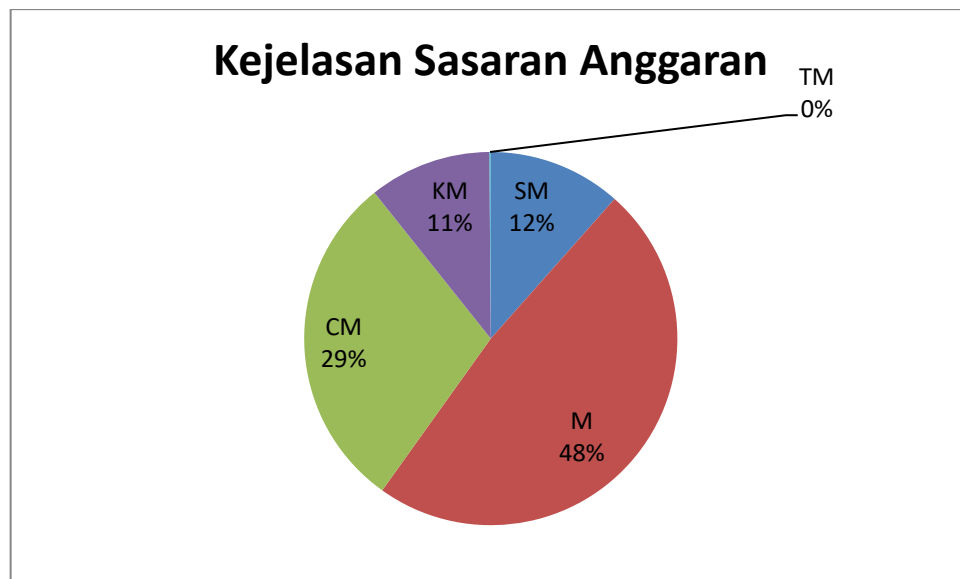
Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan data pada tabel 4.8 diketahui rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel Kejelasan Sasaran Anggaran yang di ukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran.

Tanggapan responden terhadap variabel Kejelasan Sasaran Anggaran yang di ukur dengan empat indikator (spesifik, terukur, menantang tapi realistis, berorientasi pada hasil akhir) yang dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dengan perolehan hasil total rata-rata penilaian sebesar 3,60 yang termasuk dalam kategori memadai. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran pada OPD Pemerintah Kota Binjai telah dilakukan dengan baik.

Skor maksimum rata-rata tanggapan bernilai 3,80 terdapat pada indikator “spesifik” pada butir pernyataan “bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membuat pedoman penyusunan rancangan anggaran?”. Sedangkan nilai minimum rata-rata tanggapan bernilai 3,29 terdapat pada indikator “menantang tapi realistis” pada butir pernyataan “bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan kepentingnya?”.

Gambar 4.1 Persentase Jawaban Responden Kejelasan Sasaran Anggaran



Berdasarkan gambar 4.1 di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang kejelasan sasaran anggaran, responden menjawab “sangat memadai” sebesar 12%, menjawab “memadai” sebesar 48%, menjawab “cukup memadai” 49%, kemudian menjawab “kurang memadai” sebesar 11% serta “tidak memadai” sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa Kejelasan Sasaran Anggaran pada OPD Pemerintah Kota Binjai, masih terdapat 11% responden menyatakan belum dilakukan dengan baik.

Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan terhadap variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diperoleh hasil data yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.9

Deskripsi Jawaban Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

Indikator	No	Pertanyaan	Tanggapan						Rata-rata Skor	Kategori
				SM	M	CM	KM	TM		
Penggunaan Software Aplikasi	1	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggunakan software dan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah?	F	10	41	27	6	0	3.65	Memadai
			%	11.9	48.8	32.1	7.1	0		
			Skor	50	164	81	12	0		
	2	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software atau aplikasi yang sesuai dengan perundang-undangan?	F	12	39	27	6	0	3.68	Memadai
			%	14.3	46.4	32.1	7.1	0		
			Skor	60	156	81	12	0		
Proses Akuntansi Secara Komputerisasi	3	Bagaimana proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara terkomputerisasi?	F	12	42	24	6	0	3.71	Memadai
			%	14.3	50.0	28.6	7.1	0		
			Skor	60	168	72	12	0		
	4	Bagaimana pengolahan data transaksi keuangan dilakukan secara komputerisasi untuk menjamin keakuratan hasil yang diperoleh?	F	14	40	25	5	0	3.75	Memadai
			%	16.7	47.6	29.8	6.0	0		
			Skor	70	160	75	10	0		
	5	Bagaimana komputerisasi dalam proses akuntansi keuangan mempermudah pekerjaan aparatur dalam menginput data secara cepat dan tepat waktu?	F	19	35	25	4	1	3.80	Memadai
			%	22.6	41.7	29.8	4.8	1.2		
			Skor	95	140	75	8	1		
Laporan Dan Manajerial Yang Terintegrasi	6	Bagaimana laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi?	F	10	42	26	5	1	3.65	Memadai
			%	11.9	50.0	31.0	6.0	1.2		
			Skor	50	168	78	10	1		
	7	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan pengelolaan keuangan secara utuh mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya?	F	14	42	21	6	1	3.74	Memadai
			%	16.7	50.0	25.0	7.1	1.2		
			Skor	70	168	63	12	1		
Kemampuan Pegawai Mengoperasikan Komputer	8	Bagaimana kemampuan aparatur mengoperasikan komputer secara baik?	F	11	40	28	5	0	3.68	Memadai
			%	13.1	47.6	33.3	6.0	0		
			Skor	55	160	84	10	0		
	9	Bagaimana kemampuan aparatur mengakses internet menggunakan komputer dan perangkat lainnya?	F	15	40	23	6	0	3.76	Memadai
			%	17.9	47.6	27.4	7.1	0		
			Skor	75	160	69	12	0		

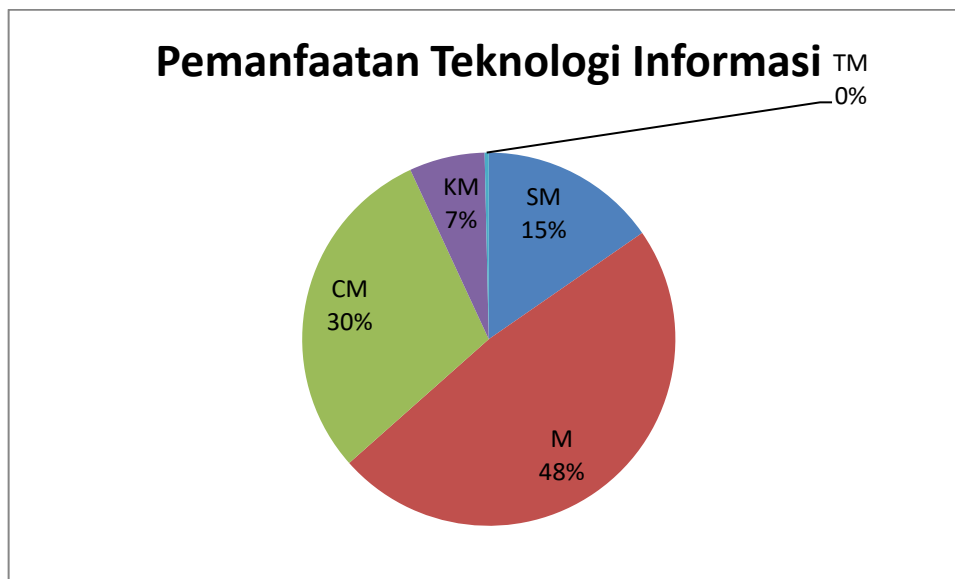
	10	Bagaimana kemampuan aparatur menggunakan aplikasi pemerintah serta aplikasi lainnya?	F	12	43	23	6	0	3.73	Memadai
			%	14.3	51.2	27.4	7.1	0		
			Skor	60	172	69	12	0		
Total Rata-Rata									3.72	Memadai

Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan data pada tabel 4.9 diperoleh hasil deskriptif rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diukur dengan menggunakan empat pengukuran (Penggunaan Software Aplikasi, Proses Akuntansi secara Komputerisasi, Laporan dan Manajerial yang Terintegrasi, Kemampuan Pegawai Mengoperasikan Komputer) yang kemudian dinyatakan dalam bentuk pernyataan. Perolehan total rata-rata penilaian sebesar 3,72 yang termaksud dalam kategori memadai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi pada OPD Pemerintah Kota Binjai telah dilakukan dengan baik.

Skor maksimum rata-rata tanggapan bernilai 3,80 terdapat pada indikator “proses akuntansi secara komputerisasi” pada butir pernyataan “bagaimana komputerisasi dalam proses akuntansi keuangan mempermudah pekerjaan aparatur dalam menginput data secara cepat dan tepat waktu?”. Sedangkan nilai minimum rata-rata tanggapan bernilai 3,65 terdapat pada indikator “penggunaan software aplikasi” pada butir pernyataan “bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggunakan software dan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah?”, juga indikator “laporan dan manajerial yang terintegrasi” pada butir pernyataan “bagaimana laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi?”.

Gambar 4.2 Persentase Jawaban Responden Pemanfaatan Teknologi Informasi



Berdasarkan gambar 4.2 di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang pemanfaatan teknologi informasi, responden menjawab “sangat memadai” sebesar 15%, menjawab “memadai” sebesar 48%, menjawab “cukup memadai” 30%, kemudian menjawab “kurang memadai” sebesar 7% serta “tidak memadai” sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi pada OPD Pemerintah Kota Binjai, masih terdapat 7% responden menyatakan belum dilakukan dengan baik.

Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah diperoleh hasil data yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Deskripsi Jawaban Variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

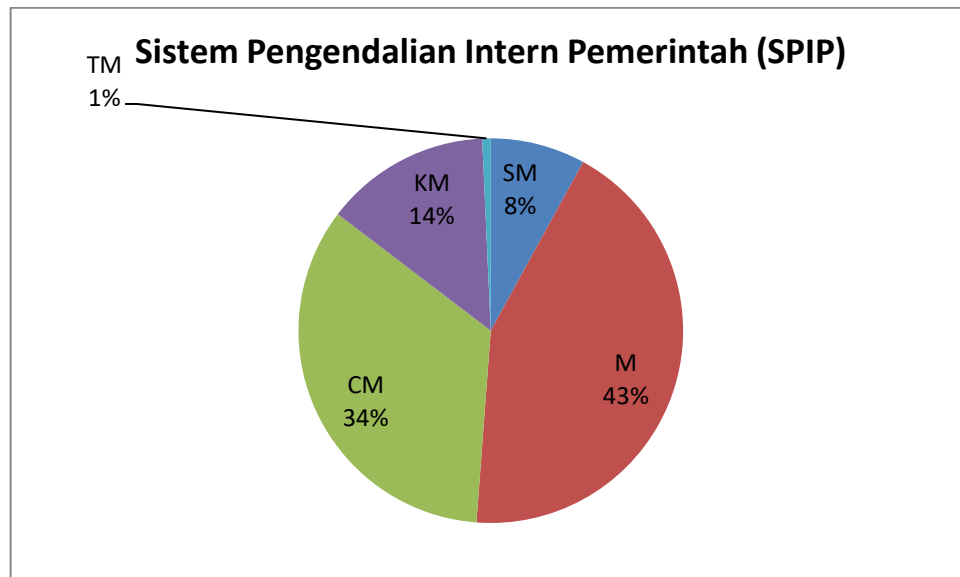
[illegible]

Berdasarkan data pada tabel 4.10 diketahui rata-rata karakteristik tanggapan dari responden terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang di ukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran.

Tanggapan responden terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang di ukur dengan lima indikator yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan) yang dinyatakan kedalam bentuk pernyataan. Hasil pengujian deskripsi diperoleh hasil rata-rata penilaian sebesar 3,44 yang termasuk dalam kategori memadai. Hal ini menunjukkan bahwa OPD pada Pemerintah Kota Binjai memiliki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang baik dalam melakukan aktivitas keorganisasian.

Skor maksimum rata-rata tanggapan bernilai 3,65 terdapat pada indikator “kegiatan pengendalian” pada butir pernyataan “bagaimana setiap transaksi dicatat, dan bagaimana pelaporan berkala aset dilakukan?”, juga butir pernyataan “bagaimana kehandalan pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan?”. Sedangkan nilai minimum rata-rata tanggapan bernilai 3,33 terdapat pada indikator “informasi dan komunikasi” pada butir pernyataan “bagaimana ketersediaan saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan, dan bagaimana tindak lanjutnya?”.

Gambar 4.3 Persentase Jawaban Responden Sistem Pengendalian Intern Pemerintah



Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang sistem pengendalian intern pemerintah, responden menjawab “sangat memadai” sebesar 8%, menjawab “memadai” sebesar 43%, menjawab “cukup memadai” 34%, kemudian menjawab “kurang memadai” sebesar 14% serta “tidak memadai” sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada OPD Pemerintah Kota Binjai, masih terdapat 15% responden menyatakan belum dilakukan dengan baik.

Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperoleh hasil data yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.11
Deskripsi Jawaban Variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan						Rata-rata Skor	Kategori
				SM	M	CM	KM	TM		
Ekonomis dan Efisiensi	1	Bagaimana sumber daya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diperoleh, dilindungi dan digunakan secara hemat dan efisien?	F	6	45	23	9	1	3.55	Memadai
			%	7.1	53.6	27.4	10.7	1.2		
			Skor	30	180	69	18	1		
	2	Bagaimana kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap peraturan dan perundang-undangan, terutama yang berkaitan kehematan dan efisiensi?	F	8	45	23	7	1	3.62	Memadai
			%	9.5	53.6	27.4	8.3	1.2		
			Skor	40	180	69	14	1		
Efektifitas	3	Bagaimana tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan?	F	8	47	23	6	0	3.68	Memadai
			%	9.5	56.0	27.4	7.1	0		
			Skor	40	188	69	12	0		
	4	Bagaimana kesesuaian antara program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan visi dan misi Pemerintah disusun?	F	7	49	22	6	0	3.68	Memadai
			%	8.3	58.3	26.2	7.1	0		
			Skor	35	196	66	12	0		
Outcome	5	Bagaimana dampak seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat?	F	7	39	30	7	1	3.52	Memadai
			%	8.3	46.4	35.7	8.3	1.2		
			Skor	35	156	90	14	1		
Total Rata-Rata									3.61	Memadai

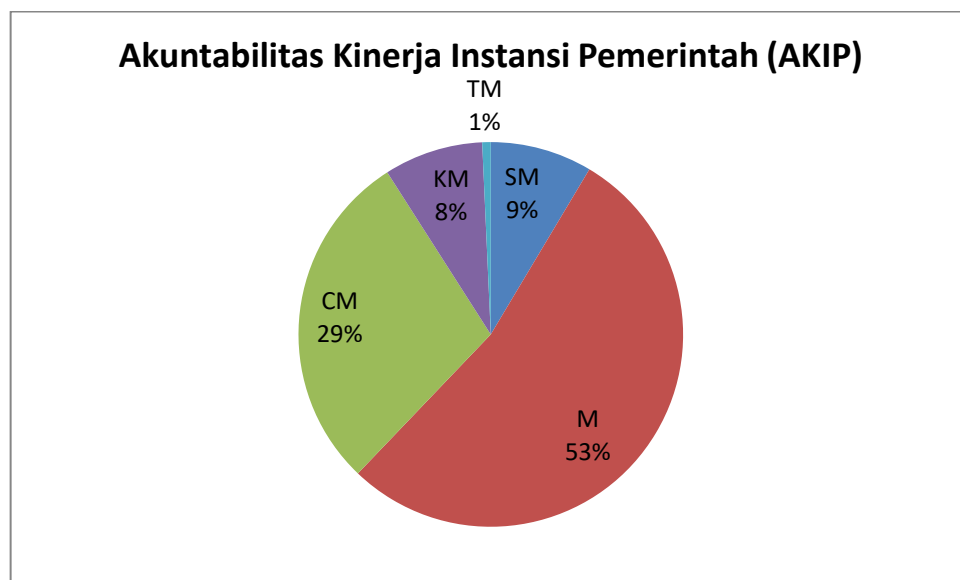
Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan data pada tabel 4.11 diketahui tanggapan responden terhadap variabel Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di ukur dengan tiga indikator pengukuran (Ekonomis dan Efisiensi, Efektifitas, Outcome) yang dinyatakan kedalam bentuk pernyataan. Hasil pengujian deskripsi menunjukkan rata-rata penilaian sebesar 3,61 yang termasuk dalam kategori memadai. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang OPD Pemerintah Kota Binjai telah tercapai dengan baik.

Skor maksimum rata-rata tanggapan bernilai 3,68 terdapat pada indikator “efektifitas” pada butir pernyataan “bagaimana tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan?”, juga butir pernyataan “bagaimana kesesuaian antara program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan visi dan misi Pemerintah disusun?”. Sedangkan nilai minimum rata-rata tanggapan bernilai 3,52 terdapat pada indikator “outcome” pada butir pernyataan “bagaimana dampak seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat?”.

Gambar 4.4 Persentase Jawaban Responden Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)



Berdasarkan gambar 4.4 di atas dapat dilihat bahwa jawaban responden tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, responden menjawab “sangat memadai” sebesar 9%, menjawab “memadai” sebesar 53%, menjawab “cukup memadai” 29%, kemudian menjawab “kurang memadai” sebesar 8% serta “tidak memadai” sebesar 1%. Hal ini menunjukkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada OPD Pemerintah Kota Binjai, masih terdapat 9% responden menyatakan belum dilakukan dengan baik.

4.1.2 Hasil Pengujian SEM PLS

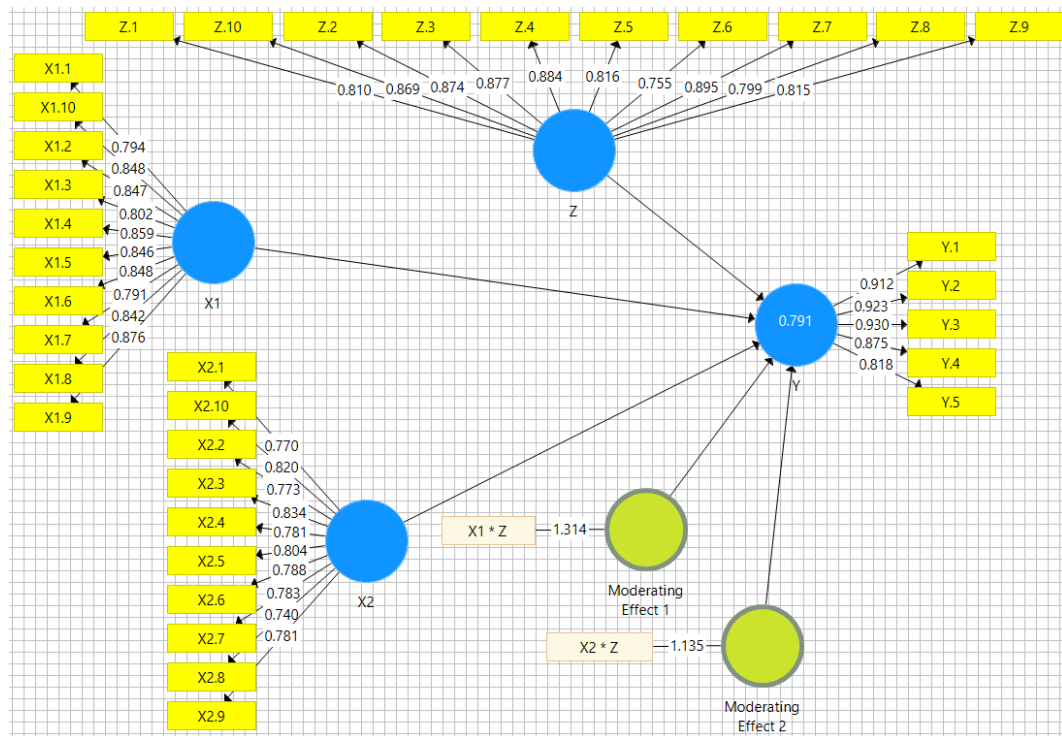
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini terlebih dahulu melakukan pengujian terhadap kualitas data yang digunakan. Pengujian ini digunakan untuk menjamin terpenuhinya asumsi yang diperlukan untuk melakukan pengujian terhadap penelitian ini.

4.1.2.1 Analisis *Outer Model*

Teknik pengolahan data dengan menggunakan metode SEM berbasis PLS memerlukan 2 tahap untuk menilai fit model dari sebuah model penelitian (Ghozali). Salah satunya adalah analisis *outer model*. Analisis *outer model* digunakan untuk menguji pengukuran yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran yang valid. Ada beberapa indikator dalam analisis *outer model*, diantaranya *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

a. *Convergent Validity*

Convergent validity dari sebuah model pengukuran dengan model reflektif indikator dinilai berdasarkan korelasi antara *item score* atau *component score* dengan *construct score* pada *Loading Factor* yang dihitung dengan PLS. Ukuran reflektif dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur. Berikut adalah gambar hasil kalkulasi model SEM PLS.



Sumber: Diolah oleh penulis, 2025

Gambar 4.5 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS

Hasil pengolahan dengan SmartPLS 3.00 dapat dilihat pada gambar 4.6 nilai *outer model* antara konstruk dengan variabel sudah memenuhi *convergent validity* karena indikator memiliki nilai validitas diatas 0,7.

Tabel 4.12

Outer Loading

	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	Ket.
X1.1	0.794				Valid
X1.2	0.847				Valid
X1.3	0.802				Valid

X1.4	0.859				Valid
X1.5	0.846				Valid
X1.6	0.848				Valid
X1.7	0.791				Valid
X1.8	0.842				Valid
X1.9	0.876				Valid
X1.10	0.848				Valid
X2.1		0.770			Valid
X2.2		0.773			Valid
X2.3		0.834			Valid
X2.4		0.781			Valid
X2.5		0.804			Valid
X2.6		0.788			Valid
X2.7		0.783			Valid
X2.8		0.740			Valid
X2.9		0.781			Valid
X2.10		0.820			Valid
Z1			0.810		Valid
Z2			0.874		Valid
Z3			0.877		Valid
Z4			0.884		Valid
Z5			0.816		Valid
Z6			0.755		Valid
Z7			0.895		Valid
Z8			0.799		Valid
Z9			0.815		Valid
Z10			0.869		Valid
Y1				0.912	Valid
Y2				0.923	Valid
Y3				0.930	Valid

Y4				0.875	Valid
Y5				0.818	Valid

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 4.12 diatas diperoleh hasil bahwa, nilai outer loading seluruh variabel X1, X2, Z < dan Y adalah valid, karena seluruh nilai outer loading dari indikator masing-masing variabel > 0.7 .

b. Discriminant Validity

Pada bagian ini akan diuraikan hasil uji *discriminant validity*. Uji *discriminant validity* menggunakan nilai *cross loading*. Suatu indikator dinyatakan memenuhi discriminan validity apabila nilai *cross loading* indikator pada variabelnya adalah yang terbesar dibandingkan dengan variabel lainnya (Ghozali, 2017). Berikut adalah nilai *cross loading* pada masing-masing indikator:

Tabel 4.13

Cross Loading

	Kejelasan Sasaran Anggaran X1	Pemanfaatan Teknologi Informasi X2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Y	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Z
X1.1	0,794	0,595	0,597	0,582
X1.10	0,848	0,669	0,706	0,685
X1.2	0,847	0,648	0,719	0,638
X1.3	0,802	0,546	0,637	0,626
X1.4	0,859	0,683	0,753	0,662
X1.5	0,846	0,633	0,665	0,627
X1.6	0,848	0,544	0,703	0,654
X1.7	0,791	0,521	0,638	0,680

X1.8	0,842	0,594	0,669	0,693
X1.9	0,876	0,683	0,710	0,695
X2.1	0,567	0,770	0,531	0,447
X2.10	0,622	0,820	0,672	0,690
X2.2	0,637	0,773	0,567	0,508
X2.3	0,674	0,834	0,568	0,547
X2.4	0,604	0,781	0,518	0,571
X2.5	0,539	0,804	0,525	0,589
X2.6	0,491	0,788	0,575	0,554
X2.7	0,559	0,783	0,615	0,629
X2.8	0,509	0,740	0,560	0,602
X2.9	0,573	0,781	0,638	0,665
Y.1	0,757	0,719	0,912	0,799
Y.2	0,746	0,657	0,923	0,739
Y.3	0,794	0,727	0,930	0,807
Y.4	0,674	0,604	0,875	0,767
Y.5	0,661	0,569	0,818	0,661
Z.1	0,722	0,608	0,685	0,810
Z.10	0,654	0,641	0,756	0,869
Z.2	0,654	0,539	0,692	0,874
Z.3	0,643	0,615	0,687	0,877
Z.4	0,653	0,609	0,694	0,884
Z.5	0,647	0,656	0,707	0,816
Z.6	0,599	0,675	0,714	0,755
Z.7	0,755	0,715	0,809	0,895
Z.8	0,601	0,541	0,644	0,799
Z.9	0,639	0,607	0,712	0,815

Sumber: Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan data Tabel 4.13 diketahui bahwa masing-masing indikator pada variabel penelitian memiliki nilai *cross loading* terbesar pada variabel yang

dibentuknya dibandingkan dengan nilai *cross loading* pada variabel lainnya. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, dapat dinyatakan bahwa indikator-indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memiliki *discriminant validity* yang baik dalam menyusun variabelnya masing-masing.

Selain mengamati nilai *cross loading*, *discriminant validity* juga dapat diketahui melalui metode lainnya yaitu dengan melihat nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk masing-masing indikator dipersyaratkan nilainya harus > 0,5 untuk model yang baik (Ghozali, 2017).

Tabel 4.14

Average Variance Extracted (AVE)

Variabel	Average Variance Extracted (AVE)	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,698	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,621	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,797	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)	0,707	Valid
Moderating Effect 1 (X1*Z)	1,000	Valid
Moderating Effect 2 (X2*Z)	1,000	Valid

Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 4.14 diketahui nilai AVE variabel kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern

pemerintah $> 0,5$ maka dinyatakan bahwa setiap variabel telah memiliki *discriminant validity* yang baik.

Selain itu, untuk mengukur validitas diskriminan dapat dilihat dari, *Fornell-LarckerCirteiron*, *Cross Loadings*, *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT). Namun demikian, dalam *website* SmartPLS, pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTM). Jika nilai HTMT $< 0,90$ maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik (Jorg Henseler Christian, M. Ringle,& Marko Sarsted 2015).

Tabel 4.15

Heroit-Monotrait Ratio (HTMT)

	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Modera- ting Effect 1 (X1*Z)	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	Modera- ting Effect 2 (X2*Z)	Sistem Pengendali an Intern Pemerintah (Z)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
X1						
X1*Z	0.256					
X2	0.777	0.164				
X2*Z	0.190	0.797	0.153			
Z	0.821	0.252	0.779	0.104		
Y	0.861	0.307	0.781	0.176	0.894	

Sumber: Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan gambar pada tabel 4.15 diatas diperoleh hasil bahwa nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT) seluruh variabel konstruk < 0.90 , maka seluruh nilai variabel konstruk adalah valid. *Diskriminant Validity* (validitas diskriminan)

adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik).

c. Composite Reliability

Composite reliability merupakan bagian yang digunakan untuk menguji nilai reliabilitas indikator-indikator pada suatu variabel. Suatu variabel dapat dinyatakan memenuhi *composite reliability* apabila memiliki nilai *composite reliability* > 0,6 (ghozali). Berikut nilai *composite reliability* dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4.16

Composite Reliability

Variabel	CompositeReliability	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,959	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,942	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,951	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)	0,960	Valid
Moderating Effect 1 (X1*Z)	1,000	Valid
Moderating Effect 2 (X2*Z)	1,000	Valid

Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 4.16 diketahui bahwa nilai *composite reliability* semua variabel penelitian > 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa masing-masing variabel

telah memenuhi *composite reliability* sehingga dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel memiliki tingkat reliabilitas yang tinggi.

d. Cronbach's Alpha

Uji reliabilitas dengan *composite reliability* sebelumnya dapat diperkuat dengan menggunakan nilai *cronbach's alpha*. Suatu variabel dapat dinyatakan reliabel apabila nilai *cronbach's alpha* $> 0,7$. Berikut adalah nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel:

Tabel 4.17

Cronbach's Alpha

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	0,952	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	0,932	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,936	Valid
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)	0,953	Valid
Moderating Effect 1 (X1*Z)	1,000	Valid
Moderating Effect 2 (X2*Z)	1,000	Valid

Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan Tabel 4.17 diketahui bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel penelitian $> 0,7$. Maka hasil ini menunjukkan masing-masing variabel penelitian telah memenuhi persyaratan reliabilitas yang tinggi.

e. *Estimation Weight*

Estimation weight menunjukkan bahwa pengukuran formatif antar variabel harus memiliki nilai signifikan. Nilai signifikansi variabel biasanya $< 0,05$ namun, pada signifikansi nilai *weight* memperbolehkan nilai $< 0,2$ (Ghozali, 2017:43).

Tabel 4.18

Estimation Weight

Variabel	P values
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,005
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,047
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z) -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,000

Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Pada Tabel 4.18 dinyatakan bahwa nilai pemanfaatan teknologi informasi terbesar adalah 0,047 dengan *estimation weight* nilai *probability* $< 0,2$ maka variabel penelitian ini memiliki nilai estimasi model pengukuran formatif yang signifikan.

4.1.2.2 Analisis Inner Model

Setelah memenuhi kriteria *outer model*, selanjutnya dilakukan pengujian model struktural (*inner model*). Pada penelitian ini akan dijelaskan mengenai uji *goodness of fit*.

a. **Uji Path Coefficient**

Evaluasi path coefficient digunakan untuk menunjukkan seberapa kuat efek atau pengaruh variabel independen kepada variabel dependen.

Tabel 4.19
Path Coefficient

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Y	0.331	0.355	0.129	2.560	0.005
X2 → Y	0.142	0.141	0.085	1.679	0.047
X1*Z → Y	-0.090	-0.079	0.097	0.929	0.177
X2*Z → Y	0.045	0.033	0.110	0.407	0.342

Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 4.19 Skema Penelitian Struktural SEM-PLS menjelaskan bahwa nilai *path coefficient* variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 0.331, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0.142, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebesar 0.459. SPIP *moderating effect* kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar -0.090 dan SPIP *moderating effect* pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0.045. Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan bahwa variabel dalam model ini pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), serta efek SPIP yang memoderasi pemanfaatan teknologi terhadap AKIP, keempatnya memiliki pengaruh positif, sedangkan efek SPIP memoderasi kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki pengaruh negatif.

b. Uji Goodness of Fit

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan program SmartPLS 3.0 diperoleh nilai *R-Square* sebagai berikut:

- R-Square

Koefisien determinasi (*R-Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu model. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. Jika nilai $R^2 = 0,75$ maka model adalah substantansial (kuat), jika $R^2 = 0.50$ maka model adalah moderate (sedang), jika $R^2 = 0,25$ maka model adalah lemah (Juliandi, 2018).

Tabel 4.20

Koefisien Determinasi (*R-Square*)

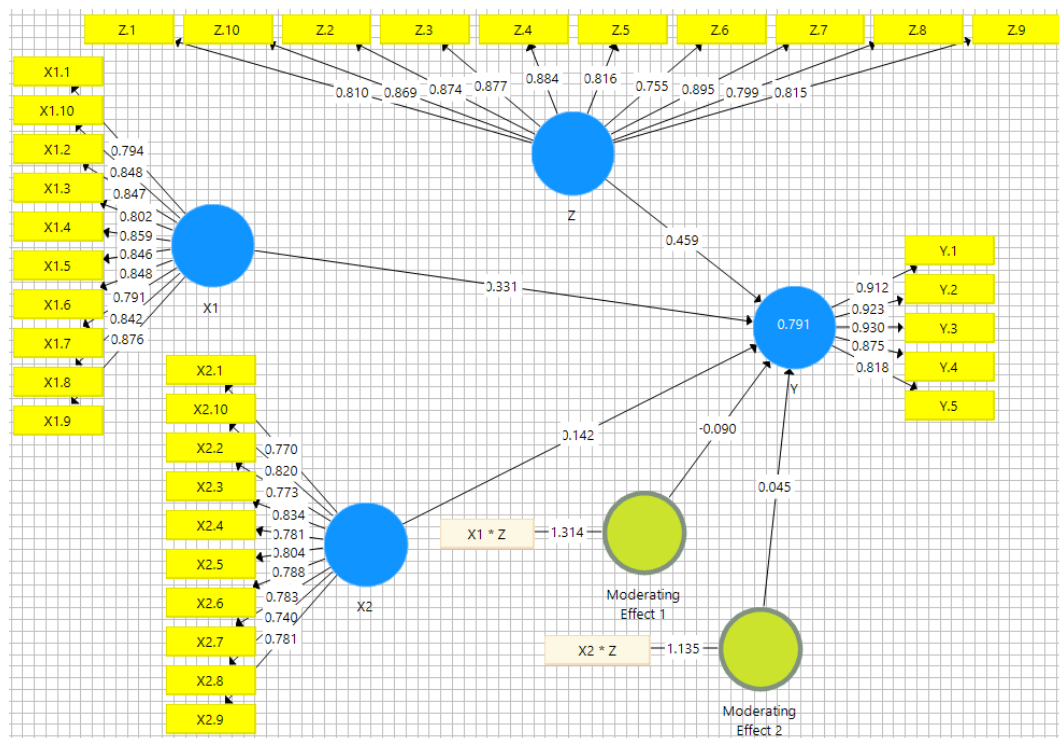
	R-Square	Adjust R-Square
Y	0.791	0.777

Sumber : Diolah dari data penelitian, 2021

Berdasarkan tabel 4.20 diperoleh hasil Adjust R-Square sebesar 0,791. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan variabel X_1 , X_2 , dan Z dalam menjelaskan variabel Y adalah sebesar 79,1%, maka kemampuan variabel X_1 , X_2 , dan Z dalam menjelaskan variabel Y dalam penelitian ini tergolong kuat.

Nilai tersebut menginterpretasikan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal pemerintah hanya mampu menjelaskan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sekitar 79,1%, selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

Besarnya pengaruh variabel X_1 , X_2 , dan Z dalam menjelaskan variabel Y yang dinilai berdasarkan perolehan nilai Adjust R-Square dapat kita lihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.6 R Square

- f^2 (f^2 -Square)

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relative dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen).

Perubahan nilai F-Square saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak yang substantive pada konstruk endogen.

Kriterianya jika nilai $f^2 = 0.02$ mengindikasikan efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, jika $f^2 = 0.15$ mengindikasikan efek yang sedang dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, jika $f^2 = 0.35$ mengindikasikan efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen (Hartono dan Abdillah 2015) (Cohen, 1988 dalam Juliandi 2018).

Tabel 4.21**F-Square**

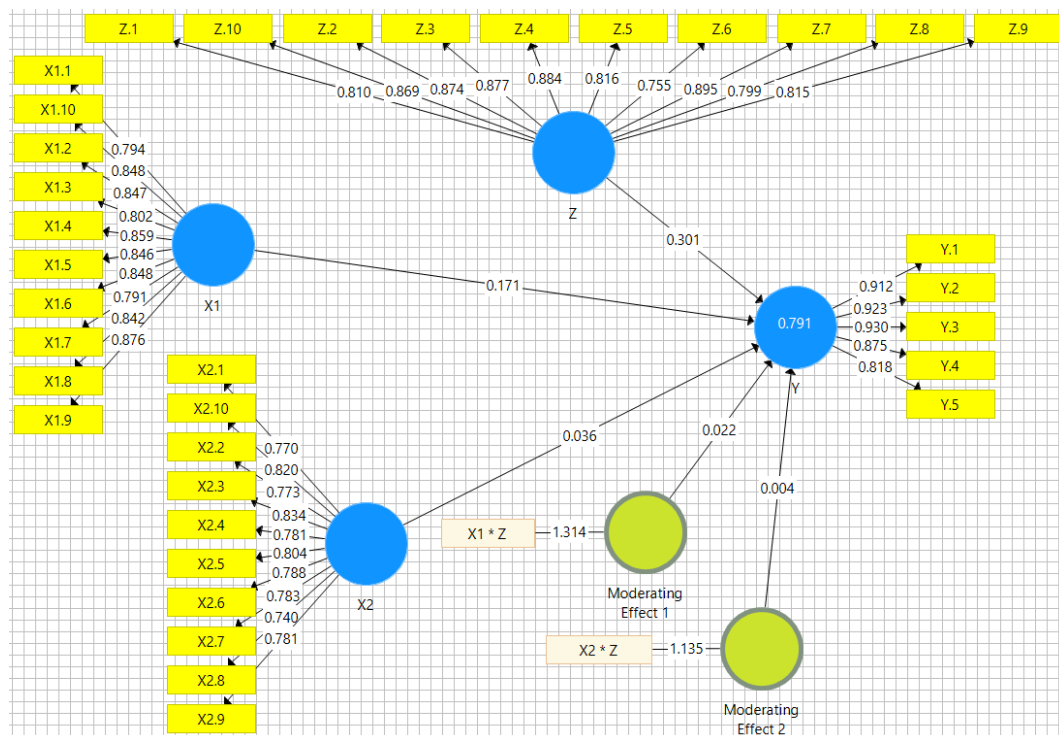
	Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Z)	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)
X1				0.171
X1*Z				0.022
X2				0.036
X2*Z				0.004
Z				0.301

Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan tabel 4.21 diatas dapat dilihat pengaruh f-suaqre variabel eksogen X1 terhadap Y adalah sebesar 0,171. Maka dampak dari varibael X1 terhadap X2 adalah sedang. Nilai f-Suare moderasi variabel X1*Z terhadap variabel Y adalah sebesar 0,022. Ini mengindikasikan dampak yang kecil dari variabel X1*Z terhadap variabel Y.

Nilai f-square variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,036. Hal ini mengindikasikan dampak yang kecil dari variabel X2 terhadap variabel Y. Nilai f-Suare moderasi variabel X2*Z terhadap variabel Y adalah sebesar 0,004. Ini mengindikasikan dampak yang kecil dari moderasi variabel X2*Z terhadap variabel Y. Nilai f-Suare variabel Z terhadap variabel Y adalah sebesar 0,301. Ini mengindikasikan dampak yang besar dari variabel Z terhadap variabel Y.

Besarnya pengaruh antar variabel eksogen terhadap variabel endogen dapat dilihat pada gambar 4.7 berikut:



Gambar 4.7 F – Square

4.2.3 Hasil Uji Hipotesis

Uji T

Berdasarkan olah data yang telah dilakukan, hasilnya dapat digunakan untuk menjawab hipotesis pada penelitian ini. Uji hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan melihat *t-statistics* dan nilai *p-values*. Hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima apabila $t\text{-statistic} > 2,02$ atau $P\text{-Values} < 0,05$. Berikut ini adalah uji hipotesis yang diperoleh dalam penelitian ini:

Tabel 4.22***T-Statistics dan P-Values***

Variabel	Ordinal Sampel	T-Statistics	P-Values	Hasil
Kejelasan Sasaran Anggaran (X1) => Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.331	2,560	0,005	Diterima
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2) => Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0.142	1,679	0,047	Diterima
X1*Z	-0.090	0,929	0,177	Ditolak
X2*Z	0.045	0,407	0,342	Ditolak

Sumber : Diolah dari data penelitian, 2025

Berdasarkan dari Tabel 4.22 menyatakan bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai 0,331 (positif). Hal ini mengindikasikan bahwa jika kejelasan sasaran anggaran meningkat sebesar 100, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 33,1. Nilai *P-value* $0,005 < 0,05$ menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis pertama “diterima”.

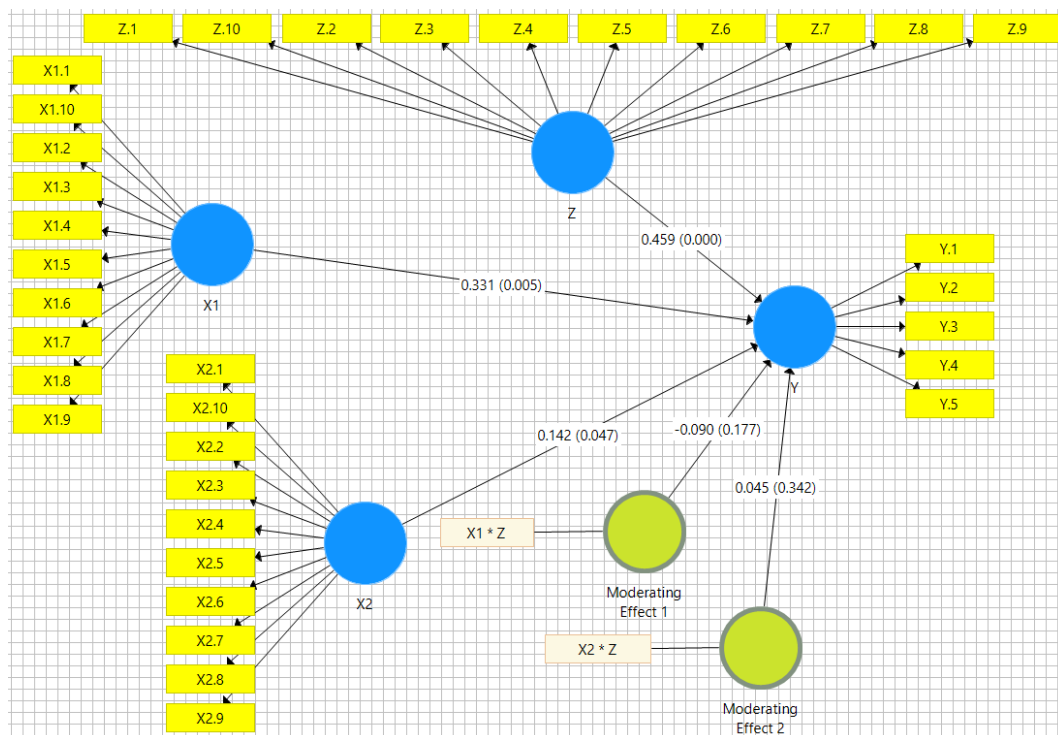
Berdasarkan dari Tabel 4.22 menyatakan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai 0,142 (positif). Hal ini mengindikasikan bahwa jika pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar 100, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 14,2. Nilai *P-value* $0,047 < 0,05$ menunjukkan bahwa

pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis kedua “diterima”.

Berdasarkan dari Tabel 4.22 menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sebagai pemoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada *moderate effect* 1 dengan nilai *p-value* sebesar $0,177 > 0,05$ menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memperkuat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka hipotesis ketiga “ditolak”.

Berdasarkan dari Tabel 4.22 menyatakan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sebagai pemoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada *moderate effect* 2 dengan nilai *p-value* sebesar $0,342 > 0,05$ menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memperkuat pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas pelaporan keuangan, maka hipotesis kelima “ditolak”.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini data kita lihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.8 Path Coefitients

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai 0,331 (positif). Hal ini mengindikasikan bahwa jika kejelasan sasaran anggaran meningkat sebesar 100%, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 33,1%. Nilai *P-value* $0,005 < 0,05$ menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Kejelasan Sasaran Anggaran diukur dengan empat indikator yaitu spesifik, terukur, menantang tapi realistis, berorientasi pada hasil akhir. Apabila semua unsur tersebut dilaksanakan dengan maksimal maka kejelasan sasaran anggaran telah dilakukan dengan baik. Penerapan Kejelasan Sasaran Anggaran bertujuan agar suatu institusi tertib dalam menjalankan seluruh proses kegiatan. Dengan adanya Kejelasan Sasaran Anggaran tersebut, memungkinkan adanya perlakuan konsisten, sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat.

Hasil penelitian terhadap variabel kejelasan sasaran anggaran diperoleh nilai outer loading masing-masing indikator. Indikator “berorientasi pada hasil akhir” memiliki nilai outer loading tertinggi sebesar 0,876 dan indikator “menantang tapi realistis” memiliki nilai outer loading terendah yaitu sebesar 0,791. Dengan demikian diketahui bahwa seluruh nilai outer loading pada variabel kejelasan sasaran anggaran lebih besar dari 0,7, sehingga variabel konstruk yang digunakan untuk mengukur kejelasan sasaran anggaran adalah baik.

Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena sasaran anggaran yang jelas membantu memastikan bahwa tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan dapat dipahami oleh pihak yang bertanggung jawab atas pencapaiannya. Dengan sasaran yang jelas, pelaksana anggaran lebih mudah memfokuskan kinerjanya, termotivasi untuk mencapai target, dan lebih mampu mempertanggungjawabkan hasil kerja mereka, baik keberhasilan maupun kegagalan, sehingga meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Kejelasan sasaran anggaran membantu dalam:

1. Memberikan informasi yang cukup dan terarah kepada pelaksana anggaran tentang tujuan yang harus dicapai sehingga mengurangi kebingungan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan program.
2. Mempermudah evaluasi kinerja karena sasaran yang jelas menjadi tolok ukur yang konkrit untuk menilai keberhasilan atau kegagalan program.
3. Mendorong pengelola instansi pemerintah untuk bekerja lebih optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan demi memenuhi akuntabilitas kepada publik dan pihak-pihak terkait.
4. Menunjang sistem pelaporan dan pengendalian yang efektif dalam organisasi sehingga mendukung transparansi dan akuntabilitas.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mulya, H.G. & Fauzihardani, E. (2022) yang menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selanjutnya Ningsih, S.W., dkk (2022) serta Azmi, F.N., dkk (2023) yang menyatakan bahwa Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan juga Mahapradnya, N.A., & Martadinata, I.P.H, (2023) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja. Oleh karena itu semakin baik kejelasan sasaran anggaran maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik juga.

Solusi atas permasalahan sasaran anggaran pada perangkat daerah yang belum dapat memastikan dan mengukur anggaran terhadap kinerja yang diharapkan antara lain:

- Peningkatan kualitas perumusan indikator kinerja

Sebagian perangkat daerah masih memiliki indikator kinerja yang tidak memenuhi kriteria yang baik, seperti kurang relevan dengan tujuan atau sulit diukur. Oleh karena itu, perlu perbaikan dalam merumuskan indikator kinerja yang jelas, terukur, relevan, serta berorientasi pada hasil (outcome) bukan hanya output.

- Penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran

Indikator kinerja harus selaras di semua dokumen seperti Renstra, RPJMD, dan aplikasi e-SAKIP agar target anggaran benar-benar mencerminkan pencapaian kinerja yang diharapkan. Hal ini mengurangi ketidakselarasan yang sering terjadi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

- Integrasi perencanaan dengan penganggaran berbasis kinerja

Penggunaan aplikasi yang mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran, seperti SIRA dan SILAKIP yang bisa mengunci jenis belanja sesuai output kegiatan, membantu mendorong perangkat daerah melakukan analisis yang serius terhadap indikator dan target kinerja sebelum pengajuan anggaran.

- Monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan dan berjenjang

Evaluasi triwulanan dan pengukuran kinerja yang mencakup semua jenjang eselon perlu dijalankan secara konsisten. Evaluasi tidak hanya fokus pada penyerapan anggaran tetapi juga pada keberhasilan pelaksanaan program terhadap sasaran yang telah ditetapkan.

- Penguatan komitmen dan pembinaan terhadap penerapan sistem akuntabilitas kinerja

Penguatan komitmen pimpinan perangkat daerah dan pembinaan berkelanjutan terhadap penerapan SAKIP dan anggaran berbasis kinerja diperlukan agar sasaran kinerja dan anggaran dapat terukur dan terpantau dengan baik.

- Perencanaan kinerja harus berorientasi pada hasil

Sasaran yang ditetapkan harus menggambarkan outcome yang diharapkan, sehingga anggaran dapat diarahkan untuk pencapaian kinerja tersebut dengan jelas dan terukur.

Dengan langkah - langkah ini, perangkat daerah dapat lebih memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat diukur kinerjanya dan benar-benar mendukung pencapaian sasaran yang diharapkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Untuk mengatasi masalah target anggaran dan pendapatan pemerintah daerah yang belum diperhitungkan secara realistis serta belum mempertimbangkan pencapaian tahun sebelumnya, beberapa solusi dapat diterapkan berikut ini:

1. Optimalisasi Penganggaran dan Perencanaan

Melakukan identifikasi dan pemetaan program prioritas berdasarkan dampak sosial, ekonomi, dan manfaat bagi masyarakat. Dan melakukan analisis cost-benefit untuk memastikan setiap program atau proyek memiliki dampak yang signifikan sehingga anggaran dialokasikan secara efisien dan efektif.

2. Memanfaatkan Data Historis dan Proyeksi yang Tepat

Menggunakan data realisasi anggaran dan pendapatan tahun sebelumnya sebagai acuan dalam perencanaan anggaran tahun berjalan. Dan menerapkan metode statistik seperti regresi linier sederhana atau metode proyeksi lainnya untuk menghitung estimasi anggaran dan pendapatan yang lebih realistis berdasarkan tren data sebelumnya.

3. Penguatan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

Meningkatkan dukungan teknologi informasi dan sistem yang memudahkan pengelolaan serta monitoring anggaran agar lebih transparan dan akurat. Dan bersinergi dengan instansi terkait dan melakukan evaluasi berkala terhadap pencapaian anggaran.

4. Evaluasi dan Penyesuaian RPJMD dan APBD

Perubahan dan penyesuaian rancangan APBD harus mempertimbangkan realisasi anggaran tahun sebelumnya dan kondisi ekonomi daerah agar target lebih realistis. Dan evaluasi berkelanjutan terhadap indikator kinerja daerah agar anggaran dan pendapatan dapat dikendalikan secara optimal sesuai visi dan misi pemerintah daerah.

Pendekatan - pendekatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan realisme target anggaran serta pendapatan daerah dengan dasar data valid dan analisis yang komprehensif, sekaligus mendukung efisiensi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.

Terdapat beberapa solusi untuk mengatasi rendahnya realisasi belanja daerah dan rendahnya realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta belum terlaksananya program-program daerah:

1. Peningkatan perencanaan dan penganggaran yang matang

Menyusun perencanaan anggaran dengan jadwal kegiatan yang pasti dan matang agar tidak terjadi revisi yang merugikan pelaksanaan program. Dan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja untuk memastikan penyaluran belanja daerah fokus pada prioritas dan memberikan hasil nyata.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM)

Memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada pengelola keuangan daerah dan pengadaan barang/jasa untuk meningkatkan kompetensi dan efisiensi kerja.

3. Percepatan penyelesaian administrasi dan laporan keuangan

Menyelesaikan administrasi dan laporan pertanggungjawaban tepat waktu agar siklus anggaran tidak tertahan. Serta mempercepat penetapan pejabat pengelolaan keuangan agar proses administrasi bisa berlanjut tanpa terhambat oleh pergantian tahun anggaran.

4. Monitoring dan evaluasi (monev) intensif

Meningkatkan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah daerah dan pusat, khususnya untuk daerah dengan realisasi rendah. Dan membentuk tim monitoring dan lakukan rapat koordinasi rutin yang melibatkan berbagai pihak terkait.

5. Penguatan leadership dan komitmen pimpinan daerah

Peran aktif kepala daerah dan kepala OPD sangat menentukan percepatan realisasi belanja dan PAD melalui arahan, rapat, dan pengawasan yang intensif.

6. Pemberian insentif dan sanksi

Memberikan reward kepada pejabat yang berhasil mendorong realisasi anggaran dan punishment kepada yang menghambat agar tercipta iklim kerja yang kondusif.

Penelitian menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja, terutama pada instansi pemerintah. Dengan sasaran yang jelas, pejabat dan pelaksana dapat merancang rencana dan melaksanakan program dengan lebih baik, sehingga kinerja dapat dipertanggungjawabkan secara efektif.

Dengan demikian memperbaiki kejelasan sasaran anggaran berfokus pada penetapan tujuan yang jelas dan terukur, partisipasi dalam penyusunan, didukung oleh sistem pelaporan dan pengendalian yang efektif, serta komunikasi yang baik antar pemangku kepentingan. Hal ini semua akan meningkatkan akuntabilitas kinerja secara signifikan.

Kejelasan sasaran anggaran membantu pengelola anggaran dalam mengontrol dan mengarahkan pelaksanaan kegiatan sehingga pencapaian kinerja dapat terukur dengan baik dan dapat dilaporkan secara sistematis. Ini merupakan dasar penting bagi terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan.

4.2.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah memiliki nilai 0,142 (positif). Hal ini mengindikasikan bahwa jika pemanfaatan teknologi informasi meningkat sebesar 100, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat sebesar 14,2. Nilai *P-value* $0,047 < 0,05$ menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pemanfaatan Teknologi Informasi diukur dengan empat indikator yaitu Penggunaan Software Aplikasi, Proses Akuntansi secara Komputerisasi, Laporan dan Manajerial yang Terintegrasi, Kemampuan Pegawai Mengoperasikan Komputer. Apabila semua unsur tersebut dilaksanakan dengan maksimal maka pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan dengan baik. Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat digunakan untuk mengelola data dan

informasi secara lebih efisien, meningkatkan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, sehingga pencapaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin meningkat.

Hasil penelitian terhadap variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi diperoleh nilai outer loading masing-masing indikator. Indikator “Proses Akuntansi secara Komputerisasi” memiliki nilai outer loading tertinggi sebesar 0,834 dan indikator “Kemampuan Pegawai Mengoperasikan Komputer” memiliki nilai outer loading terendah yaitu sebesar 0,740. Dengan demikian diketahui bahwa seluruh nilai outer loading pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi lebih besar dari 0,7 sehingga variabel konstruk yang digunakan untuk mengukur Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah baik.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena teknologi informasi membantu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan dan pelaporan kinerja. Teknologi informasi mempermudah proses administrasi, mempercepat pengolahan data, meningkatkan akurasi laporan keuangan, serta mendukung sistem pengendalian internal dan pelaporan yang lebih baik. Hal ini memungkinkan instansi pemerintah untuk lebih bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya dan hasil kerjanya, sehingga meningkatkan kepercayaan publik dan kualitas akuntabilitas kerjanya.

Beberapa poin penting yang mendasari pengaruh tersebut adalah:

- Peningkatan kecepatan dan akurasi data

Teknologi informasi memungkinkan pengolahan data yang cepat dan minim kesalahan sehingga laporan kinerja dapat dihasilkan dengan lebih tepat waktu dan andal.

- Dukungan terhadap sistem pengendalian internal

Teknologi informasi memperkuat pengendalian internal yang mencegah kesalahan dan kecurangan dalam pelaksanaan program pemerintah.

- Penguatan transparansi dan pelaporan

Dengan teknologi informasi, pelaporan kinerja menjadi lebih transparan dan mudah diakses oleh publik, sehingga mendorong akuntabilitas yang lebih tinggi.

- Peningkatan kompetensi aparatur

Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal sering kali didukung oleh peningkatan kompetensi aparatur pemerintah dalam mengoperasikan sistem berbasis teknologi, yang bersama-sama berkontribusi pada akuntabilitas kinerja.

Singkatnya, pemanfaatan teknologi informasi mendukung transparansi, efisiensi, dan pengendalian yang lebih baik dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, sehingga berpengaruh positif meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini berhasil mendukung penelitian yang dilakukan oleh Gebyvia Septiyani, dkk (2020) dan Deni Harianto, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, serta Pandu Haryanto dan Ratih (2023) yang menyatakan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh karena itu semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan semakin baik juga.

Pemanfaatan teknologi informasi (TI) sangat mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan berbagai cara sebagai berikut:

- Meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan organisasi melalui perubahan sistem manajemen dari tradisional ke kontemporer yang lebih berbasis teknologi. Hal ini memperbaiki ketepatan, konsistensi, keandalan, dan akurasi pelaporan serta proses kerja birokrasi.
- Mencegah terjadinya kecurangan dalam organisasi dengan sistem yang lebih transparan dan terotomatisasi sehingga pengawasan dan kontrol menjadi lebih efektif.
- Memudahkan penyajian laporan kinerja yang lebih jujur, objektif, transparan, dan akurat sebagai bukti pencapaian sasaran dan tujuan instansi sesuai visi misi.
- Mendukung keterbukaan informasi kepada publik sehingga masyarakat dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara lebih efektif melalui platform digital.
- Menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang lebih tepat dan cepat karena laporan keuangan dan kinerja yang berkualitas dapat dipahami dengan baik oleh pemakai laporan.

Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, pemanfaatan TI membantu menciptakan sistem informasi keuangan yang handal dan mendukung kompetensi aparatur pemerintah, sehingga akuntabilitas kinerja dapat meningkat secara signifikan. Regulasi pemerintah seperti Peraturan Pemerintah No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah mengatur pemanfaatan TI yang menjadi landasan bagi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan.

Secara umum, pemanfaatan teknologi informasi dalam instansi pemerintah membawa pengaruh positif yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja, memperkuat transparansi, efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintah sehingga tercipta sistem pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Untuk mengatasi masalah pemanfaatan teknologi informasi serta penggunaan aplikasi dalam pengukuran kinerja dan pengumpulan data yang belum optimal dan belum terintegrasi karena masing-masing perangkat daerah masih mempertahankan aplikasi sendiri, dapat dilakukan beberapa langkah strategis berikut:

- Membangun Sistem Integrasi Terpadu

Membangun satu sistem aplikasi integrasi yang dikoordinasi oleh satu instansi sebagai leading sector. Contohnya sistem yang berbasis web dan terintegrasi sehingga proses pelaporan dan pengukuran kinerja menjadi cepat, valid, dan akuntabel. Sistem ini dapat menghilangkan ego sektoral dan mendukung pelaporan terpadu.

- **Standarisasi dan Harmonisasi Aplikasi**

Melakukan standarisasi aplikasi yang digunakan di semua perangkat daerah agar data yang dikumpulkan dapat saling terhubung dan tidak redundan. Dengan standar yang sama, data kinerja dari berbagai instansi bisa langsung terintegrasi dan mudah dianalisis bersama.

- **Pelatihan dan Penguatan Kapasitas SDM**

Mengadakan pelatihan teknis berkelanjutan untuk aparatur daerah agar mampu menggunakan aplikasi dan teknologi secara optimal. Minimnya pelatihan teknis dan fasilitator lokal menjadi penghambat utama dalam pemanfaatan teknologi digital secara optimal.

- **Pengembangan Infrastruktur TIK yang Memadai**

Memastikan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang memadai dan stabil untuk seluruh perangkat daerah, termasuk jaringan internet yang cepat dan andal. Kualitas layanan internet yang buruk sering menjadi penghambat optimalisasi aplikasi.

- **Kebijakan Penguatan dan Pengawasan Penggunaan Aplikasi**

Mendorong kebijakan yang mengarusutamakan penggunaan aplikasi terintegrasi. Memberikan insentif bagi perangkat daerah yang berhasil terintegrasi dan menggunakan sistem secara efektif, serta melakukan evaluasi dan pengawasan ketat atas pemanfaatan teknologi.

- Sosialisasi dan Kolaborasi Antar Perangkat Daerah

Melakukan sosialisasi pentingnya integrasi aplikasi dan mendorong kolaborasi antar perangkat daerah agar menghilangkan sikap mempertahankan aplikasi sendiri-sendiri demi kepentingan sektoral.

Langkah-langkah ini dapat meningkatkan efisiensi, akurasi data, dan kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah secara terintegrasi sehingga menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan.

Agar pemanfaatan teknologi dapat optimal dan penggunaan aplikasi pada pemerintah daerah berjalan terintegrasi, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya, diperlukan pertama, ketersediaan sistem yang terpadu. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan terpadu, serta terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai dengan tingkat pemerintah pusat. Selanjutnya kedua, menempatkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar tujuan pemanfaatan teknologi informasi dapat tepat sasaran dan tepat guna.

Ketiga, harus dilakukan secara berkesinambungan. Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten. Jangan sampai hanya dijadikan "tren" saja, setelah itu diabaikan. Dalam penataan tatalaksana, penerapan digitalisasi diharapkan dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintah. Tidak hanya dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat,

namun juga tata kelola internal didalam pemerintahan. Agar efektif, efisien, dan kinerja pemerintahan meningkat.

4.2.3 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di Moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) sebagai pemoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada *moderate effect* 1 dengan nilai *p-value* sebesar $0,177 > 0,05$ menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memperkuat pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, pada variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, nilai outer loading tertinggi indikator pengukuran yang digunakan terdapat pada indikator “Informasi dan Komunikasi” yaitu sebesar 0,895 sedangkan perolehan nilai outer loading terendah pada indikator “Kegiatan Pengendalian” yaitu sebesar 0,755. Dengan demikian seluruh indikator pengukuran pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan variabel konstruk yang digunakan untuk mengukur pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di Moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah baik.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan menjadi variabel moderasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena SPIP berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta kinerja instansi pemerintah. Secara rinci, SPIP berfungsi sebagai mekanisme pengendalian yang memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien, meliputi keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Akan tetapi, pengujian di atas menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memperkuat pengaruh. Guna melihat variabel mana yang menyebabkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mampu memoderasi, berdasarkan pendapat responden, maka dicari indikator mana dari variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menunjukkan nilai outer loading yang rendah mendekati 0,7. Nilai yang rendah tersebut, mengindikasikan bahwa responden menganggap pada pertanyaan tersebut, pada variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang tidak mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pada variabel moderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, nilai outer loading terendah pertama, yang terdapat pada indikator kegiatan pengendalian, adalah pertanyaan terkait “bagaimana kehandalan pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan” dengan nilai outer loading sebesar 0,755. Hal ini mengindikasikan bahwa responden berpendapat kelemahan pada kehandalan pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan, menyebabkan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Demikian halnya pada nilai outer loading terendah kedua, yang terdapat pada indikator informasi dan komunikasi, adalah pertanyaan terkait “bagaimana ketersediaan saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan, dan bagaimana tindak lanjutnya” dengan nilai outer loading sebesar 0,799. Responden berpendapat kelemahan pada ketersediaan saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan, dan kelemahan bagaimana tindak lanjutnya, menyebabkan Sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Demikian halnya pada variabel Kejelasan Sasaran Anggaran, nilai outer loading terendah pertama, yang terdapat pada indikator menantang tapi realistis, adalah pertanyaan terkait “bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan kepentingnya” dengan nilai outer loading sebesar 0,791. Selanjutnya nilai outer loading terendah kedua, yang terdapat pada indikator spesifik, adalah pertanyaan terkait “bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membuat dan merincikan tugas-tugas yang harus dikerjakan” dengan nilai outer loading sebesar 0,794. Hal ini mengindikasikan bahwa responden berpendapat, kelemahan pada bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan kepentingnya, serta kelemahan pada bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membuat dan merincikan tugas-tugas yang harus dikerjakan,

menyebabkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Frensky Loppies, dkk (2023) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern merupakan variabel Predictor Moderator (Prediktor Moderasi) yang artinya variabel sistem pengendalian intern hanya berperan sebagai variabel Prediktor Moderasi karena tidak memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Analisis moderasi penting dalam SEM karena dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara variabel. Tanpa menganalisis moderasi, kita hanya akan melihat hubungan langsung antara X dan Y tanpa mempertimbangkan variabel ketiga yang dapat mempengaruhinya. Dengan memasukkan variabel moderator, kita dapat memahami konteks di mana hubungan tersebut terjadi dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Hal ini dapat membantu peneliti dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang fenomena yang sedang diteliti.

Meskipun analisis moderasi dapat memberikan wawasan yang berharga, ada beberapa batasan dan tantangan yang perlu diperhatikan:

1. Dibutuhkan sampel yang cukup besar untuk mendapatkan hasil yang dapat dipercaya.

2. Memilih variabel moderator yang tepat bisa menjadi tantangan, terutama jika tidak ada literatur yang jelas tentang hubungannya.
3. Menginterpretasikan hasil analisis moderasi bisa rumit dan membutuhkan pemahaman yang baik tentang statistik.
4. Terkadang efek moderasi mungkin tidak signifikan, sehingga hasil analisis tidak memberikan wawasan yang kuat.

Predictor Moderator (Prediktor Moderasi) dalam penelitian Bryan dan Haryadi E, 2018 berarti variabel moderasi yang berperan sebagai variabel independen atau prediktor dalam model hubungan yang dibentuk. Dengan kata lain, variabel ini memoderasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen, tetapi juga berfungsi sebagai variabel independen itu sendiri.

Variabel moderasi murni hanya memengaruhi kekuatan hubungan antara variabel independen dan dependen, tanpa berperan sebagai variabel independen itu sendiri. Dalam kasus moderator yang juga prediktor, variabel moderasi ini juga memiliki pengaruh langsung terhadap variabel dependen.

Dikarenakan sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi, Sistem Pengendalian Intern tersebut dapat tepat dijadikan sebagai variabel independen, seperti terlihat pada penelitian Pandu Haryanto dan Ratih (2023) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pelaporan, dan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan pengaruh positif dan signifikan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mengatasi kelemahan sistem pengendalian intern serta ketidakpahaman ketentuan dalam pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis berikut:

1. Melakukan Audit Sistem Pengendalian Internal

Audit internal dilakukan untuk menginventarisasi semua komponen pengendalian (hardware, software, kebijakan, prosedur, dan SDM); dan mendokumentasi kebijakan dan prosedur pengendalian dibuat sebagai acuan sistem; serta Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan memberikan rekomendasi mitigasi.

2. Meningkatkan Pelatihan dan Budaya Kepatuhan

Memberikan pelatihan berkelanjutan agar seluruh pihak memahami dan mampu melaksanakan sistem pengendalian dan ketentuan keuangan negara secara benar. Serta membangun budaya kepatuhan untuk mengurangi kesalahan manusia dalam pengelolaan.

3. Pengawasan dan Penegakan Aturan

Meningkatkan pengawasan pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi agar tidak terjadi kelemahan pengendalian; serta menertibkan aturan dan penerapan standar operasional prosedur yang jelas serta konsisten.

4. Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Negara

Menyempurnakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan; dan mengatur mekanisme pelaksanaan anggaran, termasuk penerimaan dan pengeluaran agar transparan dan akuntabel; serta melakukan sosialisasi

dan pembinaan agar ketentuan pengelolaan keuangan diterapkan dengan baik di semua tingkatan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menggunakan software pengendalian intern yang dapat mengotomatiskan proses, menyebarkan pembaruan kepatuhan secara real-time, dan mempercepat identifikasi kelemahan sistem.

6. Transparansi dan Akuntabilitas

Menjalankan lima tahapan pengelolaan keuangan negara secara transparan dan akuntabel, meliputi perencanaan, pelaksanaan, akuntansi, pengawasan internal, dan pemeriksaan eksternal. Serta peningkatan laporan keuangan yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung pengawasan.

Dengan langkah-langkah tersebut, kelemahan di sistem pengendalian intern dan kurangnya pemahaman ketentuan pengelolaan keuangan dapat diminimalisir, sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Di dalam penelitian (Dahrani et al., 2022) , menyatakan bahwa optimalisasi laporan keuangan tidak bisa dipisahkan dari cara pengelolaan keuangan yang dilakukan secara efisien dan efektif, yang akan berdampak positif terhadap peningkatan performa dan daya saing bisnis (Puspitaningtyas, 2017). Pengelolaan keuangan mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pengadaan, pembiayaan, dan pengelolaan aset dengan berbagai tujuan yang lebih besar (Kasmir, 2010) untuk suatu usaha. Di sisi lain, untuk menilai keberhasilan

pengelolaan keuangan dapat dilihat dari aspek kompetensi (Hanifa, dkk., 2016), keterbukaan dan aspek agensi (Nurhadianto dan Khamisah, 2019), serta akuntabilitas (Nafidah dan Anisa, 2017).

4.2.4 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di Moderasi Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah sebagai pemoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada *moderate effect* 2 dengan nilai *p-value* sebesar $0,342 > 0,05$ menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memperkuat pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, sama seperti di atas, pada variabel Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, nilai outer loading tertinggi indikator pengukuran yang digunakan terdapat pada indikator “Informasi dan Komunikasi” yaitu sebesar 0,895 dan perolehan nilai outer loading terendah pada indikator “Kegiatan Pengendalian” yaitu sebesar 0,755. Dengan demikian seluruh indikator pengukuran pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memiliki nilai outer loading lebih besar dari 0,7. Hal ini menunjukkan variabel konstruk yang digunakan untuk mengukur pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di Moderasi Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah adalah baik.

Pada variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi, nilai outer loading terendah pertama, yang terdapat pada indikator Kemampuan Pegawai Mengoperasikan Komputer, adalah pertanyaan terkait “bagaimana kemampuan aparatur mengoperasikan komputer secara baik” dengan nilai outer loading sebesar 0,740. Selanjutnya nilai outer loading terendah kedua, yang terdapat pada indikator Penggunaan Software Aplikasi, adalah pertanyaan terkait “bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggunakan software dan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah” dengan nilai outer loading sebesar 0,770. Hal ini mengindikasikan bahwa responden berpendapat, kelemahan pada bagaimana kemampuan aparatur mengoperasikan komputer secara baik, serta kelemahan pada bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggunakan software dan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah, menyebabkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mampu memoderasi pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil pengujian hipotesis yang menunjukkan hasil pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mampu memoderasi hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana hasil penelitian ini mirip dengan penelitian yang dilakukan oleh Asri, S.R. & Jaeni (2023) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak mampu memperkuat Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan padahal Sistem Pengendalian Intern mampu memperkuat Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

Dikarenakan sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi, Pengendalian Intern tersebut dapat pula tepat dijadikan sebagai variabel intervening, seperti terlihat pada penelitian Sanusi dan Padlah Riyadi (2023) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening Pada SKPD Pemerintah Kotabaru. Demikian juga penelitian Sanusi, dkk (2022) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dengan Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening.

Sebagai variabel intervening pada penelitian tersebut, Pengendalian internal memengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja, pengendalian internal mampu memediasi pengaruh antara kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Pengendalian internal menjadi perantara pengaruh sistem pelaporan memengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja, Sanusi dan Padlah (2023).

Selanjutnya Sanusi dkk (2022) Pengendalian internal memengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Pengendalian internal menjadi perantara pengaruh kejelasan sasaran anggaran memengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Pengendalian internal menjadi perantara pengaruh sistem pelaporan memengaruhi bermakna bagi akuntabilitas kinerja pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Untuk mengatasi tingkat capaian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang belum mencapai baik akibat belum seluruh indikator kinerja memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), dapat dilakukan beberapa langkah strategis.

Pertama, perbaiki penyusunan indikator kinerja agar sesuai dengan kriteria SMART secara menyeluruh, dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memastikan indikator benar-benar relevan dan terukur. Kedua, lakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi aparatur pemerintah untuk memahami dan mengimplementasikan aspek SMART dalam penyusunan indikator kinerja. Ketiga, lakukan evaluasi dan pemantauan rutin terhadap indikator kinerja yang sudah ditetapkan agar tetap akuntabel dan dapat diperbaiki sesuai kebutuhan.

Selain itu, integrasi program dan kegiatan antar perangkat daerah perlu diarahkan pada penggunaan data yang valid dan terkini, serta melibatkan partisipasi masyarakat agar pembangunan tepat sasaran. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelayanan publik dan peningkatan koordinasi antar unit juga penting untuk mendorong inovasi dan menciptakan laporan kinerja yang akurat dan transparan. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara berkala dapat menjadi alat ukur tambahan untuk mengukur keberhasilan kinerja pelayanan publik dan akuntabilitas. Terakhir, peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai evaluator pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja perlu diperkuat melalui peningkatan kualitas dan pemahaman yang komprehensif tentang SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Dengan demikian, perbaikan dalam penyusunan indikator SMART, peningkatan kapasitas aparatur, penguatan mekanisme evaluasi dan pengawasan, serta keterlibatan masyarakat, menjadi langkah kunci mengatasi capaian akuntabilitas kinerja yang belum optimal pada instansi pemerintah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) studi di Pemerintah Kota Binjai, adalah sebagai berikut :

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa jika Kejelasan Sasaran Anggaran meningkat, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga akan meningkat pada Pemerintah Kota Binjai. Dimana dengan sasaran anggaran yang jelas, akan memudahkan Perangkat Daerah dalam merencanakan serta menggunakan dana selama periode tertentu.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa jika Pemanfaatan Teknologi Informasi meningkat, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah juga akan meningkat pada Pemerintah Kota Binjai. Dimana, dengan pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal, akan memudahkan Perangkat Daerah, serta mempercepat personil dalam melakukan pekerjaan .

3. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mampu memperkuat hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memoderasi hubungan antara kejelasan sasaran anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Kota Binjai.
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak mampu memperkuat hubungan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tidak memoderasi hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) pada Pemerintah Kota Binjai.

5.2 Saran

Berasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat dari kejelasan sasaran anggaran yang disusun oleh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Binjai belum diperhitungkan secara realistis dan belum mempertimbangkan pencapaian tahun sebelumnya. Dalam hal ini diharapkan Perangkat Daerah (OPD), dapat menetapkan sasaran anggaran berdasarkan tingkat kesulitan dan kepentingannya, agar anggaran dapat memberikan efek yang maksimal bagi pencapaian tujuan organisasi.

2. Melihat dari pemanfaatan teknologi informasi serta penggunaan aplikasi belum optimal dan belum terintegrasi serta mempertahankan masing-masing aplikasi yang berbeda. Dalam hal ini diharapkan Perangkat Daerah (OPD) dapat menggunakan sistem informasi yang terinteragrasi termasuk dalam pembuatan laporan akuntansi dan laporan manajerial (laporan kinerja).
3. Melihat dari sistem pengendalian intern pemerintah tidak mampu memoderasi variabel kejelasan sasaran anggaran dan variabel pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka sistem pengendalian intern pemerintah lebih tepat dijadikan sebagai variabel independen (variabel bebas) yang mampu mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
4. Melihat dari sistem pengendalian intern pemerintah seringkali memiliki kelemahan serta ketidakpatuhan terhadap ketentuan. Dalam hal ini diharapkan Perangkat Daerah (OPD) dapat menyediakan saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan, dan dapat merumuskan tindak lanjut dan tindakan yang sesuai.
5. Melihat dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang belum sepenuhnya berorientasi hasil (outcome) serta hasil pembangunan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat luas. Dalam hal ini diharapkan perangkat daerah menghasilkan dan melaksanakan semakin banyak program atau kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat.

6. Peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak terlepas dari sistem pengendalian internal pemerintah yang digunakan. Suatu sistem pengendalian internal pemerintah dapat melakukan pengontrolan lebih baik sehingga tujuan dari organisasi dapat tercapai, dan dengan meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka diharapkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin meningkat pula.

Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi. Namun diharapkan untuk lebih menyesuaikan penggunaan faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk menggunakan variabel sistem pengendalian intern pemerintah menjadi variabel independen, serta indikator-indikator pengukuran yang digunakan sehingga pembuktian terhadap hipotesis penelitian dapat tercapai dan hasil penelitian lebih sempurna.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Aditya Fauzy dkk. (2020). *Pemanfaatan Teknologi Informasi Di Berbagai Sektor Pada Masa Society 5.0*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Cetakan Pertama: 2023, ISBN: 978-623-09-1918-3 (PDF).
- Anisa, I. N., & Haryanto, H. (2022). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di masa pandemi covid-19. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 9(1), 77–85. <https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p077>
- Azmi, F. N., Yaya, R., & Tumirin, T. (2023). Determinan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Empiris Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Manajerial*, 10(02), 198. <https://doi.org/10.30587/jurnalmanajerial.v10i02.4619>
- Cholifah, S., & Jaeni, J. (2023). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Managerial Dengan Satuan Pengawasan Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Semarang 2022). *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 6(2), 1702–1714. <https://doi.org/10.31539/costing.v6i2.5412>
- Dahrani, D., Saragih, F., & Ritonga, P. (2022). Financial Management Model Based on Financial Literacy and Financial Inclusion: A Study on MSMEs in Binjai City. *Owner: Accounting Research & Journal*, 6(2), 1509–1518.
- Harianto, D., Kennedy, & Zarefar, A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (Akip) (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 6(1), 122–139. <https://doi.org/10.29303/jaa.v6i1.111>
- Haryanto, P., & Andayan, R. T. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pelaporan, dan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Seminar Nasional Perbanas Institute*, 3(December 2023), 70–84. <https://journal.perbanas.id/index.php/psn/issue/view/55>
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Kompetensi, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 4(2), 419–433. <https://doi.org/10.31539/costing.v4i2.1965>
- Kajian, J., Terkini, B., Septiyani, G., Taufik, T., & Julita, J. (2020). *Artikel 2 Akuntabilitas sistem pelaporan keuangan pekanbaru*. 2, 183–200.

- Lestari, P. A., & Aliamin, A. (2023). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Aceh Dan Faktor Yang Mempengaruhinya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 8(3), 433–441. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v8i3.26455>
- Loppies, F., Gasperz, J., & Limba, F. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Manajemen Indonesia (JKEMI)*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61079/jkemi.v1i1.10>
- Mujennah, M., Safriansyah, S., Firdaus, I., & Fatimah, S. (2022). Dampak Accrual Basic dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. *Owner*, 6(3), 3065–3076. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006>
- Mulya, H. G., & Fauzihardani, E. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(1), 192–212. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i1.463>
- Ningsih, S. W., Yusuf, M., & Andayani, T. D. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *The 16th University Research Colloquium 2022*, 863–880. <http://repository.urecol.org/index.php/proceeding/article/view/2392>
- Nyoman Agus Mahapradnya, & I Putu Hendra Martadinata. (2023). Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban, Partisipasi Anggaran, Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Hotel Berbintang Di Kabupaten Buleleng. *Vokasi : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2), 118–129. <https://doi.org/10.23887/vjra.v12i2.62143>
- Sanusi, S., Hayat, A., & Rosari, N. (2022). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening. *Inovatif: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, Bisnis Digital Dan Kewirausahaan*, 1(2), 126–148. <https://doi.org/10.55983/inov.v1i2.103>
- Sanusi, S., & Riyadi, P. (2023). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja dengan Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kotabaru. *Al-KALAM : JURNAL KOMUNIKASI, BISNIS DAN MANAJEMEN*, 10(2), 19. <https://doi.org/10.31602/al-kalam.v10i2.10334>
- Theodora, O. N. B. T., & Susilowati, E. (2023). Pengaruh Sistem Pelaporan, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya. *Mufakat: Jurnal Ekonomi, Manaje*, 2(6), 385–395.

Pemerintah Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Pemerintah Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Pemerintah Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Pemerintah Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Indonesia. (2022). Surat Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor 191 b/ S/ XVIII.MDN/ 05/ 2023 Perihal Laporan Hasil Pemerintah Kota binjai Tahun Anggaran (TA) 2022

Pemerintah Indonesia. (2023). Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Susunan organisasi Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Pemerintah Indonesia. (2023). Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Apratur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/ 181/ AA.05/ 2023 Perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023

LAMPIRAN I : TABULASI DATA PENELITIAN

	X1 .1	X1 .2	X1 .3	X1 .4	X1 .5	X1 .6	X1 .7	X1 .8	X1 .9	X1 .10	X2 .1	X2 .2	X2 .3	X2 .4	X2 .5	X2 .6	X2 .7	X2 .8	X2 .9	X2 .10	Z. 1	Z. 2	Z. 3	Z. 4	Z. 5	Z. 6	Z. 7	Z. 8	Z. 9	Z. 10	Y. 1	Y. 2	Y. 3	Y. 4	Y. 5	
1	4	4	3	3	3	2	2	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	3	3	3	4	2	4	4	3	4	3	1	3	2	2	2	4	2	3	
2	4	5	4	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4		
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	2	2	2	4	4	3	2	3	3	3	3	3	3	
6	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	
7	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	
8	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	3	4	4	4	4	5	4	4
9	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	
10	3	3	3	2	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	3	3	4	4	2
11	4	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
12	4	3	4	3	4	3	3	3	4	4	5	5	4	4	4	4	3	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5
13	3	3	3	3	4	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	4	3	4	2
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	
15	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
16	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	2	
17	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	
18	5	5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	3	3	4	4	4	4	4	
19	4	5	5	4	4	4	3	3	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	4	4	4	4	4	5	4	3	4	3	4	
20	4	4	3	4	3	2	3	3	3	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	2	2	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3
21	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	
22	4	4	5	5	4	5	4	4	5	5	3	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
23	4	5	4	4	5	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3
24	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	4	4	4	4	5	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
26	4	4	2	4	4	3	1	3	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	2	2	3	3	4	5	3	2	3	3	4	4	4	4	4	
27	4	4	3	4	4	5	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	4	3	2	3	3	4	4	4	4	4	
28	3	4	4	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
29	4	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	3	4	3	3	2	3	3	3	1	
30	5	2	5	3	5	5	3	4	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	2	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	3	3	
31	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
33	4	4	5	3	5	3	3	5	4	4	4	3	5	4	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	3	5	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3
35	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
36	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4
38	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	2	2	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	3	3
39	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	2	2	2	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
40	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	2	3	2
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	5	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3
42	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
43	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4
44	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	1	1	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
45	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

LAMPIRAN II : PENGOLAHAN DATA

Outer Loadings

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
X1 * Z <- Moderating Effect 1	1.314	1.299	0.098	13.476	0.000
X1.1 <- X1	0.794	0.789	0.052	15.228	0.000
X1.10 <- X1	0.848	0.847	0.033	26.057	0.000
X1.2 <- X1	0.847	0.846	0.042	20.166	0.000
X1.3 <- X1	0.802	0.797	0.049	16.202	0.000
X1.4 <- X1	0.859	0.857	0.030	28.574	0.000
X1.5 <- X1	0.846	0.841	0.038	22.531	0.000
X1.6 <- X1	0.848	0.844	0.035	24.186	0.000
X1.7 <- X1	0.791	0.791	0.053	14.892	0.000
X1.8 <- X1	0.842	0.838	0.034	24.650	0.000
X1.9 <- X1	0.876	0.876	0.027	32.828	0.000
X2 * Z <- Moderating Effect 2	1.135	1.122	0.101	11.236	0.000
X2.1 <- X2	0.770	0.767	0.052	14.941	0.000
X2.10 <- X2	0.820	0.817	0.042	19.569	0.000
X2.2 <- X2	0.773	0.771	0.055	13.936	0.000
X2.3 <- X2	0.834	0.831	0.048	17.521	0.000
X2.4 <- X2	0.781	0.775	0.065	12.011	0.000
X2.5 <- X2	0.804	0.800	0.068	11.835	0.000
X2.6 <- X2	0.788	0.787	0.056	14.162	0.000
X2.7 <- X2	0.783	0.779	0.056	14.055	0.000
X2.8 <- X2	0.740	0.737	0.054	13.593	0.000
X2.9 <- X2	0.781	0.779	0.046	17.080	0.000
Y.1 <- Y	0.912	0.910	0.026	34.411	0.000
Y.2 <- Y	0.923	0.921	0.019	47.540	0.000
Y.3 <- Y	0.930	0.930	0.025	37.839	0.000
Y.4 <- Y	0.875	0.873	0.037	23.706	0.000
Y.5 <- Y	0.818	0.819	0.035	23.433	0.000
Z.1 <- Z	0.810	0.807	0.048	16.977	0.000
Z.10 <- Z	0.869	0.870	0.035	25.171	0.000
Z.2 <- Z	0.874	0.872	0.030	29.545	0.000
Z.3 <- Z	0.877	0.877	0.031	27.992	0.000
Z.4 <- Z	0.884	0.882	0.027	32.676	0.000
Z.5 <- Z	0.816	0.815	0.036	22.614	0.000
Z.6 <- Z	0.755	0.754	0.049	15.342	0.000
Z.7 <- Z	0.895	0.893	0.026	33.862	0.000
Z.8 <- Z	0.799	0.797	0.049	16.156	0.000
Z.9 <- Z	0.815	0.815	0.053	15.269	0.000

Cross Loadings

	Moderating Effect 1	Moderating Effect 2	X1	X2	Y	Z
X1 * Z	1.000	0.797	-0.257	-0.160	-0.299	-0.247
X1.1	-0.273	-0.239	0.794	0.595	0.597	0.582
X1.10	-0.184	-0.162	0.848	0.669	0.706	0.685
X1.2	-0.250	-0.192	0.847	0.648	0.719	0.638
X1.3	-0.257	-0.122	0.802	0.546	0.637	0.626
X1.4	-0.209	-0.171	0.859	0.683	0.753	0.662
X1.5	-0.222	-0.148	0.846	0.633	0.665	0.627
X1.6	-0.201	-0.094	0.848	0.544	0.703	0.654
X1.7	-0.145	-0.088	0.791	0.521	0.638	0.680
X1.8	-0.183	-0.125	0.842	0.594	0.669	0.693
X1.9	-0.235	-0.204	0.876	0.683	0.710	0.695
X2 * Z	0.797	1.000	-0.185	-0.145	-0.172	-0.102
X2.1	-0.127	-0.190	0.567	0.770	0.531	0.447
X2.10	-0.150	-0.089	0.622	0.820	0.672	0.690
X2.2	-0.094	-0.159	0.637	0.773	0.567	0.508
X2.3	-0.175	-0.157	0.674	0.834	0.568	0.547
X2.4	-0.161	-0.207	0.604	0.781	0.518	0.571
X2.5	-0.067	-0.140	0.539	0.804	0.525	0.589
X2.6	-0.039	-0.012	0.491	0.788	0.575	0.554
X2.7	-0.211	-0.121	0.559	0.783	0.615	0.629
X2.8	-0.126	-0.040	0.509	0.740	0.560	0.602
X2.9	-0.099	-0.051	0.573	0.781	0.638	0.665
Y.1	-0.292	-0.160	0.757	0.719	0.912	0.799
Y.2	-0.308	-0.176	0.746	0.657	0.923	0.739
Y.3	-0.279	-0.170	0.794	0.727	0.930	0.807
Y.4	-0.246	-0.162	0.674	0.604	0.875	0.767
Y.5	-0.201	-0.093	0.661	0.569	0.818	0.661
Z.1	-0.176	-0.040	0.722	0.608	0.685	0.810
Z.10	-0.184	-0.043	0.654	0.641	0.756	0.869
Z.2	-0.240	-0.065	0.654	0.539	0.692	0.874
Z.3	-0.116	-0.033	0.643	0.615	0.687	0.877
Z.4	-0.163	-0.058	0.653	0.609	0.694	0.884
Z.5	-0.260	-0.099	0.647	0.656	0.707	0.816
Z.6	-0.289	-0.223	0.599	0.675	0.714	0.755
Z.7	-0.242	-0.131	0.755	0.715	0.809	0.895
Z.8	-0.228	-0.136	0.601	0.541	0.644	0.799
Z.9	-0.169	-0.026	0.639	0.607	0.712	0.815

Average Variance Extracted (AVE)

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Moderating Effect 1	1.000	1.000	0.000		
Moderating Effect 2	1.000	1.000	0.000		
X1	0.698	0.696	0.047	14.741	0.000
X2	0.621	0.619	0.048	13.029	0.000
Y	0.797	0.795	0.033	24.492	0.000
Z	0.707	0.706	0.036	19.422	0.000

Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)

Confidence Intervals

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	5.0%	95.0%
Moderating Effect 2 -> Moderating Effect 1	0.797	0.784	0.637	0.884
X1 -> Moderating Effect 1	0.265	0.270	0.069	0.487
X1 -> Moderating Effect 2	0.190	0.214	0.063	0.429
X2 -> Moderating Effect 1	0.164	0.193	0.071	0.371
X2 -> Moderating Effect 2	0.153	0.197	0.078	0.380
X2 -> X1	0.777	0.773	0.672	0.855
Y -> Moderating Effect 1	0.307	0.312	0.079	0.554
Y -> Moderating Effect 2	0.176	0.200	0.043	0.407
Y -> X1	0.861	0.858	0.743	0.942
Y -> X2	0.781	0.777	0.676	0.862
Z -> Moderating Effect 1	0.252	0.266	0.083	0.496
Z -> Moderating Effect 2	0.104	0.166	0.068	0.334
Z -> X1	0.821	0.817	0.682	0.919
Z -> X2	0.779	0.776	0.687	0.849
Z -> Y	0.894	0.891	0.815	0.953

Cronbach's Alpha

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Moderating Effect 1	1.000	1.000			
Moderating Effect 2	1.000	1.000			
X1	0.952	0.950	0.011	82.956	0.000
X2	0.932	0.930	0.014	66.297	0.000
Y	0.936	0.934	0.013	69.668	0.000
Z	0.953	0.953	0.008	112.556	0.000

Path Coefficients

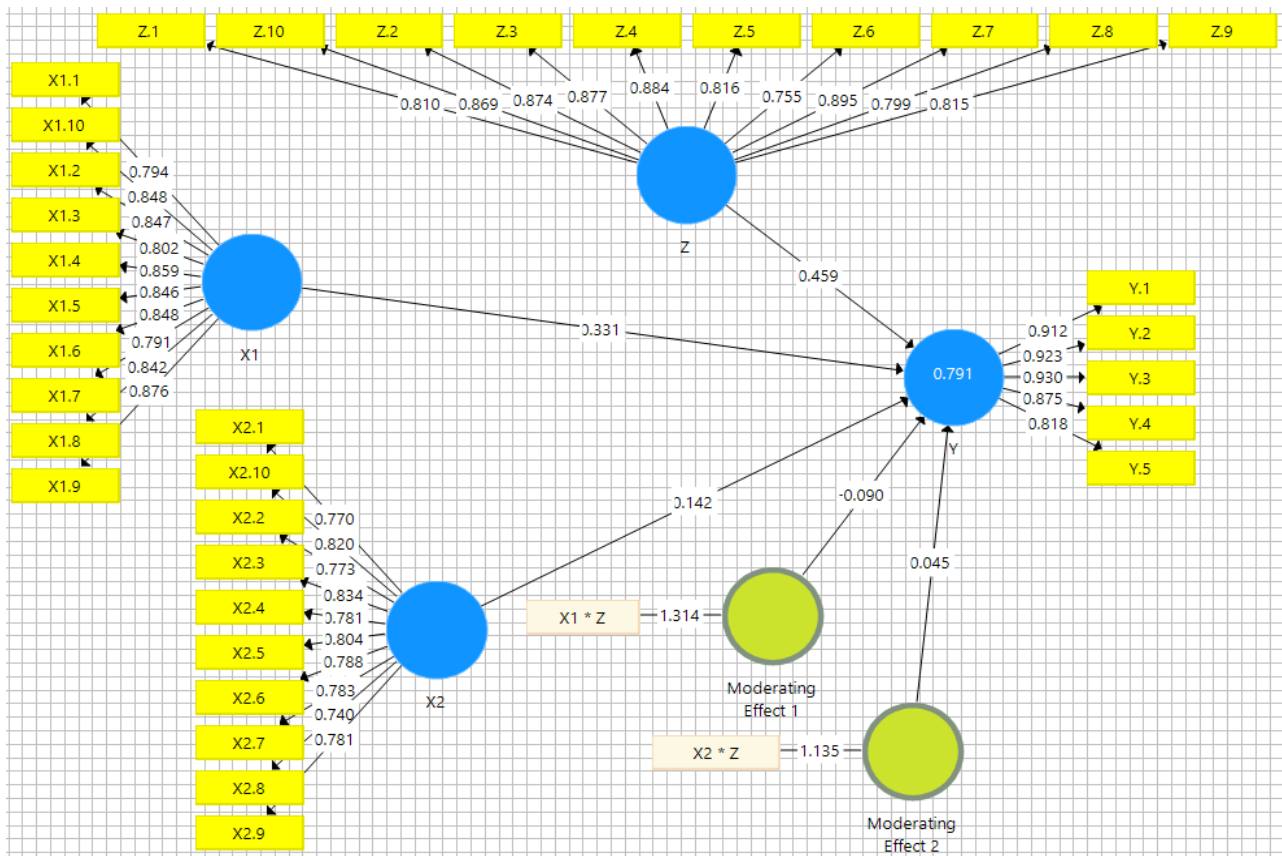
Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Moderating Effect 1 -> Y	-0.090	-0.079	0.097	0.929	0.177
Moderating Effect 2 -> Y	0.045	0.033	0.110	0.407	0.342
X1 -> Y	0.331	0.358	0.129	2.560	0.005
X2 -> Y	0.142	0.141	0.085	1.679	0.047
Z -> Y	0.459	0.433	0.124	3.701	0.000

R Square

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

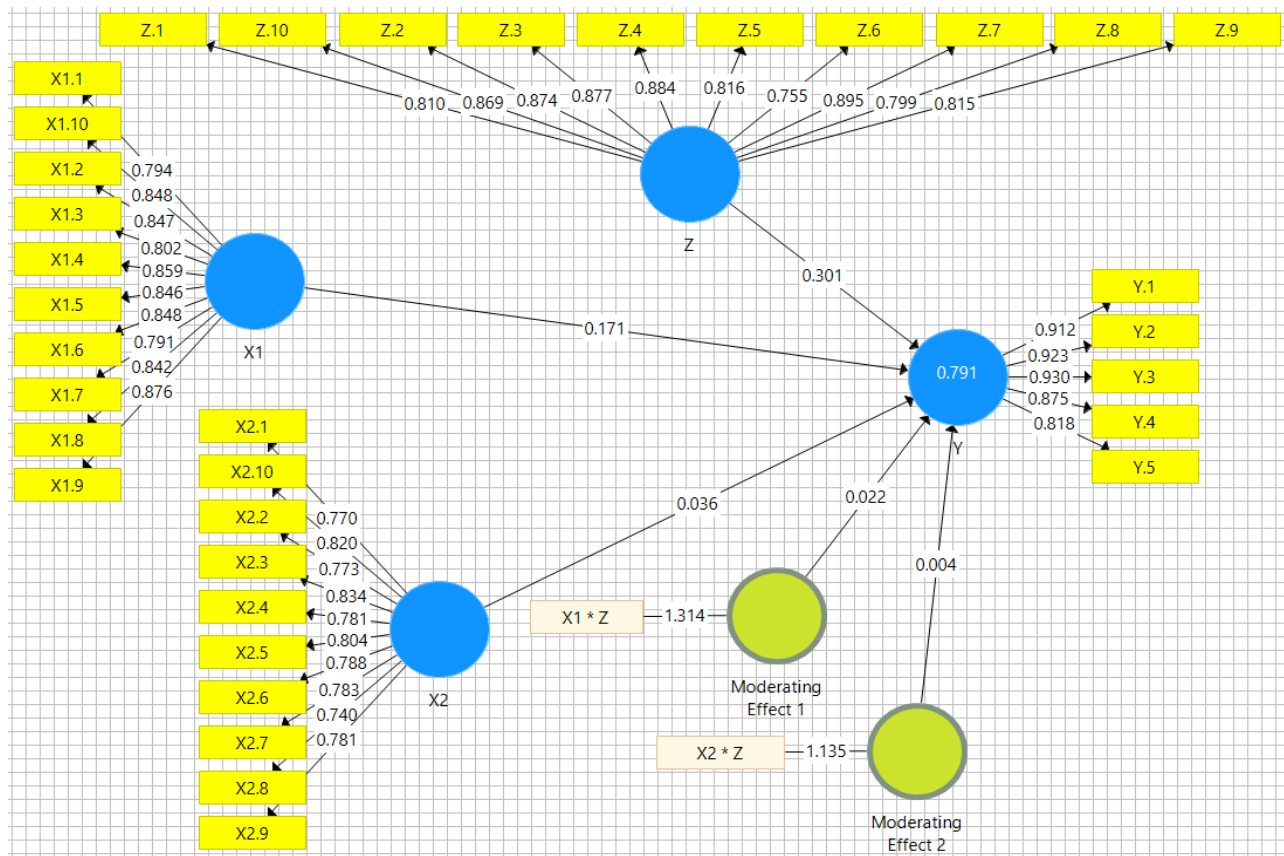
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Y	0.791	0.807	0.049	16.126	0.000



f Square

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

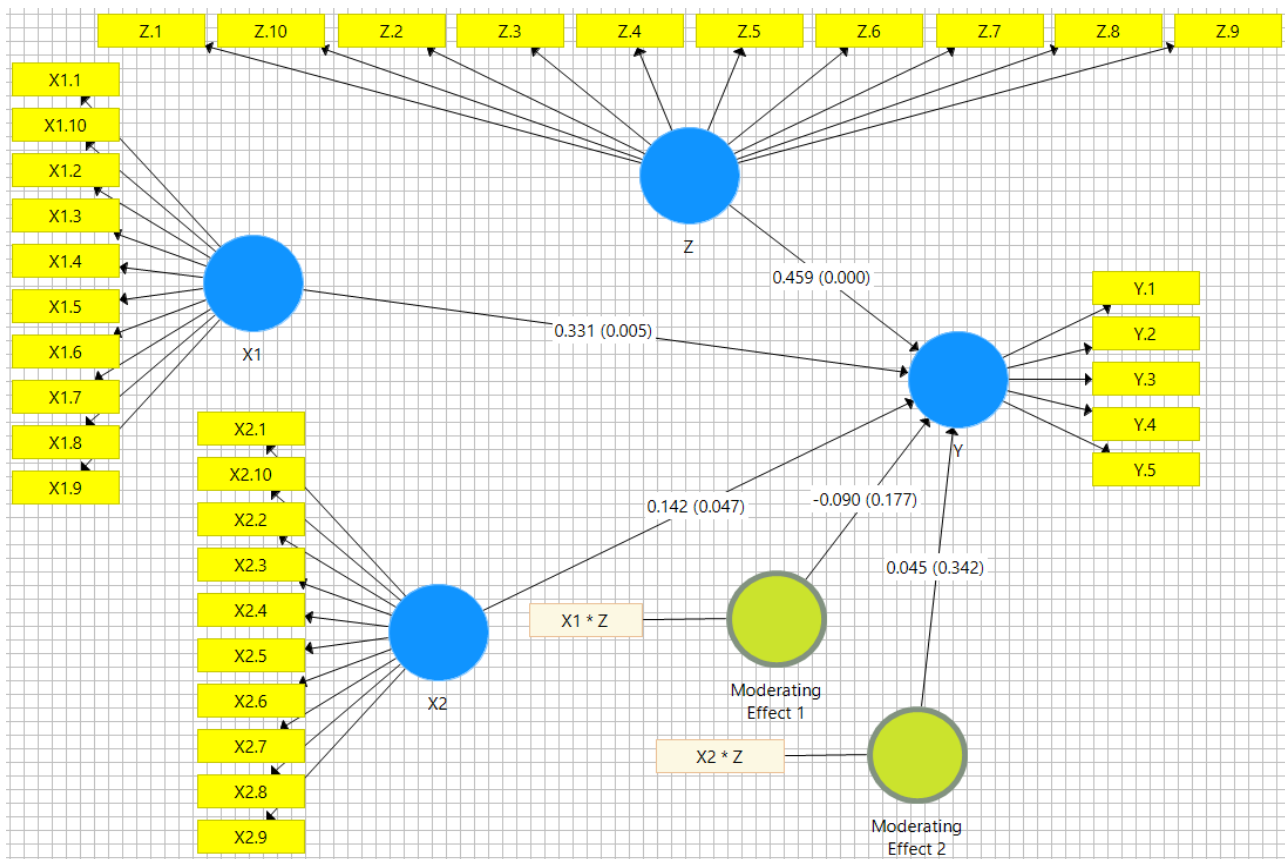
	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Moderating Effect 1 -> Y	0.022	0.043	0.058	0.370	0.356
Moderating Effect 2 -> Y	0.004	0.027	0.041	0.100	0.460
X1 -> Y	0.171	0.214	0.131	1.309	0.095
X2 -> Y	0.036	0.052	0.053	0.681	0.248
Z -> Y	0.301	0.319	0.210	1.438	0.075



Path Coefficients

Mean, STDEV, T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Moderating Effect 1 -> Y	-0.090	-0.079	0.097	0.929	0.177
Moderating Effect 2 -> Y	0.045	0.033	0.110	0.407	0.342
X1 -> Y	0.331	0.358	0.129	2.560	0.005
X2 -> Y	0.142	0.141	0.085	1.679	0.047
Z -> Y	0.459	0.433	0.124	3.701	0.000



LAMPIRAN III : KUISIONER PENELITIAN

FORM A

KUISIONER PENELITIAN

No. :

KATA PENGANTAR

Kepada Yth. :

Bapak/Ibu

- 1. Kepala Dinas / Badan Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai**
- 2. Sekretaris / Kepala Bidang Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai**
- 3. Kepala Sub. Bagian Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai**
- 4. Bendahara Pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah Kota Binjai**

di- Tempat.

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengumpulan data yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan Tesis Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di bawah bimbingan Ibu Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., M.Si., CA. dan Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si. dengan judul penelitian: **“Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan Pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Studi Di Kota Binjai”**, dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner terlampir.

Atas bantuan serta kerjasama yang diberikan oleh Bapak dan Ibu untuk pengisian kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

Hormat Saya,

German P.B. Sianipar

FORM B**IDENTITAS RESPONDEN**

1. Organisasi Perangkat Daerah :
 2. Usia :
 3. Jenis Kelamin : ☐ Pria ☐ Wanita
 4. Pendidikan Terakhir : ☐ S-1 ☐ S-2 ☐ S-3
 5. Masa Kerja : ☐ < 5 Thn ☐ 5-10 Thn ☐ 10-15 Thn ☐ >15 Thn
 6. Jabatan saat ini :
 7. Lama menjabat : ☐ < 5 Thn ☐ 5-10 Thn ☐ 10-15 Thn ☐ >15 Thn
-
-

PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pengisian kuesioner ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, oleh sebab itu semua pilihan jawaban dan pendapat yang Bapak/Ibu berikan akan menjadi kerahasiaan oleh peneliti.
2. Bapak/Ibu dapat memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan Bapak/Ibu dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah disediakan. Setiap pernyataan diberikan 5 (lima) buah alternatif jawaban, dengan kriteria sebagai berikut :
 - SM : Sangat Memadai
 - M : Memadai
 - CM : Cukup Memadai
 - KM : Kurang Memadai
 - TM : Kurang Memadai
3. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian jawaban dan akan melakukan perubahan jawaban, maka dapat mencoret dengan garis dua (==) pada jawaban semula dan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang baru.

Variabel Bebas (X1) = Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap AKIP

- ❖ **TM = Tidak Memadai; KM = Kurang Memadai; CM = Cukup Memadai ; M = Memadai; SM = Sangat Memadai**

I	KEJELASAN SASARAN ANGGARAN	5	4	3	2	1
A	Spesifik	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membuat dan merincikan tugas-tugas yang harus dikerjakan?					
2	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan tujuan anggaran secara jelas dan spesifik?					
3	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), membuat pedoman penyusunan Rancangan anggaran?					
B	Terukur	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan standar dan target yang ingin dicapai organisasi?					
2	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan?					
3	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menyatakan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur?					
C	Menantang tapi Realistis	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan kepentingnya?					
2	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan sasaran dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian?					
D	Berorientasi pada Hasil Akhir	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menetapkan sasaran dan prioritas organisasi?					
2	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menentukan prioritas program?					

Variabel Bebas (X2) = Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi

- ❖ **TM = Tidak Memadai; KM = Kurang Memadai; CM = Cukup Memadai ; M = Memadai; SM = Sangat Memadai**

II	PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI	5	4	3	2	1
A	Penggunaan Software Aplikasi	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menggunakan software dan aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah?					
2	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software atau aplikasi yang sesuai dengan perundang-undangan?					

B	Proses Akuntansi Secara Komputerisasi	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan secara terkomputerisasi?					
2	Bagaimana pengolahan data transaksi keuangan dilakukan secara komputerisasi untuk menjamin keakuratan hasil yang diperoleh?					
3	Bagaimana komputerisasi dalam proses akuntansi keuangan mempermudah pekerjaan aparatur dalam menginput data secara cepat dan tepat waktu?					
C	Laporan Dan Manejerial Yang Terintegrasi	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem informasi yang terintegrasi?					
2	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melakukan pengelolaan keuangan secara utuh mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawabannya?					
D	Kemampuan Pegawai Mengoperasikan Komputer	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana kemampuan aparatur mengoperasikan komputer secara baik?					
2	Bagaimana kemampuan aparatur mengakses internet menggunakan komputer dan perangkat lainnya?					
3	Bagaimana kemampuan aparatur menggunakan aplikasi pemerintah serta aplikasi lainnya?					

Variabel Terikat (Y) = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

- ❖ **TM = Tidak Memadai; KM = Kurang Memadai; CM = Cukup Memadai ; M = Memadai; SM = Sangat Memadai**

III	AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)	5	4	3	2	1
A	Ekonomis dan Efisiensi	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana sumber daya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah diperoleh, dilindungi dan digunakan secara hemat dan efisien?					
2	Bagaimana kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap peraturan dan perundang-undangan, terutama yang berkaitan kehematan dan efisiensi?					
B	Efektivitas	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ditetapkan?					
2	Bagaimana kesesuaian antara program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan visi dan misi Pemerintah disusun?					
C	Outcome	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana dampak seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah terhadap masyarakat?					

Variabel Moderasi (Z) = Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- ❖ **TM** = Tidak Memadai; **KM** = Kurang Memadai; **CM** = Cukup Memadai ; **M** = Memadai;
SM = Sangat Memadai

IV	SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH	5	4	3	2	1
A	Lingkungan Pengendalian	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun pedoman kode etik yang komprehensif?					
2	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menentukan sanksi yang jelas atas pelanggaran terhadap kebijakan dan prosedur yang ada?					
B	Penilaian Risiko	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan identifikasi risiko dan menetapkan dalam bentuk dokumen?					
2	Bagaimana Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menetapkan kinerja berbasis manajemen risiko, dan bagaimana upaya untuk mengatasi dan meminimalisasi risiko?					
C	Kegiatan Pengendalian	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana setiap transaksi dicatat, dan bagaimana pelaporan berkala aset dilakukan?					
2	Bagaimana kehandalan pemisahan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan?					
D	Informasi dan Komunikasi	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana penyediaan informasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan, dan bagaimana kehandalan media untuk mengkomunikasikannya?					
2	Bagaimana ketersediaan saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan, dan bagaimana tindak lanjutnya?					
E	Pemantauan	SM	M	CM	KM	TM
1	Bagaimana kesediaan unit kerja yang melakukan pemantauan atas pelaksanaan seluruh kegiatan Pemerintah Daerah?					
2	Bagaimana fungsi pengendalian dilakukan, serta bagaimana bukti tindak lanjut hasil pemeriksaan didokumentasikan?					



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://pascasarjana.umsu.ac.id/> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](#) [i umsumedan](#) [t umsumedan](#) [u umsumedan](#)

SURAT KETERANGAN AKTIF KULIAH

Nomor: 494/KET/IL.3.AU/UMSU-PPs/F/2023

Bismillahirrahmanirrahim

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **GERMAN P.B. SIANIPAR**
NPM : 2220050028
Tempat, Tgl. Lahir : Medan, 08 Juni 1983
Program Studi : Magister Akuntansi

Benar yang bersangkutan saat ini terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa **Program Studi Magister Akuntansi** pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Semester I (Satu) Genap Tahun Akademik 2022/2023.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 21 Sya'ban 1444 H
14 Maret 2023 M



Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Cc. File





KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI

Nomor : 892- 211/K/TAHUN 2023

Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA BINJAI,

Menimbang) dst.
Mengingat) dst.
Memperhatikan) dst.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN IZIN BELAJAR KEPADA
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diberikan Izin Belajar
untuk mengikuti pendidikan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 dari Daftar
Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Selama mengikuti pendidikan Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Izin Belajar
tersebut tidak meninggalkan tugas kedinasan, biaya pendidikan ditanggung sendiri
oleh yang bersangkutan, yang bersangkutan tidak menuntut penyesuaian ijazah
kecuali ada formasi yang memungkinkan, kepadanya tetap melekat Peraturan
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta jika telah menyelesaikan pendidikan Izin Belajar
agar melaporkannya kepada Wali Kota Binjai;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : dst;

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada Tanggal : 21 Maret 2023

WALI KOTA BINJAI,

dto.

AMIR HAMZAH

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA

H. IRWANSYAH NASUTION, S.Sos.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671225 198901 1001

Kepada :
Sdr. GERMAN P.B. SIANIPAR, SE

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BINJAI

NOMOR : 892-211/K/TAHUN 2023

TANGGAL : 21 Maret 2023

TENTANG : PEMBERIAN IZIN BELAJAR
KEPADA PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI

1.	Nomor Urut	5
2.	Nama	GERMAN P.B. SIANIPAR, SE
3.	NIP	19830608 201001 1 030
4.	Pangkat/Gol. Ruang	PENATA, III/c
5.	Pendidikan Terakhir	S-1
6.	Jabatan / Unit Kerja	Analisis Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Binjai.
7.	Tempat Pendidikan	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, Program Pascasarjana (S2) Program Studi Magister Akuntansi.
8.	Keterangan	-

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KOTA



H. IRWANSYAH NASUTION, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19671225 198901 1001

WALI KOTA BINJAI,

dto.

AMIR HAMZAH



Hal : Permohonan Judul Tesis dan Pembimbing

Kepada YTh ;
Bapak **Direktur** Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di-
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum warahmatullahi wa barakaatuh

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : GERMAN PB. SLANIPAR
N P M : 222 005 0028
Semester :
Prodi/ konsentrasi : MAGISTER AKUNTANSI / AKUNTANSI MANAJEMEN
No. Hp : 6857611533 03
Kredit Kumulatif : SKS

Bersama ini saya mengajukan Sebagai calon Dosen Pembimbing :

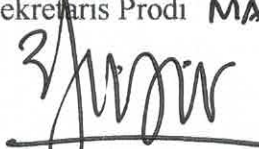
- 1 Dr. Eka Nurmala SE, M.Si Ak, CA
- 2 Dr. Zulia Hanum.

Mengajukan calon judul tesis sebagai berikut :

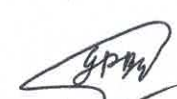
No.	Judul Tesis	Disetujui Oleh
1	PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGEENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI	 AS
2		
3		

Demikian permohonan ini saya sampaikan untuk mendapat pertimbangan Bapak, terima kasih
Catatan : Nilai mata kuliah metodel saya : ...A...

Disetujui oleh,
Ketua/ Sekretaris Prodi **Maksi**


Dr. Eka Nurmala Sari, M.K, CA

Hormat saya
Pemohon,


GERMAN PB. SLANIPAR



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsuamedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsuamedan) [t umsumedan](https://www.twitter.com/umsuamedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsuamedan)

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 1857 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2024

Tentang:

**JUDUL TESIS DAN DOSEN PEMBIMBING MAHASISWA
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Nama Mahasiswa : **GERMAN P.B. SIANIPAR**
NPM : 2220050028
Prodi / Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Manajemen
Judul Tesis : PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN
DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PEMODERASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI
Pembimbing I : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA.
Pembimbing II : Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si

Surat persetujuan ini berlaku sampai tanggal 22 November 2025, Apabila hingga batas tersebut yang bersangkutan belum menyelesaikan Tesisnya, maka Surat Persetujuan ini dinyatakan batal.

Medan, 20 Jumadil Awal 1446 H
22 November 2024 M

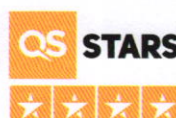


Direktur,

Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum
NIDN. 1012125601

Tembusan:

1. Ketua Prodi MAKSI UMSU;
2. Dosen Pembimbing I dan II;
3. Peringgal.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : German P. B. Sianipar

Nomor Pokok Mahasiswa : 2220050028

Prodi/ Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Manajemen

Judul Tesis : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dengan Pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Studi Di Pemerintah Kota Binjai

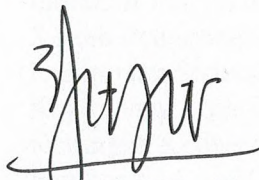
Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Seminar Kolokium

Medan, November 2024

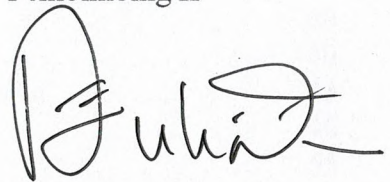
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA.

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si



Prog. Studi : Magister Akuntansi
Tempat : Ruang Seminar PPs MAKSI UMSU
Jl. Denai No. 217 Telp. (061) 88811104

UNDANGAN SEMINAR KOLOKIUUM
Nomor : 1942 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2024

Hari/Tanggal : Jum'at, 20 Desember 2024
Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
Semester Ganjil T.A. 2024/2025

No.	NAMA	NPM	DOSEN PEMBIMBING	DOSEN PEMBANDING	JUDUL PROPOSAL TESIS	KONSENTRASI
1	SILVIA MEGAWATI PADANG	2220050031	1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA 2 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si	Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si	DETERMINAN PENYERAPAN ANGGARAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DAIRI	Akuntansi Manajemen
2	GERMAN P.B. SIANIPAR	2220050028	1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA 2 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si	Assoc. Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA	PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI	Akuntansi Manajemen
3	INDAH DWI PRAMITA HARAHAP	2320050014P	1 Prof. Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA. 2 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA	Assoc. Prof. Dr. IRFAN, S.E., M.M.	PENGARUH STRUKTUR MODAL, BIAYA PRODUKSI DAN BIAYA OPERASIONAL DENGAN PERTUMBUHAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA	Akuntansi Manajemen

Medan, 14 Jumadil Akhir 1446 H
16 Desember 2024 M

Ketua,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA



Diketahui Oleh:
Direktur,

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

- Catatan :**
- 1. Dosen Pembimbing/Penguji memakai busana formal dilengkapi dengan dasi atau kemeja batik
 - 2. Penyaji seminar wajib menghadirkan peserta/audiens minimal 10 orang;
 - 3. Penyaji seminar hadir 15 menit sebelum seminar dimulai;
 - 4. Pakaian penyaji seminar :
 - *Pria* : Kemeja putih lengan panjang + dasi
 - *Wanita* : Rapi, Sopan, Muslim



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : German P. B. Sianipar

Nomor Pokok Mahasiswa : 2220050028

Prodi/ Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Manajemen

Judul Tesis : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dengan Pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Studi Di Pemerintah Kota Binjai

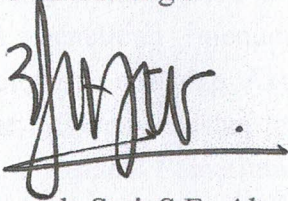
Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Seminar Hasil

Medan, April 2025

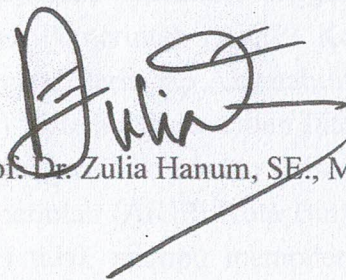
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA.

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si



UNDANGAN SEMINAR HASIL

Nomor : 664 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025

Prog. Studi : Magister Akuntansi
Tempat : Ruang Sidang MAKSI PPs UMSU
Jl. Denai No. 217 Telp. (061) 88811104

Hari/Tanggal : Jum'at, 9 Mei 2025
Waktu : 08.00 wib s.d. Selesai
Semester Genap T.A. 2024/2025

No.	NAMA/NPM	DOSEN PEMBIMBING	DOSEN PENGUJI/PEMBAHAS	JUDUL TESIS	KONSENTRASI
1	GHINA AULIA ATIKA 2120050017	1 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si 2 Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si	1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA 2 Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA 3 Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si	PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, CAPITAL INTENSITY DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PERUSAHAAN FARMASI DI BEI	Perpajakan
2	INDAH SEPTI AWALLIYAH 2120050011	1 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si 2 Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.	1 Assoc. Prof. Dr. SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si 2 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA 3 Dr. SUKMA LESMANA, S.E., M.Si	PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN KUALITAS PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DENGAN SOSIALISASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI KPP PRATAMA SIBOLGA	Perpajakan
3	GERMAN P.B. SIANIPAR 2220050028	1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA 2 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si	1 Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA 2 Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si. 3 Assoc. Prof. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.	PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI	Akuntansi Manajemen

Medan, 8 Dzulqaidah 1446 H
6 Mei 2025 M



Diketahui Oleh:

Direktor,

Prof. Dr. PRIONO EDDY, S.H., M.Hum

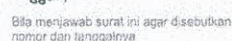
Ketua,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA

Catatan :

- Dosen Pembimbing/Penguji memakai busana formal dilengkapi dengan dasi atau kemeja batik
- Penyaji seminar wajib menghadirkan peserta/audiens minimal 10 orang;
- Penyaji hadir 15 menit sebelum seminar dimulai;
- Pakaian penyaji seminar :
 - Pria : Kemeja putih lengan panjang + dasi
 - Wanita : Rapi, Sopan, Muslim





OS STARS

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : German P. B. Sianipar

Nomor Pokok Mahasiswa : 2220050028

Prodi/ Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Manajemen

Judul Tesis : Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Dengan Pemoderasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Studi Di Pemerintah Kota Binjai

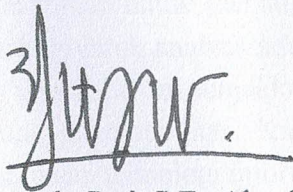
Disetujui Untuk Disampaikan Kepada

Panitia Ujian Tesis

Medan, Juni 2025

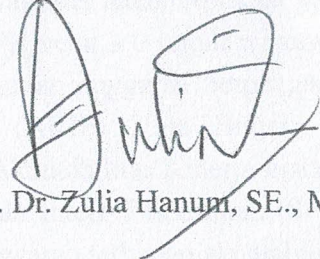
Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., Ak., CA.

Pembimbing II



Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si



Prog. Studi : Magister Akuntansi
Tempat : Ruang Sidang PPs MAKSI UMSU
Jl. Denai No. 217 Telp. (061) 88811104

UNDANGAN UJIAN TESIS
Nomor : 1048 /II.3.AU/UMSU-PPs/F/2025

Hari/Tanggal : Selasa, 15 Juli 2025
Waktu : 08.30 WIB s.d selesai
Semester Genap T.A. 2024 / 2025

No.	NAMA/NPM	DOSEN PEMBIMBING	DOSEN PENGUJI/PEMBAHAS	JUDUL TESIS	KONSENTRASI
1	GERMAN P.B. SIANIPAR 2220050028 359-MAKSI-2025	1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA 2 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si	1 Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA 2 Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si. 3 Assoc. Prof. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.	PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI	Akuntansi Manajemen

Medan, 13 Muharram 1447 H
09 Juli 2025 M



Disetujui Oleh:
a.n. Rektor
Wakil Rektor I

Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, S.H., M.Hum.



Diketahui Oleh:
Direktur

Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Ketua,

Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA

Catatan :

- 1. Dosen Pembimbing/Penguji memakai busana formal dilengkapi dengan dasi atau kemeja batik
- 2. Peserta ujian tesis sudah hadir 15 menit sebelum ujian dimulai;
- 3. Pakaian peserta ujian tesis :
 - Pria : Memakai Jas, Kemeja putih lengan panjang + dasi
 - Wanita : Rapi, Sopan, Muslim (Resmi)





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
PROGRAM PASCASARJANA

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Jl. Denai No. 217 Medan 20226 Telp. (061) - 88811104 Fax. (061) - 88811111

<https://pascasarjana.umsu.ac.id> pps@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.twitter.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)

BERITA ACARA UJIAN TESIS

Pada hari ini, Selasa, 15 Juli 2025 telah dilaksanakan Ujian Tesis bagi mahasiswa Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sbb:

Nama Mahasiswa : GERMAN P.B. SIANIPAR
NPM : 2220050028
Prog.Studi/Konsentrasi : Magister Akuntansi / Akuntansi Manajemen
Judul Tesis : PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI

dengan catatan wajib memperbaiki:

Pembimbing I :
Pembimbing II :
Penguji I :
Penguji II : *Perbaikan bab I & IV sesuai arahan*
Penguji III :

Berita acara ini **ditandatangani** setelah tesis diperbaiki sesuai petunjuk/arahan dari Pembimbing dan Penguji/ pembahas.

Medan,

- 1 Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA
Pembimbing I
- 2 Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si
Pembimbing II
- 3 Prof. Dr. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA
Penguji I
- 4 Dr. Hj. DAHRANI, S.E., M.Si.
Penguji II
- 5 Assoc. Prof. IRFAN, S.E., M.M., Ph.D.
Penguji III



Biro Administrasi Akademik & Data



NPM : 2220050028
Nama Lengkap : German P.B. Sianipar
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat dan Tanggal Lahir : Medan, 08 June 1983
NIK : 1271040806830008
Nomor Kartu Keluarga : 1215032301140001
No. Handphone / Whatsapp : 085761153303
Fakultas : Pascasarjana
Program Studi : Magister Akuntansi
Tanggal Yudisium : 15 July 2025
Total SKS / IPK : SKS = 39 IPK = 3.96
Judul Skripsi Minor / Skripsi / Tesis : PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DENGAN PEMODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) STUDI DI PEMERINTAH KOTA BINJAI
Waktu Penelitian : 8 bulan
Pembimbing I : Dr. Eka Nurmala Sari, S.E., M.Si., Ak., CA
Pembimbing II : Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.
Alamat Tinggal : Jalan Menteng VII Gang Lestari Nomor 5 Medan
Alamat Orang Tua : Jalan Menteng VII Gang Lestari Nomor 5 Medan
Nama Ayah : Endengker Sianipar
Nama Ibu : Toberlina Siregar
No. Tlpn Orang Tua : 088260415165
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Tempat Bekerja : Pemerintah Kota Binjai

Diketahui dan Disetujui
Dekan/Wakil Dekan
Pascasarjana,

Medan, 20 October 2025
Peserta,

German P.B. Sianipar

Catatan :

1. Formulir ini dibuat rangkap 3 (Tiga) :

- o Lembar Pertama untuk Biro Administrasi Akademik & Data
- o Lembar Kedua untuk Peserta Wisuda, dibawa sewaktu pengambilan perlengkapan wisuda seperti : (Baju, Toga, Medali) (Jadwal pengambilan akan diumumkan dikemudian hari)

o Kepada keluarga Wisudawan diberikan undangan Gratis untuk 2 Orang

2. Formulir ini diparaf dan dicap tanda lunas oleh BAK UMSU sebagai bukti pendaftar yang sah.

'.Salamat.'

PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI EKONOMI MANAJEMEN BISNIS DAN AKUNTANSI

SERTIFIKAT AKREDITASI

Berdasarkan Keputusan LAMEMBA No. 2957/DE/A.5/AR.10/X/2025, menyatakan bahwa

Program Studi **Akuntansi** Pada Program Magister

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kota Medan

Terakreditasi dengan peringkat:

Unggul

Sertifikat Akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun
sejak tanggal **20 Oktober 2025** sampai dengan **20 Oktober 2030**

Jakarta, 20 Oktober 2025

Dewan Eksekutif

Supervised by:

In Cooperation with:



Prof. Dr. Ina Primiana, S.E., M.T.
Ketua



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya